

Edisi 7
JUNI 2022

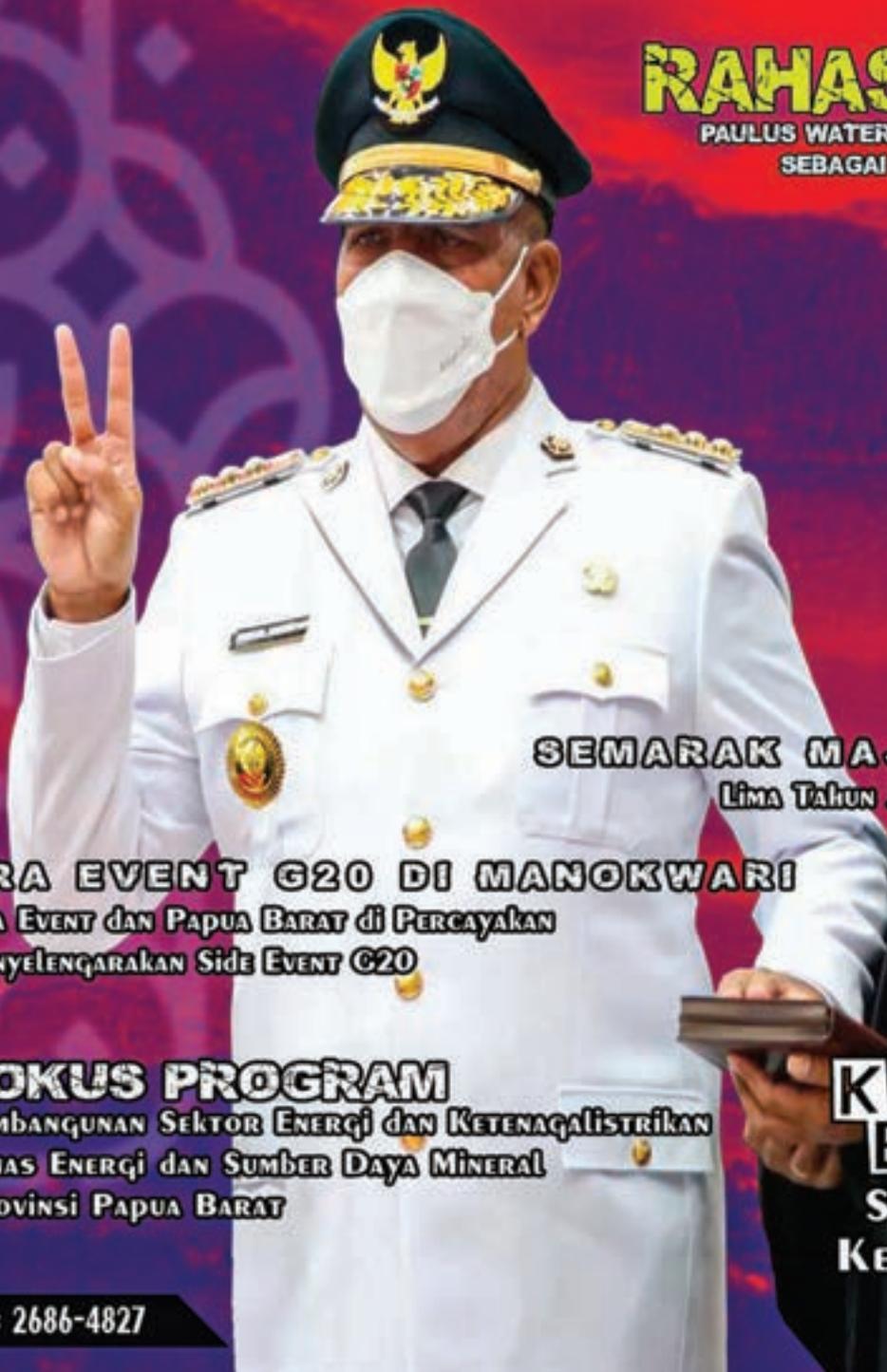
M A J A L A H

KASUARI INOVASI[®]



RAHASIA LANGIT:

PAULUS WATERPAUW BERPROSES HINGGA DILANTIK
SEBAGAI PENJABAT GUBERNUR PAPUA BARAT



SEMARAK MAJU PAPUA BARAT:

Lima Tahun Jejak Pembangunan Berkelanjutan

PRA EVENT G20 DI MANOKWARI

PRA EVENT dan Papua Barat di Percayakan
Menyelenggarakan Side Event G20

FOKUS PROGRAM

Pembangunan Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Papua Barat



Konstruksi Etnosains:

SISTEM BARTER DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT
Papua

ISSN : 2686-4827



RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION



BANK PAPUA
Membangun Tanah Papua



Restorasi terumbu karang di Pulau Nusmapi (Pulau Lemon) oleh delegasi Youth 20.
DOK. BALITBANGDA PB

**Shallom,
Salam sejahtera bagi kita semua
Assalamualaikum Wr. Wb**

Salam baku dapa para pembaca setia Majalah Kasuari Inovasi di Tahun 2022. Puji dan syukur patut kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Majalah Kasuari Edisi Ketujuh dapat dirampungkan.

Kami segenap redaksi Majalah Kasuari dengan senang hati pada kesempatan ini kembali dapat menyajikan informasi-informasi seputar aktivitas pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat terutama yang terkait dengan aktivitas kelitbangan dan inovasi daerah.

Sebagai salah satu media publikasi dan diseminasi, Majalah Kasuari Inovasi merupakan majalah yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat atau yang sekarang telah bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Tujuan mendeskripsikan, mendokumentasikan dan mensosialisasikan aktivitas Kelitbangan dan inovasi daerah serta aktivitas pembangunan di Papua Barat kepada publik.

Edisi Ketujuh kali ini menyajikan rangkuman informasi sejak bulan Desember 2021 sampai Juni 2022 yang dikemas dalam tiga belas rubrik, meliputi profil tokoh, laporan khusus, opini, serba-serbi, galeri, kearifan lokal, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, advetorial, mitra pembangunan, panorama, promosi dan profil organisasi perangkat daerah. Edisi ini membuat laporan khusus tentang Lima Tahun Jejak Pembangunan Berkelanjutan Bersama Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani dalam Semarak Maju Papua Barat, Sertijab Penjabat Gubernur Papua Barat dan Pelaksanaan W20 dan Y20 sebagai Pra Penyelenggaraan Side Event G20. Ada rubrik Kearifan Lokal tentang Konstruksi Etnosains: Sistem Barter Dalam Kehidupan Masyarakat Papua, serta rubrik Iptek yang menampilkan tentang Sumber Data Keanekaragaman Hayati dan Pembuatan Model Distribusi. Rubrik profil tokoh dari Penjabat Gubernur Papua Barat serta beberapa artikel menarik pada rubrik lainnya. Selain itu terdapat rubrik baru yaitu rubrik referensi yang berisikan ulasan tentang buku dan/atau jurnal yang baru saja terbit.

Harapan kami semoga sajian pada Edisi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surat Pembaca

Saya mengapresiasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat yang secara konsisten saat ini telah bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA yang secara konsisten menerbitkan Majalah Kasuari Inovasi, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait dengan kajian ilmiah dan pengembangan daerah Provinsi Papua Barat. Saya tertarik dengan isi dari Majalah Kasuari, informasi yang disajikan sangat menarik dan inovatif. Banyak ide-ide baru yang dihadirkan, sehingga menambah wawasan, pengetahuan dan kreativitas masyarakat khususnya pembaca untuk dapat mengadopsi inovasi-inovasi yang diperoleh. Saya ucapkan selamat dan semoga tim Majalah Kasuari dan BRIDA Papua Barat sukses selalu, dan kedepannya dapat terus memberikan informasi yang berkualitas. Salam.

Sulasry Ayu Umasugi (Ilmuwan Muda Papua 2021 & Mahasiswa Polbangtan Manokwari)

Majalah Kasuari Inovasi sebagai buah karya dari Balitbangda Papua Barat beserta tim redaksi yang bekerja telah memberikan banyak manfaat kepada para pembaca. Majalah Kasuari Inovasi di setiap edisinya selalu berhasil mengolah dan menyajikan informasi secara apik dan positif. Konten yang terkandung didalamnya pun sangat beragam mulai dari kegiatan terkini dalam pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga aneka informasi menarik yang dapat memberikan khazanah baru bagi para pembacanya. Tidak hanya itu, melalui media ini dapat menjadi ruang informasi kepada siapa saja yang ingin membagikan hasil penelitiannya secara ringan dan mudah dipahami. Secara khusus, dalam konten lingkungan yang selama ini dituangkan, ia secara halus mengajak kita untuk berpikir mengenai paradigma lingkungan hidup. Saya berharap semoga Majalah Kasuari Inovasi dapat terus berkembang selaras dengan peran Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Sukses selalu.

Ratna Kuswara (Fauna & Flora International)



**Kami tunggu ya ...
ulasan, saran dan
masukan para
pembaca untuk
pengembangan
MKI ke depannya!!!!
Salam**

DAFTAR ISI



Penerbit

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Pembina

Gubernur Papua Barat
Wakil Gubernur Papua Barat
Sekretaris Daerah Papua Barat

Pengarah

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, FLS

Penanggungjawab

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
Ir. Abdul Haviedz Fatamasyah, M.Si

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Haerul Arifin, S.Hut, M.Si

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah
Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut

Pemimpin Redaksi

Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc

Peliputan

Lince Baransano, S.Si
Alberth Yomo, S.Hut
Arissa F.T Mori Muzendi, SP

Fotografer

Yohanis Octovianus, ST

Tim Data

Jhonal Thio, S.Pi
Rein Hallatu
Ferdinandus Hurulean, SP
Christoffel S.I Maweikere, S.Si., M.Si

Editor Edisi 7

Yance de Fretes, Ph.D
Dr. Antoni Ungirwalu, S.Hut., M.Sc

Layout

Christoffel S.I Maweikere, S.Si, M.Si

Alamat Redaksi

Balitbangda: Jl. Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi,
Gd Kantor Gubernur Sayap 1 Lantai 2 dan 3, Arfai
Manokwari.
Website:
<http://balitbangda.papuarprov.go.id>
Email : redaksi@kasuariinovasi.com
Kerjasama Balitbangda Provinsi Papua Barat
dengan Yayasan EcoNusa dan Bank Papua

ISSN-p: 2686-4827

PROFIL TOKOH

Rahasia Langit: Paulus Waterpauw
Berproses Hingga Dilantik Sebagai
Penjabat Gubernur Papua Barat —5

LAPORAN KHUSUS

Lima Tahun Jejak Pembangunan
Berkelanjutan —12

Sertijab Penjabat Gubernur Papua Barat
—15

Kegiatan Pra Event G20 di Manokwari —17

Papua Barat Dipercayakan
Menyelenggarakan Side Event G20 —22

OPINI

Lima Tahun Papua Barat Dalam
Pandangan Mereka —28

SERBA-SERBI

Mendorong Percepatan Peningkatan
Kapasitas SDM Di Provinsi Papua Barat
Lewat Pendidikan S2 dan S3 —41

Empat Daerah Menjadi Fokus Kajian
Terkait Perubahan Iklim di Wilayah
Pesisir Provinsi Papua Barat —44

Buka Peluang Kerjasama Balitbangda
Fasilitasi Pertemuan Bank Papua
dan Yayasan EcoNusa —46

Kolaborasi Multipihak Untuk
Kemajuan Kakao Ransiki —48

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek
Menyoroti Pemuda dan Potensi Komoditas
Unggulan Daerah Papua Barat —51

Dominggus Mandacan Diabadikan Sebagai
Nama Pada Lahan Kebun Kakao Milik
Klasis Ransiki, Manokwari Selatan —53

Pengembangan Konten Digital Menjadi
Bagian Universal di Semua Kalangan —56

Tunggu Rekomendasi Pemda Papua
Barat, PKT Siap Bangun Kawasan
Industri Petrokimia —58

Balitbangda Cup Usia 40, Membangun
Serta Menjaga Kemitraan Antar OPD
Melalui Olahraga —60

Fasilitasi Pendaftaran HKI
di Kota Sorong —62

Penjemputan Pejabat Gubernur
Papua Barat —66

Kesehatan Jiwa Sebagai Pencegahan
Primer —67

Transformasi "Balitbangda" Menjadi
"BRIDA" Provinsi Papua Barat —70

In Memorium Ronald George Petocz —72

GALERI —76

KEARIFAN LOKAL

Konstruksi Etnosains: Sistem Barter
Dalam Kehidupan Masyarakat Papua
—82

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Hemipenis : Organ Kopulasi Ular —86

Mempertemukan Kepentingan Masyarakat
Adat, Lingkungan, dan Ketahanan Pangan
Nasional di Merauke —88

IPTEK

Sumber Data Keanekaragaman hayati
dan Pembuatan Model Distribusi —94

MITRA PEMBANGUNAN

GIZ FORCLIME Siap Mendukung
Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
—99

Pertemuan Perdana Manajemen Baru
GEG dengan Kepala Balitbangda Papua
Barat —100

Walaupun Berganti Entitas, CI Tetap
Mendukung Program Pembangunan
Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat
—102

Bank Papua Siap Dukung Balitbangda
Provinsi Papua Barat —104

Ilmuwan Muda Papua Tetap Menjadi
Program Utama Kerjasama Balitbangda
Provinsi Papua Barat dan EcoNusa —106

Pencegahan Korupsi Menjadi Perhatian
Balitbangda Papua Barat dan GIZ —108

Pengelolaan Mahkota Permata Tanah
Papua Mendapat Dukungan FFI —110

Balitbangda dan EcoNusa Berkolaborasi
Dalam Diseminasi Hasil Kajian
Pengembangan SDM Pariwisata di Papua
Barat —113

Dukung Penuh Event G20 di Indonesia,
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Bersama Mitra Pembangunan
Melakukan Citizen Science —116

PANORAMA —118

PROMOSI

Sanggar Klafun: Wadah Kreatifitas
Perempuan Asli Papua —120

PROFIL OPD

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Papua Barat —122

REFERENSI

Papua Barat Menuju Pembangunan
Berkelanjutan —126

■ PROFIL TOKOH

Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si
Penjabat Gubernur Papua Barat



Yang lain mungkin meminta pertolongan dan berkata **“Tuhan tolong”**, tetapi saya pribadi sejak kecil tidak pernah meminta, melainkan hanya bersyukur dalam hati dan berkata, **“Tuhan terima kasih”**

Rahasia Langit: Paulus Waterpauw Berproses Hingga Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat



Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si adalah salah satu putra terbaik asli Papua lahir di Fakfak, Papua Barat pada 25 Oktober 1963, merupakan putra sulung dari Bapak Ferdinan Waterpauw dan Ibu Yakomina Atiamuna. Paulus menikah dengan Roma Megawanty Pasaribu dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ruth Emmanuella Waterpauw yang telah menikah dengan Novan Setyo Tan Imbiri, Denzel Piereto Waterpauw adalah anak ke dua dan anak bungsu adalah Raisa Serafina Waterpauw yang juga telah menikah dengan Inspektur satu Hotma A.P Manurung.

Paulus merupakan purnawirawan Polri asal Papua dengan pengalaman kepemimpinan terbaik yang dipercayakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memimpin kepolisian negara pada sejumlah provinsi di Indonesia serta jabatan lainnya.

Tentunya karir Paulus menjadi inspirasi bagi banyak kalangan terutama generasi muda Papua, karena Paulus memiliki pencapaian yang diperoleh karena telah taat mengikuti sebuah proses kehidupan yang panjang. Bagi dirinya pendidikan dan tauladan dalam keluarga itu sangat penting. Penjabat Gubernur Papua Barat ini, terinspirasi dari kecil sejak hidup bersama orang tua, ayah yang adalah seorang polisi yang rajin berburu di hutan serta juga ke laut sehingga saat kecil Paulus sering ikut bersama ayahnya ke hutan. Kesederhanaan, ke-taatan, kerja keras, kejujuran, dan kesabaran yang dipolakan oleh orang tua, itulah yang menjadi warisan sejati bagi Paulus.

Saat berusia 10 tahun, kala itu Paulus diajak liburan bersama sang paman (Om Johannes Sopaheluwakan) dan tante



Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan Ny. Roma Megawanty Pasaribu. DOK.BALITBANGD PB

Faulina Berta Wattimena (Istri Om Johannes) dari Fakfak ke Sorong kemudian dilanjutkan ke Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan Paulus bersama Om Johannes dan Tante Faulina sangat singkat dan akhirnya berujung pada keakraban kekeluargaan hingga dirinya bisa melanjutkan sekolah pada SD Yayasan Pen-

didikan Kristen di daerah Surabaya Timur kelas IV yang akan naik ke kelas V. Dari situlah Paulus memulai kehidupan baru di Surabaya hingga menyelesaikan sekolah pada Akademi Kepolisian (Akpil). Ini merupakan realita kehidupan yang luar biasa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya.

Paulus Waterpauw dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian di Jakarta pada Kamis, 12 Mei 2022. Sebelum dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (BNPP) sejak 21 Oktober 2021.

Setelah dilantik, Paulus Waterpauw bersama Nyonya Roma Waterpauw tiba di Bandara Rendani Manokwari pada Kamis, 19 Mei 2022 dan disambut oleh Pemerintah dan Masyarakat Papua Barat. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode kepemimpinan 2017-2022 yang telah selesai memimpin Papua Barat pada 12 Mei 2022 lalu. Drs. Dominggus Mandacan, M.Si bersama Nyonya Juliana Mandacan, turut Mohammad Lakotani, SH, M.Si bersama Nyonya Lani Lakotani, serta Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si selaku sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat bersama Nyonya Sulastri Mandacan menyambut hangat kedatangan Penjabat Gubernur dan rombongan dari Jakarta. Tarian adat dari Kaimana, Fakfak dan menyambut kedatangan Paulus Waterpauw kembali ke Manokwari. Ini hal yang menarik karena juga tarian Tumbu Tanah suku Asli Arfak mewarnai penyambutan Putra Asli Papua dari Selatan ini saat tiba di Bandara. Prosesi adat sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi, Kepala Suku Besar Fakfak-Kaimana menyerahkan Penjabat Gubernur Papua Barat kepada Kepala Suku Besar Arfak dan Pemerintah Papua Barat yang diterima baik oleh Nataniel Mandacan. Selain itu Bupati Manokwari, FORKOPIMDA Provinsi Papua Barat, sejumlah pimpinan OPD dan masyarakat yang menyambut kehadiran Penjabat Gubernur Papua Barat ini.

Saat dipercayakan oleh negara untuk memimpin Provinsi Papua Barat yang terbesar di dalam pikiran Paulus adalah syukur. "Syukur, itu pasti. Puji Tuhan ya... karena saya masih dipercayakan. Saya mengambil contoh dari teman-teman seangkatan pada kepolisian, bahwa setelah mereka dengan saya memasuki masa purna yah... sekarang mereka lebih sibuk menghabiskan waktu-waktu mereka dalam aktivitas pribadi dan keluarga. Saya hari ini masih diamanahkan negara untuk memimpin Provinsi Papua Barat dan diberikan kesempatan untuk terus mengabdikan kepada masyarakat dan bangsa.

PROFIL TOKOH



Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan istri (tengah) bersama Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan istri (kiri) serta Mohamad Lakotani, SH, M.Si dan istri (kanan) saat serah terima jabatan. DOK. BALITBANGDA PB

Jadi saya sangat bersyukur, artinya, busuk-busuk anak-anak selatan kaya begini Tuhan memberikan kesempatan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memberikan kepercayaan, itu maknanya,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Barat.

Sejak kecil Paulus tidak pernah bermimpi seperti pencapaian yang diterima dari kepolisian hingga menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat. “Tidak ada.... tidak ada mimpi, hanya sejak kecil memang saya sudah yakin Tuhan punya rencana yang terbaik untuk saya, sejak bersama orang tua di Fakfak, tangan Tuhan mengangkat saya dari kampung, bawa ke kota besar di Surabaya dan saya berjuang di sana dan Tuhan membuka jalan sampai hari ini. Jadi saya sangat yakin, bahwa kehidupan itu sebuah misteri memang betul, tidak ada yang tahu kita mau jadi apa ke depan, kita terlahir untuk siapa, bagaimana keadaan kita nanti, tetapi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan yang mengatur hari-hari hidup kita berarti

kita tidak perlu kuatir karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan,” tutur Paulus.

Nasihat om dan tante yang membawa dirinya ke Surabaya kala itu selalu menghiasi pikirannya, beginilah nasihat tante Paulina “Paulus jika kamu sudah membawa beban hidupmu dan berserah kepada Tuhan, yakinlah dan jangan pernah ada keraguan sedikit-pun di hatimu” kata-kata itu yang selalu diingat. Seakan-akan saya sudah berdoa, Tuhan terima kasih atas kasih sayang Tuhan” tetapi tiba-tiba nanti ada ngingang-ngiang, “kamu nanti gagal”. Saya selalu men-*declare* “Haleluya dalam Nama Yesus, saya terima kebaikan dari Tuhan dan menolak yang bukan datang dari Tuhan, saya aminkan itu semua,” ungkap Paulus Waterpauw.

Putra Papua dengan pangkat tertinggi Bintang tiga kepolisian ini mengaku bahwa sejak kecil ia jarang bahkan tidak pernah meminta sama Tuhan. Dirinya berkata pola hidupnya berbeda, karena yang lain mungkin

meminta pertolongan dan berkata “Tuhan tolong”, tetapi ia pribadi yang sejak kecil tidak pernah minta, melainkan hanya bersyukur dalam hati dan berkata, “Tuhan terima kasih, Tuhan sudah membawa saya, tetapi saya yakin Tuhan akan membukakan jalan untuk hal-hal yang sedang dijalani dan diusahakan. Tuhan terima kasih saya sekarang sudah lulus SD, saya akan masuk SMP, terima kasih Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Saya sudah SMP, Saya mau ke SMA, Tuhan berikan kesempatan, dan sampai jenjang selanjutnya seperti itu”. Rasa syukur itu yang terus membawa Paulus Waterpauw menikmati satu tanda heran ke tanda heran yang lainnya. Baginya rasa syukur itu selalu ada dalam dirinya, karena baginya kalau kita ada sampai hari ini hanya karena Tuhan.

Anak kelahiran Fakfak besar Surabaya ini menyampaikan pengalaman menarik ketika melewati batas wilayah Libanon-Israel “Saya sering jumpa Tuhan begitu, ada bukit yang indah, hamparan taman yang indah, dan kami



Pj. Gubernur Papua Barat ketika diwawancarai oleh Tim Media Balitbangda Provinsi Papua Barat
DOK.BALITBANGDA PB

bertiga yaitu saya bersama istri dan anak saya yang laki-laki. Saat itu kami menggunakan mobil kecil menuju ke Yerusalem, Israel. Sebelum tiba di sana, di belokan pertama, di taman itulah saya berjumpa, dan ternyata di situ ada salib-Nya. Saya adalah orang yang selalu berdoa di bawah pangkuan Tuhan, makanya coba lihat hidup saya sekarang banyak orang yang mau coba begini, tidak bisa. Kalau orang Jawa bilang “itu rahasia langit”. Kita hidup sudah seperti itu, hanya harus diyakini, itu pengalaman iman saya, jadi kalo orang tanya Bapa bisa sampai seperti saat ini? yah saya juga mana tahu.

Keluarga dari Paulus pun biasanya protes beliau, katanya kasihan ya, karena saya melanjutkan masa tua saya di Papua. Saya berkata ya... benar !. Kalo dilihat pengabdian saya sekarang 2022, mau hampir 20 tahun. Paulus menyampaikan jika nanti ada hal-hal yang kurang yang masih belum sesuai dengan harapan marilah duduk bersama untuk berbicara mencari solusi. “Jangan memaksa kemauan tetapi belum tentu bisa mampu” ada banyak hal yang bisa saling dengar, apalagi sekarang ini. Berbicara seperti ini saya punya buku ini, Paulus Waterpauw Melayani Dengan Hati, ini waktu saya masih WAKAPOLDA, nanti bisa dibaca bukunya.

“Pengabdian itu pelayan ya, Saya datang sebagai abdi, untuk pengabdian” Gubernur Papua Barat ini menghimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para bupati di Papua Barat untuk melayani seluruh masyarakat, Pemerintah ada bukan untuk diri sendiri tetapi untuk rakyat. Paulus menyampaikan jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan maka harus bertemu untuk didiskusikan. Baginya sosok seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia tampil di depan, membawa berbagai aspirasi. Penjabat Gubernur Papua Barat ini mengutarakan bahwa banyak persoalan yang diterima, bahkan ia bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, para pimpinan OPD dan semua yang terkait harus bersinergi untuk menghadapi dan menyelesaikan semuanya dengan baik.

NO	PENDIDIKAN POLRI	TAHUN
1.	Akademi Kepolisian (Akpol)	1987
2.	Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Ptik)	1996
3.	Sekolah Staf Dan Pimpinan (Sespim)	2002
4.	Lembaga Ketahanan Nasional RI PPSA XIX	2013

NO	PENDIDIKAN KEJURUAN	TAHUN
1.	Daspa Intel	1996
2.	Palan Intel	1997
3.	Pa Opsnal Intel	1999

NO	KEPANGKATAN	TAHUN
1.	Inspektur Polisi Dua (IPDA)	1987
2.	Inspektur Polisi Satu (IPTU)	1990
3.	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	1993
4.	Komisaris Polisi (KOMPOL)	1998
5.	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	2003
6.	Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL)	2006
7.	Brigadir Jenderal Polisi (BRIGJEN POL)	2011



PROFIL TOKOH

Menurutnya MKI merupakan wadah untuk dapat menyampaikan pesan dari pemerintah kepada masyarakat. MKI terus maju dan pemerintah harus mendorong sehingga yang pikiran dan harapan dari masyarakat ditampung serta dikolaborasikan agar ada program-program yang bisa langsung menyentuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Itulah harapan negara, itulah harapan para menteri, itulah harapan gubernur dan semua yang ada di pemerintahan. Jadi baik gubernur, memang yang hanya penjabat yang menjalankan amanah, tidak lebih. Kadang dong bilang begini, “Bapa hari ini ada agenda begini”, “ayook tong kesana”, “Bapa, hari ini ada perjalanan mo begini”, “ayoo, selama tidak sibuk”. Kira-kira itu, jadi saya juga punya prinsip, kalo tidak ada panggilan ke Jakarta, saya tetap di sini. Orang nomor satu di Papua Barat ini selalu didoakan oleh Istri yang bekerja di bidang perbankan di Jakarta dan anak-anak saya sementara tidak bersama di Manokwari, namun semua keluarga ini selalu mendoakan Bapak Paulus Waterpauw dengan harapan tetap sehat, kuat dan bekerja dengan maksimal.

Sebagai penjabat Gubernur Papua Barat yang baru dilantik, dirinya berharap kepada semua jajaran pemerintahan, Mitra Pembangunan Papua Barat, serta masyarakat untuk dapat mendukung kebijakan, namun sebaliknya pemerintah juga harus melihat aspirasi serta harapan masyarakat. “Sebab kita ini hanya awak, kita jadi jembatan, jadi mediator, jadi fasilitator yang menghubungkan aspirasi, harapan bahkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat.

Paulus pernah menjadi komandan upacara HUT RI ke – 61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Negara Jakarta. Baginya tidak ada ambisi yang lain, karena dirinya sudah memiliki pangkat karir tertinggi yaitu bintang tiga pada kepolisian. Mulai dari jabatan, Kapolda sebanyak empat kali pada berbagai daerah di Indonesia, menurutnya itu sudah maksimal. Juga Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta kepercayaan lainnya oleh negara, baginya sangat luar biasa. Putra Fakfak ini memiliki prinsip, “kitorang kerja sama-sama, mengabdikan sama-sama, berdoa sama-sama, jalan sama-sama, sampe titik maksimal. Kitorang kerjakan yang ada ini



Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si saat mengisi pujian pertama kalinya dalam ibadah minggu di gereja Laharoi Mansinam setelah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

“Paulus jika kamu sudah membawa beban hidupmu dan berserah kepada Tuhan, yakinlah dan jangan pernah ada keraguan sedikitpun di hatimu” kata-kata itu yang selalu diingat.

dan itu dulu”

Penjabat Gubernur Papua barat ini berharap selalu ada koordinasi yang baik dari seluruh OPD di lingkup Provinsi Papua Barat, lembaga vertikal maupun horizontal untuk terus bekerja, elaborasi, kolaborasi. Program-program yang menjadi perencanaan yang strategis itu sudah di buat, banyak pada umumnya OPD sudah menyusun program dengan baik hanya implementasinya yang perlu diatur dengan baik. Pekerjaan harus berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ini pengalaman Paulus pada masa kecil yang tidak dilupakan, ayahnya adalah seorang polisi pada masa itu, namun untuk memenuhi kebutuhan lainnya, ayahnya pun harus

menangkap ikan, berburu, juga mengambil sayuran di hutan. Hasil yang diperoleh, dapat dijual bahkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Sudah menjadi rutinitas bagi Paulus untuk mengikuti ayahnya untuk menembus hutan belantara dan menyusuri lautan, walaupun perasaan takut selalu ada tetapi ayahnya selalu meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Bahkan Ibunya, Yakomina Atiamuna yang selalu memberikan petuah agar selalu hati-hati.

Saat usia anak-anak, Paulus penakut setan atau makhluk halus, karena teman-teman seusianya sering bercerita kalau pepohonan dan bebatuan besar ada penunggunya. Tepat Paulus kelas empat SD, saat itu ayahnya mengajak Paulus untuk pergi ke Pulau Panjang di bagian seberang teluk yang biasanya didatangi sama ayahnya. Setelah tiba, ayahnya sampaikan “tunggu di sini ya,,, Bapa mau ambil daun melinjo,” katanya. Setelah itu ayahnya langsung pergi ke pantai yang cukup jauh dari Paulus, semakin lama maka rasa takut mulai muncul dalam pikirannya, sehingga bocah ini seketika mencari ayahnya, “Bapak.....Pak.....Pak...!” semakin lama, suaranya semakin keras namun ayahnya tidak menyahut. Maka Paulus mulai memberanikan diri untuk berteriak sekeras-kerasnya dan berlari mencari ayahnya.



Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D saat menyerahkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur kepada Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si sebagai Pj. Gubernur Papua Barat.
DOK. KEMENDAGRI RI

Ketika telah berlari dari kejauhan, tampak ayahnya ternyata lagi santai. Ayahnya tenang-tenang saja melihat anaknya yang menghampirinya dengan takut dan nada kesal. “Kenapa Bapak meninggalkan saya sendirian?” “Bagaimana, memangnya tadi kamu ketemu setan?” “Tidak!” “Kenapa kamu takut?” “Tidak ada apa!” jawab Paulus sambil menangis. Akhirnya Paulus tahu kalau ayahnya memang sengaja meninggalkannya dengan tujuan agar Paulus tidak takut dan sebenarnya ketakutan itu datang karena pikiran sendiri yang sudah didoktrin oleh cerita-cerita lama di kampung.

Tentunya ini adalah sepenggal cerita kisah hidup yang sangat luar biasa dan memberi inspirasi bagi semua orang-orang muda di Tanah Papua. Pada beberapa kesempatan, saat Paulus Waterpauw menghadiri beberapa rangkaian acara dan memberikan sambutan, beliau selalu mengatakan bahwa “anak Papua juga bisa, anak Papua juga bisa bersaing pada tingkat nasional bahkan internasional” “Kan kita sama-sama makan nasi yang sama, kok.... Kenapa kita merasa ada perbedaan” itulah semangat yang selalu ada pada Paulus Waterpauw sosok teladan bagi Tanah Papua yang saat ini memimpin Papua Barat. Semoga kehadiran Paulus Waterpauw yang akrab dipanggil Kakak Besar dapat membawa akselerasi dan transformasi bagi kemajuan Provinsi Papua Barat.

Tulisan ini diramu dari hasil wawancara tim redaksi MKI Balitbangda Papua Barat pada saat Penjabat Gubernur Papua Barat sedang melakukan dialog interaktif di RRI Manokwari pada Selasa, 12 Juli 2022. Selain itu informasi lainnya juga diambil dari Buku yang berjudul “Biografi & Jejak Pemikiran Paulus Waterpauw Mengabdikan Dengan Hati” yang diberikan langsung oleh Bapak Paulus Waterpauw kepada Tim Media.

● Penulis : Lince B. & Arissa M.
(Balitbangda PB)

NO	RIWAYAT JABATAN	TAHUN
1.	Samapta Polresta Surabaya Timur Polda Jatim	1987 - 1988
2.	Wakasat Serse Polresta Surabaya Timur Polda Jatim	1988 - 1990
3.	Kanit Interkrim Sat IPP Polwiltabes Surabaya Polda Jatim	1990 - 1992
4.	Kasat Intelkam Polres Mojokerto Polda Jatim	1992 - 1994
5.	Kasat Opps Puskodalops Polda Kalimantan Tengah	1996 - 1997
6.	Paban Muda Pada Paban IV/ Kam Sintel Polri	1997 - 2000
7.	Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya	2000
8.	Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat	2000
9.	Wakapolres Tangerang Polda Metro Jaya	2001
10.	Pamen Sespim Dodiklat Polri	2002 - 2003
11.	Kapolres Mimika Polda Papua	2003 - 2005
12.	Kapolresta Jayapura Polda Papua	2005 - 2006
13.	Dir Reskrim Polda Papua	2006 - 2009
14.	Penyidik Utama TK II Dit III/ Kor dan WWC Bareskrim Polri	2009 - 2010
15.	Widyaiswara Madya Sespim Polri	2010 - 2011
16.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua	19 Okt 2011- 19 Des 2014
17.	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat	19 Des. 2014 -30 Jul 2015
18.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	30 Jul 2015
19.	Wakabaintelkam Polri	18 Apr 2017
20.	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara	2 Jun 2017
21.	Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI	13 Agt 2018
22.	Analisis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri	14 Okt 2018
23.	Kepala Kepolisian Daerah Papua	27 Sep 2019
24.	Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri	18 Feb 2021- 21 Okt 2021
25.	Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP	21 Okt 2021
26.	Penjabat Gubernur Papua Barat	12 Mei 2022 - sekarang

Semarak Maju Papua Barat: Lima Tahun Jejak Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam kepemimpinan Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohamad Lakotani, SH, MM periode 2017 – 2022 dikemas dan disajikan dalam perhelatan Semarak Maju Papua Barat yang berlangsung di Golden Ballroom Sultan Hotel Jakarta. Rabu (27 April 2022).

Pemerintah Daerah melalui Badan Penghubung Provinsi Papua Barat, melaksanakan *event* Semarak Maju Papua Barat melaporkan hasil-hasil kerja pemerintah daerah selama periode 2017 – 2022 yang dikemas dalam video milestone oleh Balitbangda Papua Barat.

Selain itu juga disajikan dalam buku “Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan” yang merupakan rangkuman aktivitas pembangunan dan capaian kinerja di Provinsi Papua Barat dalam lima tahun kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mohamad Lakotani dan Sekretaris Daerah Nataniel D. Mandacan dalam mengimplementasikan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Sejak Provinsi Papua Barat dideklarasikan sebagai Provinsi Konservasi pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Alm. Gubernur Papua Barat Abraham Oktavianus Atururi, tidak hanya menjadi gaungan seremonial yang dilakukan pada saat itu. Sebagai ben-

tuk komitmen pemerintah daerah, hal ini ditindaklanjuti dalam kepemimpinan Gubernur Papua Barat dan Wakil Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohammad Lakotani melalui Deklarasi Manokwari dalam perhelatan akbar “*International Conference on Biodiversity Ecotourism and Creative Economy (ICBE)*”. Deklarasi Manokwari merupakan awal dari komitmen untuk memantapkan langkah kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

Ada delapan tema besar yang disajikan dalam Buku Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan kolaborasi antara komponen Pemerintah, Mitra Pembangunan dan masyarakat dalam setiap upaya mendorong tercapainya tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua yang Damai, Berkelanjutan, Lestari dan Bermartabat.

Selanjutnya buku ini diserahkan kepada beberapa tamu undangan dalam kegiatan Semarak Maju Papua Barat diantaranya Duta Besar Inggris, Duta Besar India, Duta Besar Uni Eropa, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Staf Ahli Menteri BAPPENAS, Perwakilan Mitra Pembangunan oleh Yayasan EcoNusa, Bupati Manokwari Selatan oleh Gubernur Mandacan didampingi oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si.

Event Semarak Maju Papua Barat juga menyajikan dan mempromosikan beberapa





Suasana Semarak Maju Papua Barat
di Ballroom Sultan Hotel Jakarta.
DOK.BALITBANGDA PB



Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan wakil Mohamad Lakotani, SH, M.Si didampingi oleh Kepala Kantor Badan Penghubung Papua Barat Ibu Juliana Antoneta Maitimu, saat mengunjungi pameran produk lokal dan unggulan daerah. DOK.BALITBANGDA PB

potensi diantaranya laut, budaya dan adat yang disajikan dalam drama musikal, yang nantinya juga akan dilakukan promosi melalui Sail Teluk Cenderawasih. Agenda ini diharapkan dapat membawa percepatan ekonomi dan koneksi yang lebih luas yang dapat membantu promosi potensi adat dan budaya OAP. Bupati Teluk Wondama dan Bupati Manokwari Selatan yang juga ikut hadir dalam acara Semarak Maju Papua Barat ini juga menyatakan kesiapannya dalam menyambut Sail Teluk Cenderawasih 2023 nanti.

Kemasannya acara lain dari Semarak Maju Papua Barat adalah pameran produk-produk dari perwakilan pemerintah daerah, mitra pembangunan, BUMD dan perwakilan UMKM, yang dikunjungi langsung oleh Gubernur Papua Barat dan Wakil dan jajaran pemerintah pusat dan daerah, para Perwakilan Duta Besar, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan sejumlah tamu undangan lainnya di Golden Ballroom Sultan Hotel Jakarta.

● Penulis : Arissa M. (Balitbangda PB)



Penyerahan Buku Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan oleh Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si kepada Duta Besar Uni Eropa. DOK.BALITBANGDA PB

Sertijab Penjabat Gubernur Papua Barat



Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan istri, Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan istri, Bapak Mohamad Lakotani, SH, M.Si dan istri bersama seluruh Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat. DOK.BALITBANGDA PB

Pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada periode 2017-2022 tanggal 12 Mei 2022, dan dilantiknya Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si sebagai Penjabat gubernur pada tanggal yang sama, maka diikuti dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 kepada Penjabat Gubernur Papua Barat di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat Jumat, 20 Mei 2022.

Dalam mengawali rangkaian acara tersebut Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohamad Lakotani, SH, M.Si menyerahkan memori Sertijab dan mengucapkan selamat kepada Komjen. Pol. (Purn.)

Drs. Paulus Waterpauw, M.Si “Kami mengucapkan selamat kepada Penjabat Gubernur yang baru dan juga selamat kembali ke kampung halaman untuk memimpin Papua Barat,” tutur Mandacan.

Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani ketika memberikan sambutan menyampaikan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dengan baik. “Kami sudah selesai tugas tetapi saya tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Suku Besar Arfak, saya akan selalu berkoordinasi dengan kepala suku lainnya yang ada di Papua Barat dan siap mendukung sepenuhnya apa yang akan Bapak Waterpauw kerjakan sebagai Penjabat gubernur. Kita mendukung dengan doa karena yang akan dikerjakan adalah un-

tuk kemaslahatan rakyat Papua Barat,” jelas Mandacan.

Dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Barat mengakui bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan periode 2017-2022, program-program sesuai visi dan misi telah dijalankan, namun pada tahun 2020-2021 ada beberapa kendala karena dalam situasi pandemi Covid-19. *Refocusing* anggaran APBD sebesar 35% untuk penanganan Covid, jadi kalau ada kekurangan dalam apa yang dikerjakan adalah tanggung jawab dalam masa periode kepemimpinan kami. “Kami berharap apa yang telah kita bangun bersama dapat membantu masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik Forkopimda Papua Barat, tokoh



Drs. Dominggus Mandacan, M.Si didampingi Mohamad Lakotani, SH, M.Si, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Periode 2017-2022 saat memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan. DOK.BALITBANGDA PB



Serah terima dokumen oleh Bapak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si kepada Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan didampingi oleh Bapak Mohamad Lakotani, SH, M.Si dan Sekda Provinsi Papua Barat Dr. Nataniel Mandacan, M.Si. DOK.BALITBANGDAMEDIA PB

agama, tokoh adat, Tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan semua pihak yang telah bersinergi bersama untuk membangun Papua Barat” tutup Mandacan.

Selanjutnya Paulus Waterpauw sebagai Penjabat gubernur yang baru dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani. “Saya senang dan terharu dengan Bapak Dominggus dan Bapak Lakotani, serta apa yang mereka sudah kerjakan, saya siap menjalankan mandat negara dalam memimpin roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Saya meminta waktu untuk menyesuaikan dengan semua di Papua Barat,” kata Waterpauw.

Waterpauw mengakui bahwa tentunya dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, dan mendukung program nasional antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terkait dengan stabilitas dan keamanan daerah, saya meminta dukungan dari Kodam XVIII Kasuari, Kepolisian Daerah Papua Barat dan semua pihak terkait. Selain program pemulihan ekonomi, Waterpauw mengharapkan adanya dukungan dari Forkopimda dan perangkat daerah Papua Barat serta instansi vertikal yang ada di Papua Barat.

Sementara Bupati Teluk Bintuni Petrus



Sambutan Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si didampingi Ny. Roma Megawanty Pasaribu saat memberikan sambutan. DOK.BALITBANGDA PB

Kasihw, mewakili para Kepala Daerah Bupati dan Walikota di Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, serta menyampaikan selamat atas kepemimpinan Penjabat Gu-

bernur Papua Barat Paulus Waterpauw. “Kami siap mendukung program yang Bapak lakukan dalam membangun Papua Barat,” tutup Bupati Teluk Bintuni.

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)

Kegiatan *Pra Event* G20 di Manokwari

Pra Event

Untuk memeriahkan pelaksanaan *Side Event* G20 di Tanah Papua, Mitra Pembangunan bersama Pemerintah Provinsi melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

■ Kegiatan *Pra Side Event* W20

Bentara Papua

Belajar Bersama Pengolahan Pangan Sehat Bagi Kaum Perempuan

Kegiatan ini berbentuk pelatihan bersama untuk mendokumentasikan olahan pangan lokal yang ada di Pegunungan Arfak dan membuat olahan yang kekinian dari pangan lokal tersebut. Ada 25 perempuan yang berada di sekitar Kampung Udohotma – Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak yang terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 21 Mei 2022.

GIZ Forclime

Talkshow: Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Tanah Papua

Talkshow ini merupakan kolaborasi antara GIZ FORCLIME dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 bertempat di Arboretum Fakultas Kehutanan, Universitas Papua. Sesi ini akan menampilkan pemimpin perempuan dari Kampung Bikar di Kabupaten Tambrauw yang akan membagi pengalamannya dengan Kelompok Tani Pengelolaan Hutan dan perempuan-perempuan hebat lainnya yang berkontribusi pada pengelolaan berkelanjutan SDA di Tanah Papua.

Kolaborasi GIZ CPFS dan Alliance for Integrity

Diskusi Panel Peran Pengusaha Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Pembangunan kapasitas perempuan pengusaha di Papua terutama Papua Barat dirasa penting karena masih banyak ruang untuk perbaikan, ditambah lagi, perempuan



Training of Trainer (TOT) Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) untuk komunitas pemuda-pemudi di Kaimana. DOK. CONSERVATION INDONESIA

dan pengusaha perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pemulihan ekonomi. Diskusi ini menitikberatkan pada peran perempuan dalam pemulihan ekonomi dan bagaimana perempuan pengusaha dapat berhasil dengan tetap menjalankan bisnis berintegritas. Diskusi ini akan dilaksanakan pada Agustus 2022 dengan melibatkan 40 perempuan di Manokwari. *Alliance for Integrity* akan menghadirkan pembicara internasional, diantaranya adalah *Alliance for Integrity Network* Manager Mexico sekaligus Gender Koordinator dan juga perwakilan dari Petugas Kepatuhan perusahaan Covestro di Mexico yang akan hadir di Manokwari.

World Resources Institute (WRI) Indonesia

Workshop Pengelolaan Perkebunan Kakao dan Pengolahan Produk Turunan Kakao secara Berkelanjutan dan Inklusif

Workshop ini dilakukan untuk mendukung keterlibatan perempuan secara inklusif dalam pengelolaan perkebunan Kakao dan pengolahan produk turunan kakao, dengan

harapan dapat mencapai pengembangan komoditas kakao yang berkelanjutan di tingkat kampung, dan berpola pengelolaan berbasis BUMKam. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 dan dihadiri oleh masyarakat Kampung Aryawenmoho beserta kelompok perempuan.

Samdhana

MENOKEN Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Karya Seni Perempuan PAPUA

MENOKEN melibatkan enam Seniman dan budayawan Papua yang mendaftarkan sembilan karya ciptaannya dalam kegiatan ini. Selanjutnya, pada Mei dan Juni 2022, Samdhana Institute bekerjasama dengan Balitbangda Papua Barat dan para seniman dan budayawan melaksanakan *talk show* dan sosialisasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka perlindungan aset-aset masyarakat adat di Tanah Papua. Aset-aset yang dimaksud mencakup: ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional,

Kemitraan ketika melakukan serial diskusi *online* BERISIK (Bincang Iklim Asik) Papua, sebagai bentuk anak muda peduli Pembangunan Berkelanjutan Tanah Papua. DOK. KEMITRAAN

sumber daya genetik, indikasi geografis dan varietas tanaman milik masyarakat adat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak legalisasi aset masyarakat adat Papua.

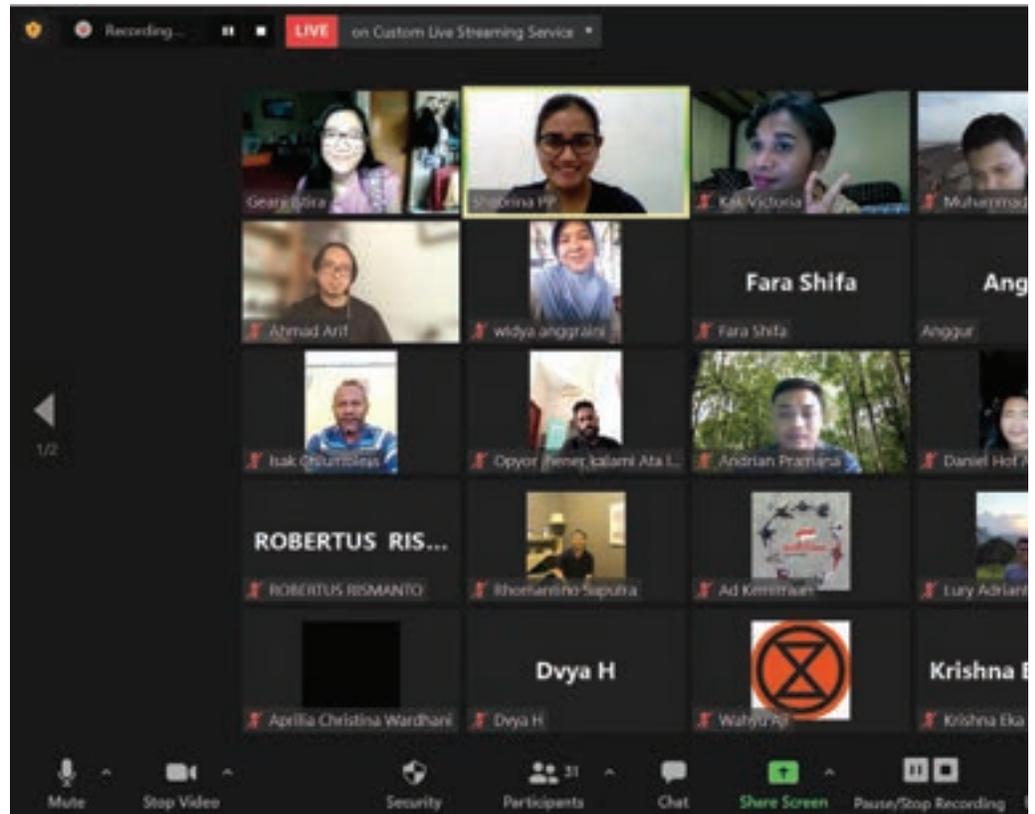
**Yayasan Konservasi Indonesia
Kelas Konservasi Bagi Perempuan Raja Ampat**

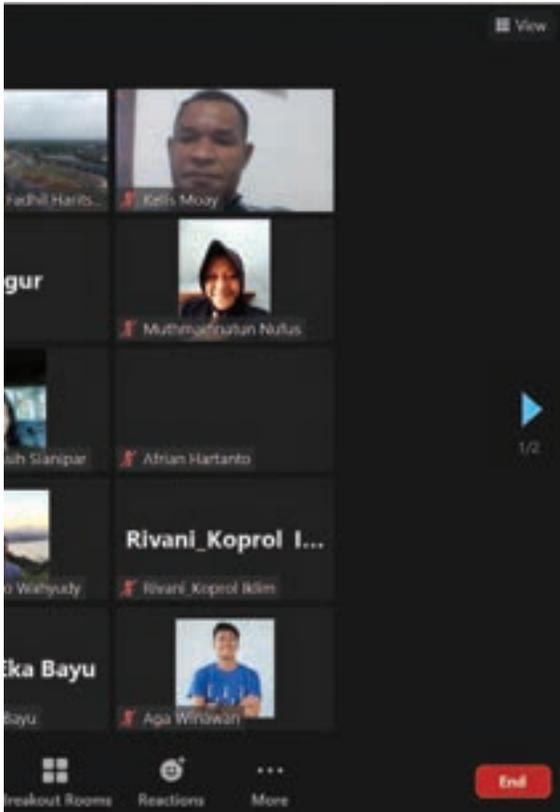
Konservasi Indonesia bersama dengan MOLOBIN RAJA AMPAT (MORA) Perkumpulan Penyelam Perempuan Raja Ampat melaksanakan kegiatan kelas konservasi bagi perempuan Raja Ampat dengan melibatkan 31 orang perempuan yang berasal dari tujuh Kampung yaitu Kampung Saporkren, Yenbeser, Friwen, Sawandarek, Yenbekwan, Kurkapa dan Arborek. Kegiatan yang dipusatkan di Kampung Yenbabo, Friwen Kabupaten Raja Ampat ini bertujuan untuk mengedukasi perempuan Raja Ampat tentang Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Raja Ampat serta pentingnya kawasan konservasi tersebut bagi keberlanjutan sumberdaya alam laut di Raja Ampat. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah melatih para perempuan untuk menjadi pendidik PLH.

Pelatihan Pengolahan Produk dari Buah Mangrove di KKP Kepulauan PAM

Kegiatan ini digelar pada tanggal 31 Maret hingga 2 April 2022 di Mioskor, KKP Kepulauan Pam. Kegiatan yang diikuti oleh 38 orang perempuan dan 1 orang laki-laki ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pengelolaan hutan mangrove dan memperkenalkan manfaat buah mangrove yang dapat diolah menjadi bahan makanan serta produk lain untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Perempuan menjadi target dari kegiatan ini karena dengan tekanan kebutuhan rumah tangga, perempuan cenderung menjadi

Samdhana melakukan serial kegiatan MENOKEN (Perlindungan Bahasa Ibu Suku Moi) bagi pemuda untuk memperkuat wadah menghubungkan komunitas, produk, pengetahuan dan solidaritas. DOK. SAMDHANA





Kelas Konservasi Bagi Perempuan Raja Ampat. DOK. YAYASAN KONSERVASI INDONESIA

kelompok yang kreatif dan produktif dalam menciptakan alternatif pendapatan untuk keluarga.

■ Kegiatan 4th Pre Summit Y20

Yayasan EcoNusa

Aksi Sambung Sampah

Kegiatan aksi sambung sampah dilaksanakan di Namatota, Kabupaten Kaimana pada Desember 2021. Kegiatan ini melibatkan 40 anak-anak dan pemuda. Sampah-sampah tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan termasuk tas, dompet dan bunga.

Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik

Pelatihan pembuatan pupuk organik untuk produksi sayur-sayuran dan tanaman pala telah dilaksanakan di Kampung Manggera dan Kufuruai, Kabupaten Kaimana pada Tanggal 10-16 Maret 2022. Pembuatan Bahan pupuk organik terutama kotoran sapi diambil dari sekitar, sedangkan aktivatornya mendapat bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana.

Diskusi Konstruktif Kawan Bakau Kaimana

Pada Tanggal 29 April 2022 kegiatan diskusi intensif dengan komunitas Kawan Bakau dalam rangka penguatan komunitas. Diskusi

ditekankan pada penyusunan strategis penyelamatan mangrove di Kota Kaimana. Hal ini penting untuk masa depan mangrove karena berfungsi sebagai pemijahan ikan dan udang sekaligus potensi biodiversitas Kabupaten Kaimana.

Diskusi Peningkatan Kualitas Produk Pertanian

Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman pala dan pisang sehingga hasil lebih baik dan juga sekaligus memudahkan dalam pemasaran. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2022 di Kaimana. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 petani milenial. Hasil diskusi juga memperkuat kerjasama para kelompok tani dengan dinas terkait.

Penanaman Kelapa Hibrida dan Sosialisasi Hutan Terlarang

Pada Tanggal 27 Maret 2022, di Tanggaromi Teluk Arguni-Kaimana, 60 peserta Pemuda Gereja Protestan Papua mengadakan penanaman kelapa hibrida sebanyak 200 pohon. Pemilihan Kelapa hibrida karena cepat tumbuh, buahnya juga berbeda dengan kelapa dalam. Paralel dengan kegiatan tersebut, pemuda juga melakukan sosialisasi Hutan Terlarang. Hutan terlarang yang ditunjuk di Teluk Arguni menjadi rumah bagi

satwa liar dan juga pendukung ketersediaan air untuk pertanian dan keperluan rumah tangga.

Sosialisasi Ilmuwan Muda Papua

Ilmuwan Muda Papua merupakan kerjasama Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Yayasan EcoNusa yang memberikan fasilitas pengayaan materi dan dana penelitian. Pada tahun 2022, yang merupakan tahun ketiga dengan melibatkan 25 mahasiswa untuk melakukan kegiatan riset di *Crown Jewel of Papua* atau Kawasan Bentang alam Mahkota Permata Tanah Papua.

Pelatihan Pemandu Wisata

Pelatihan pemandu wisata dilakukan di Raja Ampat selama lima hari atas kerjasama Yayasan EcoNusa bersama Dinas Pariwisata Raja Ampat dan Himpunan Pramuwisata Indonesia.

Flora and Fauna International (FFI) Ridge to Reef Conservation Education Program: Peningkatan Kapasitas Pemuda melalui Pendekatan Pendidikan berbasis Konservasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Waisai, Raja Ampat pada tanggal 11-12 Maret 2022 yang pesertanya adalah 11 pemuda yang berasal dari kelompok masyarakat tani hutan,

mahasiswa dan yayasan lokal di sekitar kawasan penyangga konservasi Cagar Alam Waigeo Barat. Konsep *citizen science* ini dilakukan untuk memberikan peran aktif pemuda lokal untuk bersama-sama menjaga alam Raja Ampat. Pada kesempatan ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkan penggunaan GPS dan kamera.

Bentara Papua

Pemeran produk-produk lokal masyarakat adat

Kegiatan ini memamerkan produk-produk berkelanjutan dari masyarakat adat. Produk-produk ini diperoleh dari kegiatan anak muda dan perempuan di Provinsi Papua Barat. Komoditi non deforestasi ini diperoleh bekerjasama dengan masyarakat yang dimulai sejak tahun 2021. Tujuan kegiatan pameran untuk memperkenalkan produk-produk hasil dari masyarakat kepada publik yang dikelola langsung oleh generasi muda dan perempuan. Jumlah pemuda yang terlibat sejak tahun 2021 ini adalah 75 orang. Pameran ini akan dilaksanakan pada Mei 2022 di Manokwari.

Sekolah Kampung Merdeka (SEKAM)

Kegiatan peningkatan kapasitas pemuda/i ini untuk membangun kesadaran kritis dalam upaya pengelolaan sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan secara adil, berkelanjutan dan beradat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari dengan kurikulum yang disesuaikan. Peserta pelatihan berjumlah 20 orang. Pelatihan ini bekerjasama dengan pemerintah Kampung Uduhotma di Pegunungan Arfak pada tanggal 7-17 Juni 2022.

Penanaman Kopi

Bentara bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Arfak menyediakan bibit tanaman kopi sebanyak 10.000. Kegiatan penanaman serentak dengan melibatkan duta petani milenial terutama di Kampung Minyambouw, Kuauw, Uduhotma dan kampung-kampung sekitar Danau Anggi.

World Resources Institute (WRI) Indonesia

GIS Club Tanah Papua Towards Youth 20

Pelatihan Penggunaan *Teknologi Geographic Information System (GIS)* dan *Remote Sensing* untuk Pembangunan Berkelanjutan

Berbasis Wilayah Adat di Tanah Papua. Kegiatan ini mendukung pengembangan kapasitas bagi kelompok muda di Tanah Papua terkait penggunaan teknologi GIS dan *Remote Sensing*. Program ini dilaksanakan pada Tanggal 15 Juni 2022 secara *hybrid (online dan offline)* di Manokwari, Papua Barat.

Global Green Growth Institute (GGGI)

Diskusi Kegiatan Penelitian Mahasiswa

Diskusi kegiatan mahasiswa dibuat sebagai proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mendukung mata kuliah bagi Dosen Madya dan Dosen Pemula tentang Pertumbuhan Hijau dan Lanskap Berkelanjutan. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program kurang lebih sebanyak 100 mahasiswa, dan dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Manokwari.

Peningkatan Kapasitas/Pelatihan “Membangun Bisnis HBBK yang Menguntungkan”

Pelatihan ini dilakukan selama empat hari bekerja sama dengan KLHK, *Kaya.id*, *Business Council for Sustainable Development* dan Pemda Provinsi Papua Barat. Kegiatan pelatihan ini mengundang 50 pemuda dari Sorong dan Fakfak yang dilaksanakan di Sorong pada Bulan Mei 2022.

Kemitraan

Forum Anak Muda “Serial Diskusi Anak Muda Peduli Pembangunan Berkelanjutan Di Tanah Papua”

#BERISIK Papua : Bincang Iklim Asik Papua merupakan serial diskusi *online* menggali persepsi anak muda terkait Papua dan Pembangunan rendah karbon. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2022 dan 2 April 2022. Diskusi pertama diikuti 30 peserta anak muda dari berbagai daerah, khususnya anak muda Papua dan Papua Barat. Pada diskusi kedua KEMITRAAN juga berkolaborasi dengan komunitas anak muda, yaitu Koprol Iklim, Hutan Itu Indonesia, dan Madani Berkelanjutan. Diskusi kedua ini diikuti oleh 56 anak muda peserta dari berbagai daerah, khususnya di Papua Barat dan Papua.

Center for International Forestry Research (CIFOR)

Talkshow Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Barat

Menindaklanjuti hasil study FOLU di tahun 2018 dan 2019, CIFOR bekerjasama dengan Balitbangda menyusun paper tentang keta-



Youth Digicamp oleh CPFS yang merupakan rangkaian seminar dan lokakarya tentang inovasi digital dalam pencegahan korupsi. DOK. GIZ

hanan pangan. Hasil dari kegiatan ini menjadi landasan dalam kegiatan Talkshow tentang ketahanan pangan. Kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 25 Mei 2022 secara *online* yang dipandu oleh anak muda dari Papua Barat dan diperkirakan diikuti oleh 150 anak muda.

Yayasan Mahkota Permata Tanah Papua

Talkshow tentang Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua

Kegiatan talkshow tentang Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2022 di Fakultas Kehutanan Unipa, Manokwari dengan melibatkan 100 orang mahasiswa.

GIZ

Diseminasi Startup Toolkit Anti Korupsi

Diseminasi ini akan menjadi bagian dari Lokakarya Kampung Anti Korupsi. *Toolkit* ini memberikan panduan untuk memulai bisnis yang berintegritas. Generasi muda yang berkeinginan untuk membuka usaha membutuhkan informasi yang memadai guna memastikan usaha mereka bersih dan berintegritas. *Alliance for Integrity* mengundang pemuda/i di Manokwari yang ber-



keinginan untuk memulai usaha pada sesi *hybrid* diseminasi dan *launching start-up toolkit*. Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 secara *hybrid*.

Youth Digicamp oleh CPFS

Youth Digicamp adalah serangkaian seminar dan lokakarya tentang inovasi digital dalam pencegahan korupsi. Kegiatan akan melibatkan 40 pemuda di Manokwari dan direncanakan dilaksanakan pada Agustus 2022.

Pelatihan Desa Antikorupsi untuk Pemimpin Muda Kampung di Raja Ampat oleh CPFS

Kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid* pada 29 Maret – 1 April 2022 di Waisai Raja Ampat dengan total peserta berjumlah 75 orang. Hasil dari kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang apa dan bagaimana mengembangkan desa antikorupsi; meningkatnya pemahaman peserta terkait aturan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dana desa, dan alokasi dana desa; meningkatnya pemahaman peserta terkait pengadaan barang dan jasa desa; meningkatnya pengetahuan tentang pelaporan APBes; serta lahirnya komitmen untuk menindaklanjuti kegiatan.

GIZ FORCLIME

Talkshow: FORCLIME's Internship Program-

me: Supporting Papua's Green Future

FORCLIME berkolaborasi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Papua melaksanakan *talkshow* sesi berbagi pembelajaran kepada anak muda di Provinsi Papua Barat tentang "*Supporting Papua's Green Future*". Kegiatan ini merupakan program magang yang diusung GIZ FORCLIME yang telah dilaksanakan dalam tiga angkatan, dimulai dari tahun 2019 - 2022. Pada sesi *talkshow* ini, FORCLIME dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua memberikan informasi terkait manfaat dari program magang yang ditawarkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2022 bertempat di Arboretum Fakultas Kehutanan Universitas Papua yang dihadiri lebih dari 150 peserta.

Samdhana

MENOKEN: Perlindungan Bahasa Ibu Suku Moi

Serial kegiatan ini merupakan upaya perlindungan bahasa Suku Moi dan perlin_dungan aset masyarakat adat dikelola oleh Kelompok Pemuda Sanggar Seni (SALSSES), di Kampung Klabili, Distrik Selemkai, Kabupaten Tambrauw. Kegiatan pertama dimulai pada tanggal 17 - 21 Februari 2022 dengan tema *Temu Miye Libih* (Pemuda Adat) Suku Moi dalam memperingati hari bahasa ibu internasional. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 70 peserta yang didominasi kelompok anak muda dan remaja pada usia 15 - 35 Tahun. Selanjutnya seri kedua kegiatan Menoken: Perlindungan Bahasa Ibu Suku Moi dilaksanakan pada tanggal 23 - 24 Mei 2022. Kegiatan seri kedua ini diikuti sekitar 30 pemuda dan pemudi suku Moi yang disupervisi langsung oleh 4 orang tua adat 'wofle' yang telah lulus dari pendidikan rumah adat 'kambik'.

MENOKEN: 'Boomna' bersama Rae Manes (Orang Tua Adat), Rae Kinyah (Pemuda) dan Rae 'Wuon' (Manusia Sejati Lulusan Pendidikan Adat)

Kegiatan Menoken *Boomana* dilaksanakan pada tanggal 2 - 8 April 2022. Kegiatan ini dikelola bersama oleh SKPKC OSA Sorong, Ikatan Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mare se-Sorong Raya (IPPM-SR), *Avaa Community* dan DPMA Shiwa dengan mengajak berbagai komunitas di Wilayah Budaya Domberai, Papua Barat. Sekitar 60 peserta yang terlibat dari setiap kampung untuk saling berbagi, saling belajar, dan membangun keterhubungan antar komu-

nitias, dengan leluhur, para panjaga dan perawat alam semesta.

MENOKEN: Perlindungan budaya dan Aset Masyarakat Adat Pesisir di Raja Ampat

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Mei - 3 Juni 2022. Kegiatan di pusatkan di Kampung Yenbekaki dan Kampung Friwen, Kabupaten Raja Ampat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun rasa cinta terhadap budaya, belajar dari semangat masyarakat melindungi mangrove, penataan alam untuk tujuan pariwisata dan mendorong pendaftaran HKI aset adat dan budaya di Raja Ampat. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 40 orang secara khusus anak muda dari Raja Ampat, Sorong, Tambrauw dan Maybrat.

Yayasan Konservasi Indonesia

Conservation Goes To Campus; Gerakan Milenial Kitong Generasi Konservasi

Conservation Goes to Campus dirancang dengan landasan pikir generasi yang memiliki perspektif konservasi dalam mengelola sumberdaya alam. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022 bertempat di Kampus STIA As-Syafi'iyah Fakfak dan dihadiri oleh 150 orang mahasiswa.

ToT Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) Ridge to Reef Untuk Komunitas Pendidikan Fakfak Mengajar

Fakfak Mengajar merupakan sebuah komunitas berisi anak-anak muda Fakfak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Pada tanggal 8-10 April 2022, Konservasi Indonesia memberikan pelatihan modul pendidikan lingkungan hidup *ridge to reef* kepada 15 orang fasilitator dari Fakfak Mengajar.

ToT Pendidikan Lingkungan (PLH) untuk Komunitas dan Pemuda Pemudi di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana

PLH di Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana telah menjadi salah satu strategi utama Konservasi Indonesia untuk memberikan pengetahuan dasar lingkungan kepada masyarakat dan telah terbukti efektif meningkatkan pengetahuan lingkungan. Pelatihan di Kabupaten Kaimana, melibatkan komunitas dan kelompok muda mudi yang berada dalam Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Kaimana dalam bentuk TOT PLH yang digelar pada 28-31 Maret 2022.

● Penulis : Reynold K. (KPHP Sorong Selatan)

Papua Barat Dipercayakan Menyelenggarakan Side Event G20

Sekilas Tentang G20

G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen penduduk bumi, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen pendapatan bruto dunia. G20 terdiri dari Uni Eropa, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok dan Turki. G20 fokus pada perekonomian dunia dan isu-isu penting lainnya, seperti perubahan iklim, energi global, dampak demografis hingga masalah populasi. Didirikan pada tahun 1999, sebagai tanggapan atas beberapa krisis ekonomi dunia.

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan G20 Summit pada 14-15 November 2022 di Bali. Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Presidensi G20 tahun 2022 mengusung sebuah tema: *Recover Together, Recover Stronger*. Bali akan menjadi kota pelaksanaan G20 di Indonesia. Melalui G20, diharapkan Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia mewujudkan kebijakan yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif.

Sekilas Tentang W20 dan Y20

W20, yang dibentuk pada tahun 2015, didasari oleh kesadaran para pemimpin negara anggota G20 akan pentingnya partisipasi perempuan, terutama dalam pembangunan ekonomi global. Sebagai *outreach group* yang mewakili suara perempuan, W20 mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G20 yang melibatkan isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif, serta kerja sama perempuan dalam sektor ekonomi internasional. W20 membahas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam perkembangan ekonomi dunia. W20 memiliki komitmen untuk membawa isu-isu terkait ke dalam salah satu fokus para pemimpin G20. Pada presidensi G20 Indonesia Tahun 2022,



Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si bersama Kepala Suku Besar Arfak Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat menghadiri Acara Pembukaan *Side Event* W20.

DOK. BALITBANGDA PB

Side event W20 akan fokus membahas isu-isu *Freedom from Gender Discrimination, Women Entrepreneurs as Key to Economic Inclusion, Gender Equitable Health Responses, dan Women Disability and Rural Areas Inclusion*.



Youth 20 (Y20) merupakan wadah konsultasi dan dialog resmi bagi para pemuda dari seluruh negara anggota G20 dan mendorong para pemuda sebagai pemimpin masa depan untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan global, untuk bertukar ide, berargumentasi, bernegosiasi, hingga mencapai konsensus. *Indonesian Youth*

Diplomacy dengan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ditunjuk untuk menjadi penyelenggara resmi Y20 Indonesia pada 2022. Tema utama yang diusung adalah “Dari Pemulihan ke Resiliensi: Membangun Kembali Agenda Pemuda Setelah Covid-19”.

Pre dan Side W20 dan Y20

Pre Event W20 dan Y20 dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 di Jakarta dan diprakarsai oleh Badan Penghubung Papua Barat, Balitbangda Papua Barat dan Yayasan Econusa. Kegiatan ini sebagai bentuk menggaungkan persiapan agenda *Side Event* W20 dan Pra KTT Y20 di Manokwari, Pa-

pua Barat. Dalam Acara *Launching* ini juga diselenggarakan Dialog Inspiratif yang membahas tema “Peran Perempuan dan Generasi Muda Tanah Papua untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Sementara, pelaksanaan *Side Event W20* dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Juni 2022, dan *Pre Summit 4th Y20* dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2022 di Hotel Aston Niu.

Kegiatan *Side Event W20* dan *Pre Summit Y20* berupa pertemuan yang dilaksanakan secara *hybrid*, gabungan *offline* dan *online*. Sebagian besar peserta dan narasumber hadir dan mengikuti kegiatan secara langsung di Hotel Aston Niu Manokwari dan lainnya melalui aplikasi *zoom*. Selain kegiatan pertemuan, ada kunjungan ke Polda Papua Barat, Kantor Gubernur dan Pulau Mansinam, serta menghadiri *talkshow* dan pameran kerajinan di Swiss-Belhotel dan Manokwari City Mall.

Agenda *Side Event W20* dan *Y20*

Agenda utama *W20* dimulai dengan pembukaan, seminar (*satellite* dan *main events*), parallel *panel sessions* dengan topik *Rural Women and Women With Disabilities*. Agenda hari kedua diisi dengan *city tour* dan *talkshow* bertema “*Digitalization for Women Empowerment*” yang didukung oleh Bank Indonesia dilanjutkan kunjungan ke pameran produk UMKM dan disabilitas di Manokwari City Mall.

Agenda utama *Y20* dimulai malam keakraban, *city tour*, penanam terumbu karang dan pohon, *talk show* dan *town hall meeting*. Peserta *Town Hall Meeting* dipilih dari kaum muda, terutama dari wilayah Timur Indonesia (Papua, NTB, NTT, Maluku dan Sulawesi). Tema yang dibahas termasuk Keberagaman dan Inklusi. Hasil diskusi kemudian disampaikan dalam Komunique Manokwari.

Peserta *W20* dan *Y20*

Kegiatan *W20* diikuti peserta sekitar 150 orang secara luring (*offline*) dan 500-1000 orang secara daring (*online*). Pembukaan dihadiri 135 orang peserta secara *offline*, yang terdiri dari 71 orang peserta delegasi dan tamu undangan dari luar Provinsi Papua Barat dan 64 orang peserta yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Tamu undangan yang hadir pada acara pembukaan berjumlah 120 orang dari *W20 delegates*, UN Bodies (UN Women, UNFPA, ILO), Indonesian CSOs (Women NGOs, KOWANI), Organisasi Perempuan di Papua Barat dan sekitarnya, Universities (Gender Study Centre, University Research Centre), International CSOs (ICW-APRC, ECOSOC – ACWO, Knowledge Partners (McKinsey).

Kegiatan *Y20* dibuka dengan acara *High Level Panel* dan *Talk Show* yang diikuti oleh 121 orang peserta yang hadir secara *offline*, yang terdiri dari 54 orang peserta lokal dan 65 orang peserta dari luar Papua Barat.



Opening ceremony *Side Event W20* di Manokwari. DOK.BALITBANGDA PB

Peserta yang hadir secara *online* berjumlah lebih dari 1.200 orang. Tamu undangan yang hadir secara *offline* pada acara pembukaan berjumlah 110 orang.

Rekomendasi W20 dan Y20

Hasil utama kegiatan W20 dan Y20 adalah Pesan Manokwari dan Manokwari Communiqué, yang diharapkan dapat disampaikan oleh pemerintah Papua Barat, baik pada pertemuan lanjut W20/Y20 maupun untuk disampaikan pada pertemuan Puncak G20 di Bali nanti.

Pesan Manokwari (W20):

1. Mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik dan perang serta menyerukan penghentian tindak kekerasan terhadap kaum perempuan, anak dan penyandang disabilitas di berbagai belahan dunia.

2. Mendorong diberikannya perhatian yang lebih dan adanya kebijakan yang pro kepada peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar (seperti kesehatan dan pendidikan), pelayanan publik dan sumber-sumber pendapatan dan ekonomi dalam rangka kemandirian dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

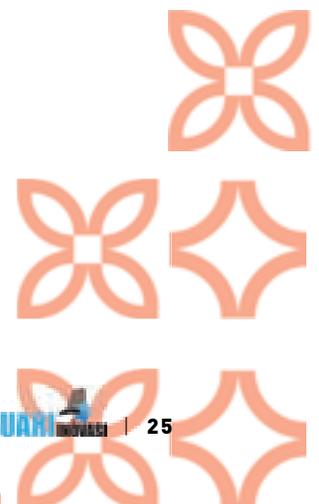
4. Mempercepat pembentukan kebijakan yang lebih permanen melalui legislasi atau produk regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas bagi negara atau daerah yang belum memiliki produk hukum tersebut.

5. Kami mendukung penuh langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara dan daerah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan sumberdaya manusia dan penyelamatan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6. Secara khusus terkait event ini, kami mendukung kebijakan negara membangun dari pinggiran sesuai Visi Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, kebijakan tersebut mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat Pembangunan Berkelanjutan.



Pelepasan Tukik di Pulau Mansinam yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, W20 Chair Presidensi Indonesia H. Uli Tiur Ida Silalahi, Ketua Umum KOWANI Dr. Ir. Giwo Rubianti, M.Pd, dan rombongan delegasi lainnya.
DOK. BALITBANGDA PB





Delegasi Y20 dari berbagai negara saat berkunjung ke SMA Taruna Kasuari Nusantara dalam agenda acara *Pre-Summit Y20* di Manokwari, Papua Barat.

DOK.BALITBANGDA PB

Kommunike Manokwari (Y20)

1. Pendidikan Yang Inklusif

- Mendorong terjaminnya pemerataan secara menyeluruh dan adil dalam sistem pendidikan untuk semua sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa batasan dan kualifikasi tertentu, termasuk disabilitas, jenis kelamin, usia, suku, agama dan identitas.
- Mendorong tersedia dan terbukanya akses informasi dan komunikasi sebagai komponen dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang berkelanjutan dari semua pihak yang terkait dengan lembaga pendidikan dan pelaksanaannya untuk mengatasi berbagai hambatan.
- Mendorong terkejar dan terciptanya kurikulum kontekstual dengan metode pembelajaran adaptif dengan mengintegrasikan digitalisasi dengan

nilai-nilai lokal termasuk transformasi budaya.

- Mendorong pemerintah negara masing-masing untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pendidik, melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan serta bersinergi dengan para pemangku kepentingan secara formal dan informal yang berkualitas.
- Mendorong terpenuhinya prasarana dan sarana yang memadai bagi para penyandang disabilitas terutama di daerah terluar, terisolir dan tertinggal untuk pengembangan diri dan potensi sebagai manusia seutuhnya.

2. Ekonomi Kreatif

- Mendorong terciptanya harmonisasi dan kolaborasi antara pemerintah masing-masing negara (nasional dan lokal),

pihak swasta dan masyarakat lokal (masyarakat adat) untuk mendukung pengembangan bisnis generasi muda, terutama usaha kecil dan menengah.

- Mendorong pemberdayaan masyarakat lokal terutama generasi muda agar secara mandiri mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan literasi digital pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan.
- Mendorong kerjasama yang erat dengan industri pariwisata kreatif untuk memperkenalkan budaya lokal dan keindahan alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda di daerah terluar, terisolir dan tertinggal.
- Secara khusus terkait event ini, mendorong peningkatan kualitas, nilai tambah dan pemasaran dari produk masyarakat lokal khusus pemuda melalui berbagai *platform* pemasaran.
- Mendorong peningkatan kapasitas bagi masyarakat adat Papua khususnya pemuda untuk meningkatkan kepercayaan diri, kepemimpinan dan kreativitas serta inovasinya agar mampu bersaing secara internasional.

3. Budaya, Keberagaman dan Toleransi

- Mendorong tercipta dan diterapkannya nilai-nilai luhur, khususnya gotong-royong secara lintas budaya dan toleransi dalam rangka mengimplementasi kesetaraan dan rasa saling menghormati.
- Mendorong terciptanya kondisi yang memicu lebih banyak keterlibatan pemuda dalam pelestarian budaya



Penandatanganan Komunique Manokwari Y20 oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Kesra dan Otsus mewakili Gubernur Papua Barat Roberth R.A. Rumbekwan, SH, MH disaksikan oleh co-chair Y20 Michael V. Sianipar. DOK.BALITBANGDA PB

yang mempengaruhi masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai keberagaman yang luhur.

4. Kepemimpinan Pemuda dan Keterlibatan Masyarakat

- Mendorong kaum muda untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik dan literasi politik mereka.
- Mendorong adanya kepastian dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dalam kelompok rentan, melalui peningkatan kapasitas di lembaga formal dan informal.
- Mendorong dan menyerukan pemerintah di masing-masing negara agar dapat

menyediakan *platform* bagi pemuda untuk berkontribusi, berpartisipasi, memantau, dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan.

- Memperkuat peran pemuda dalam posisi strategis eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kuota 30% inklusif.
- Mendorong percepatan praktek kesetaraan yang inklusi di lembaga pemerintah dan swasta dengan menghapus peraturan eksklusif.

5. Teknologi & Akses Digital

- Mendorong diperkuat sinergi pendidikan dan pelatihan media sosial dan etika digital dalam kurikulum yang inklusif dan kontekstual di setiap jenjang pendidikan.

- Mendorong dan membangun program pengajaran sukarela *peer-to-peer* untuk meningkatkan keterampilan literasi digital dasar yang dapat diakses dan terjangkau, terutama bagi kaum muda yang rentan dan kurang terwakili di mana pun.
- Memperkuat kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi yang tepat, akurat dan dapat ditindaklanjuti tentang tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui media sosial, media hiburan, dan melalui para pemimpin muda yang berpengaruh di masyarakat.

● Penulis : Reynold K.
(KPHP Sorong Selatan)

Lima Tahun

Papua Barat Dalam Pandangan Mereka

Kata orang bijak, ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Maksudnya, semua yang terjadi atau apa yang kita alami di dunia, pasti ada awal dan akhirnya. Tidak ada yang kekal, kecuali kekekalan itu sendiri.

Pada pertengahan Mei, tepatnya tanggal 12 Mei 2022, berakhirnya masa jabatan pertama pemerintahan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, yang telah memimpin salah satu provinsi termuda di ujung timur Indonesia, menjadi salah satu provinsi yang ternama di antara provinsi-provinsi muda lainnya di bagian Timur Indonesia. Sebagai manusia biasa dalam memimpin suatu pemerintahan dengan luas wilayah lebih dari 100 kilometer persegi dan tingkat terisolasi yang cukup serta kemampuan organisasi pemerintahan yang terbatas, ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Apalagi melihat umur provinsi dimana kebutuhan pembangunan fisik sudah harus dibarengi dengan pengelolaan yang lebih baik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

asli Papua dan Indonesia umumnya yang tinggal di provinsi ini. Banyak capaian yang telah dicapai, tetapi masih banyak lagi yang harus dibuat dan pertahankan. Pasti ada banyak pendapat yang pro dan kontra dalam pemerintahan Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Mohamad Lakotani.

Majalah Kasuari Inovasi (MKI) Edisi ini menyampaikan hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat di Papua Barat atas kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Mohamad Lakotani 2017-2022, yang berhasil diwawancarai Tim Redaksi dari MKI. Atas nama Redaksi MKI, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan opini yang tulus, baik berupa aspek positif atas kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani, serta kesediaannya memberikan masukan dan saran bagi pemimpin yang akan datang. Dengan pertimbangan ketersediaan ruang serta prinsip-prinsip penulisan, beberapa bagian hasil wawancara kami ringkas dengan usaha tetap mempertahankan kesan dan pesan para narasumber.



REKTOR UNIPA

Dr. Mcky Sagrim, SP, M.Si

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani?

Kedepan siapapun dia yang akan menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 dan seterusnya, paling tidak harus mengetahui beberapa hal pokok.

Pertama, adalah berkaitan dengan pengembangan SDM, IPM kita Papua dan Papua Barat. Kita itu masih ranking kelas wahid, ranking 1 dan 2 dari bawah, yang terjelek di republik ini. Ini menjadi beban bagi kita. Jadi kalau saya, siapa pun yang jadi gubernur tolong perhatikan hal ini. Pendidikan itu jangan kitong jadikan asal-asalan saja, tapi

harus betul-betul harus diperhatikan. Kalau Pak Dominggus punya pandangan, misalnya soal SMA Kasuari Nusantara tentang “rotan tetap rotan” saya pikir jangan hanya sekedar kata-kata saja, jangan sampai pernyataan ini tanpa kita sadari ini merupakan seleksi struktural, karena rotan tetap rotan, jangan-jangan orang Papua tidak bisa masuk di situ, ini bisa jadi masalah.

Kemudian yang berikut siapapun yang memimpin provinsi ini harus memperhatikan bahwa dari semua lembaga pendidikan tinggi di Papua Barat ini, Universitas Papua ini memikul beban tidak kecil. Jadi beban tanggung jawab ini jangan serta merta di-

berikan kepada Menteri Pendidikan dan saya sebagai Rektor UNIPA yang melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari Menteri Pendidikan, kemudian dengan segala keterbatasan yang ada, kita dituntut untuk berkorporasi memberikan pelayanan yang terbaik untuk perkembangan SDM di sini, sementara kita belum mendapat dukungan maksimal oleh pemerintah daerah. Ini hal yang bagi saya tidak adil, sementara duit ada banyak itu, sebagian besar itu hanya habis saja, dan tiap hari bikin laporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di kas daerah sampai bunyi triliunan. Memangnya, universitas ini mau dikembangkan tunggu siapa lagi. Kita punya banyak anak-anak Papua yang kuliah di Jawa sana banyak yang gagal, apalagi situasi anak Papua saat ini dilihat dari kacamata yang berbeda, karena masalah konflik, masalah yang terjadi di Papua, masalah rasisme dan sebagainya. Jadi mereka kelihatan sulit beradaptasi di sana, makanya banyak yang kembali dan kita harus terima mereka juga di sini.

“Kita terima terus? Kenapa ini dibiarkan jadi beban kami sendiri. Khusus Fakultas Kedokteran, kami berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dukungan itu diberikan kepada kami tapi di rektor sebelumnya, selama saya menjabat ini hanya satu tahun anggaran ini, kasih tapi tahun sebelumnya, tahun 2020 dananya tidak dialokasikan malah dikembalikan ke kas daerah, mau bikin surat kami tidak bisa kasih lagi dengan alasan begini, “ya kalau begitu ya sudah tidak apa!” kalau memang begitu berarti sama dengan kita punya komitmen membangun SDM di Papua Barat, khususnya untuk SDM kedokteran.

Jangan salahkan saya ya, saya lempar untuk yang mahasiswa baru yang masuk di kedokteran, dari Sabang sampai Merauke, saya tanya orang Papua siapa yang bisa masuk di situ, kalau seandainya saya sesuaikan dengan standar penerimaan di UGM, UI, “terus kamu-kamu yang minta maaf saja yang tidak punya kemampuan bisa masuk di Fakultas Kedokteran atau tidak. Banyak pejabat-pejabat juga kesana gagal kembali saya terima mereka, ya kita saling mendukung lah, kalau tidak ya sudah. Sampai sudah di titik jenuh, karena saya rasa saya tidak dibantu, ya sudah. Ini koas kan tidak jalan ini...sudah jalan tapi ada mahasiswa sekitar 25-26an orang dari 80an

orang batal ditengah jalan tidak ikut koas. Beban itu jangan dikasih untuk kami sendiri, sehingga perguruan tinggi ini pusing sendiri. Nah itu yang kaitan dengan Pendidikan.

Kedua, terkait dengan kesejahteraan, ya angka kemiskinan di 2 provinsi ini juga yang pecahkan record paling buruk toh, nah itu harus diperhatikan. Terus usia harapan hidup di Papua Barat ini masih rendah, bahkan ada di 2 atau 3 kabupaten. Seperti Kabupaten Teluk Wondama saja, rata-rata usia harapan hidupnya hanya 60 tahun, masa orang 60 tahun sudah meninggal, bagaimana itu rata-rata usia harapan hidup mereka? Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau juga. Bagaimana mengatasi hal itu, yang pertama itu harus perhatikan kesehatan menjadi

gram afirmasi Pendidikan untuk ADIK yang bersumber dana otsus, saya kira perlu dievaluasi lagi, karena proses seleksi belum optimal. Banyak dikirim sekolah, tetapi banyak juga gagal. Saya sudah pernah berusaha pada Desember, 2020 bersama direktur pembiayaan pendidikan nasional (Prof. Yudi) untuk membahas persoalan dengan Pemda Papua Barat, tetapi belum mendapat respon yang sesuai. Pendidikan itu tidak hanya bicara saja tetapi harus dilaksanakan, karena saya lihat di provinsi ini hanya banyak filosofi saja yang ditonjolkan.

Ide mendirikan sekolah unggulan itu, saya sebagai Rektor Unipa, diserang dari segala penjuru karena fakultas kedokteran,



Penyerahan bantuan oleh Rektor Dr. Meko Sagrim, SP, M.Si kepada perwakilan mahasiswa UNIPA. DOK.UNIPA

hal yang utama. Dana otsus inikan untuk pengembangan infrastruktur kemudian bidang Kesehatan dan Pendidikan. Saya sendiri tidak tahu persentase dana yang dialokasikan untuk Pendidikan sampai hari ini berapa persen, amanat undang-undang seharusnya kan 20%, tapi saya belum lihat seperti ini.

Hal yang berikut lagi adalah untuk pendidikan, dikirim orang untuk sekolah pro-

maka dirikan SMA unggulan sekarang, saya sampaikan harus dianggarkan sekarang ini, jangan bicara habis nanti barang ini (sekolah) tidak selesai-selesai. Saya tidak minta uang banyak, cukup 2 milyar saja untuk anggarkan sekolah itu, supaya ada kompleks sekolah, semua harus bicara pakai Bahasa Inggris, tidak ada yang pakai Bahasa Indonesia.

Saya punya pendapat, sekolah ini untuk kepentingan orang Papua, jadi 3 tahun

pertama harus ambil dari Kabupaten Pegunungan Arfak sebanyak 10 orang siswa demikian juga siswa dari kabupaten lainnya, tapi semuanya harus orang Papua. Semua fasilitas disiapkan sekolah, orang tua wajib berbicara Bahasa Inggris, karena Bahasa Inggris ini menjadi masalah nomor satu/ momok untuk pengembangan SDM Orang Papua.

Saya lihat punya keadaan di provinsi ini dikacaukan dengan adanya Covid-19, karena semua terfokus kepada Covid-19, sekarang sudah meredah. Saya terbayangkan kalau kemarin tidak ada Covid-19, apa yang kita kerjakan untuk membangun kesehatan, mungkin sangat jauh. Tapi Bapak Gubernur dan wakil gubernur tidak salah, tapi di bawahannya yang harus memberikan teladan. Karena kita harus pahami Pak Gubernur

sudah biasa dengan dunia kepamongan, tapi kalau yang lain kita harus mendukung beliau. Pak Wakil gubernur orangnya lincah. Dan mereka berdua selalu solid, tidak ada kabar konflik antara mereka.

Pesan saya "Siapa saja yang maju di Papua Barat, silahkan saja, tapi tolong perhatikan beberapa hal yang saya sudah sampaikan itu. Intinya kita saling mendukung." ●



KETUA FRAKSI OTSUS PROVINSI PAPUA BARAT George Dedaida, S.Hut, M.Si

dan beberapa hal yang kalau bisa kita revisi dan kalau kekurangan-kekurangan kita tingkatkan, dan kelebihan kita wujudkan. Selain itu, ada juga afirmasi di bidang lainnya

yang dilakukan beliau, karena banyak juga dengan afirmasi-afirmasi yang mereka lakukan. ●

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani?

Pandangan saya terhadap kepemimpinan Bapak Dominggus dan Mohamad Lakotani itu cukup banyak yang mereka buat dari sisi kacamata Otsus (Undang-undang Otonomi Khusus), yang paling besar adalah dinamika perpanjangan Otsus itu di masa kepemimpinannya beliau berdua, nah itu bisa berjalan dengan baik, kota ini aman sampai Otsus jilid dua itu selesai dan sekarang kita sedang memanfaatkan produk hasilnya.

Peran yang kedua terkait afirmasi Bintara-Tamtama, TNI dan Polri bagi anak-anak Papua untuk menjadi polisi dan tentara sehingga mereka kembali mengabdikan di wilayah asal mereka. Hal ini merupakan suatu kemajuan karena dulu kita tidak bisa jadi polisi dengan mudah. Tetapi pada kepemimpinan Dominggus dan Lakotani afirmasi itu dibuat, akhirnya Bintara-Tamtama itu sekarang sudah mulai bisa kerja. Kita berharap itu hal yang baik ini bisa dijaga, bisa dilakukan lagi kedepan, tentu dengan prinsip-prinsip yang lebih baik lagi



Ketua Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat saat membawakan materi dalam Seminar Awal Kajian Sinergitas Kewenangan Lembaga Pengelola Otsus Papua di Provinsi Papua Barat di Mansinam Beach Hotel Manokwari, 30 November 2020. DOK. BALITBANGDA PB

KETUA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PAPUA BARAT Pdt. Sadrak Simbiak, S.Si Teol

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani?

Saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat bersama-sama dengan tokoh lintas agama dalam sepanjang kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Mohamad Lakotani, kami memberi apresiasi, terutama bagaimana beliau konsisten dengan apa yang beliau sampaikan sesuai visi membangun kerukunan pada poin delapan. Beliau merangkul semua, tidak membeda-bedakan dari agama, suku dan lain sebagainya, terutama para tokoh-tokoh lintas agama dalam upaya membangun kerukunan. Ini merupakan hal yang luar biasa, sebab kunci sebenarnya seperti pepatah/kata bijak dari seorang tokoh, "tidak ada perdamaian dunia kalau tidak ada perdamaian agama-agama, tidak perdamaian agama tanpa ada dialog antara agama". Artinya memang ini diperlukan sebuah hubungan yang baik, sehingga itu dapat menjaga kondusifitas daerah yang menjadi kunci pembangunan itu berjalan.

Selaku tokoh-tokoh agama kami melihat ini hal yang sangat penting, sangat mendasar, esensinya sangat luar biasa, sehingga figur Dominggus Mandacan, kami memandangnya sebagai bapak kerukunan, beliau hadir dan beliau tampil merangkul semua, tokoh-tokoh lintas agama, Lembaga-lembaga keagamaan karena itu tadi sesuai dengan visi beliau, itu menjadi hal yang mendasar sekali dan modal untuk pembangunan karena kedamaian itu penting, keadaan yang kondusif itu penting. Karena sifatnya sensitif dan esensial seperti isu keagamaan, itu beliau betul-betul hati-hati dan merangkul semua, dan hebatnya semua luar biasa. Kami sangat mengapresiasi itu. Beliau dalam kesalehannya kami melihat sosok beliau pemimpin yang luar biasa, punya karisma dalam kesederhanaan dan menjadi bapak bagi semua.

Dalam catatan kami, Papua Barat memiliki indeks kerukunan diatas rata-rata, tiga kali berturut-turut walaupun pada tahun ini agak menurun, sebelumnya mencapai

82,2% lebih tinggi dari rata-rata nasional 70%. Ini menjadi prestasi besar bagi Papua Barat yang juga menerima Harmoni Award Kementerian Agama sebagai penghargaan untuk kerukunan hidup umat beragama dan toleransi, oleh karena itu kami mendapak beliau sebagai bapak kerukunan. Alasan dan dasar yang kuat berdasarkan fakta di lapangan sehingga sebagai ketua FKUB dan semua pimpinan Lembaga keagamaan, baik islam, hindu, budha, katolik, kami semua dapat berkomunikasi bersama Bapak Dominggus dengan baik.

Kita bisa lihat bagaimana pembangunan keagamaan dilakukan dengan baik, maka manusia yang berkualitas dan menjadi sumberdaya yang luar biasa kalau dia punya karakter yang baik, itu dilihat dari kegiatannya itu, kalau dia tidak punya karakter yang baik, itu akan menghancurkan.

Sebagai figur yang sederhana, beliau telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk Papua Barat. Sebagai pemimpin yang disambut dengan hangat oleh rakyat kecil ketika terjun ke lapangan, beliau sebagai bapak yang merangkul semua suku, ras, agama dan budaya.



Dampak

Selama kepemimpinan Dominggus dan Lakotani secara tidak langsung memberi dampak terhadap keberadaan FKUB.

Semua program yang didukung oleh pemerintah provinsi semestinya didukung oleh pemerintah kabupaten maupun kota seperti yang dilakukan Pak Gubernur dengan memberikan dana hibah. Beliau memberikan dukungan tidak hanya bicara tetapi juga mensupport luar biasa dengan kehadirannya. "Bayangkan saja biarpun ada jemaat atau umat atau kelompok yang kecil, Dia bilang ini rakyat, pasti beliau datang sepanjang itu bisa mengatur waktu, itu sangat luar biasa, dan kami memberi apresiasi", ungkap Pdt. Simbiak.



Penyerahan penghargaan oleh FKUB Papua Barat kepada Drs. Dominggus Mandacan, M.Si sebagai Bapak Kerukunan. DOK. FKUB PB

Beliau selalu ada dan menghormati para anggota FKUB yang di dalamnya mewadahi seluruh pimpinan keagamaan baik MUI, Muhammadiyah, PGGP, Keuskupan dan lainnya.

Harapan

Sebagai Ketua FKUB Papua Barat kami berharap memiliki pemimpin seperti beliau. “Kami percaya bahwa Papua Barat akan menjadi lebih baik kedepan dalam kepemimpinan beliau, karena beliau mampu merangkul semua tanpa membedakan”.

Kedepan kalau dalam perkenanan Tuhan beliau kembali memimpin, kami akan menyambut dengan rasa syukur. Kami berharap sekali semua orang, para pimpinan OPD, perangkat-perangkat yang ada di pemerintahan ini bisa memiliki visi yang sama dengan beliau, tidak berseberangan. Oleh karena itu kami berharap semua

kepemimpinan ke depan, jika bapak, dan kami yakin beliau akan memimpin lagi maka semua yang mereka membantu beliau di birokrasi ini kiranya dapat bersinergi dengan baik, memahami apa yang disampaikan, karena beliau biasa satu dua kata, tapi mohon itu diterjemahkan dengan baik. Dan itu berarti kita butuh birokrat yang betul-betul berkualitas, yang baik, yang punya kemampuan dan loyalitas juga perlu. Karena punya kemampuan tapi tidak punya loyalitas juga percuma nanti merugikan pembangunan disini, kita butuh itu, menghormati pimpinan dan mensinergikan semua. Beliau sudah mengimplementasikan apa yang sudah dirangkum dalam visi misi pembangunan yang ada.

Saya terus terang saja mendapat motto yang dicetuskan oleh beliau, itu maknanya sangat dalam, **“membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih”**. Itu kunci

dalam proses pembangunan kedepan, karena kalau kita merangkul atau berupaya merangkul seperti yang beliau lakukan yang didasarkan pada kasih. Aduhh itu susah sekali, karena kita akan bicara pada pikiran dan teori kita yang pada tatanan pelaksanaannya itu susah, kita malah akan menjadi perusak. Itu yang kami harap, ada perbaikan-perbaikan dilakukan dibagian ini, karena bagian ini instrument-instrumen yang sangat mendukung beliau dan rakyat juga

Rakyat juga perlu memahami batasan, sehingga terjadi sinergitas dengan pemerintah baik, supaya partisipasi kita itu betul-betul memiliki dampak dan kontribusi yang positif. Artinya kita Lembaga-lembaga agama tidak hanya senang beliau memberikan perhatian, tetapi sebagai mitra kita juga punya kontribusi untuk pembangunan. ●



KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PAPUA BARAT

KH. Ahmad Nausrau

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani?

Menurut saya kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Mohamad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 sangat luar biasa. Kita bisa melihat dari visi misi dari kepemimpinan beliau berdua ini sangat baik sekali, artinya semua visi misi yang direncanakan itu untuk dilaksanakan dalam masa pemerintahan ini, semua terlaksana dengan baik. Apa yang menjadi visi yang dijabarkan dalam misinya semua dilaksanakan dengan sangat baik oleh Bapak Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat, terutama misi kesembilan, karena saya sebagai tokoh agama, tentu lebih melihat kepada capaian keberhasilan terutama di bidang agama, itu yang menjadi atensi utama kami. Jadi menurut hemat kami apa yang sudah dilakukan oleh mereka selama 5 tahun ini, betul-betul bisa menjadi contoh teladan secara nasional bahkan bagaimana tata kelola pemerintahan itu dijalankan dan dilaksanakan oleh Bapak Dominggus

Mandacan dan Mohamad Lakotani di Provinsi Papua Barat.

Dampak yang dirasakan?

Pertama dari sisi perhatian Bapak Dominggus Mandacan terhadap semua tokoh, beliau sebagai seorang pemimpin yang moderat, seorang pemimpin yang nasionalis, dan sekaligus sebagai seorang tokoh yang mendudukkan semua umat beragama di Papua Barat sebagai komunitas yang mendapatkan perhatian yang sama. Jadi beliau tidak membeda-bedakan antara satu umat beragama dengan umat beragama lainnya, semua mendapatkan perhatian yang sama dari bapak gubernur. Misalnya dalam dana hibah untuk keagamaan yang disalurkan lewat Biro Kesra itu sangat luar biasa. Semua rumah-rumah ibadat di Papua Barat itu mendapatkan bantuan yang sama, termasuk dalam hal ini masjid, mushola, semua mendapatkan bantuan dengan nilai yang sangat luar biasa, dan merata di seluruh Papua Barat, tidak hanya di Manokwari, bahkan di daerah-daerah yang terpencil di luar Manokwari, bantuan-bantuan itu sampai kesana.

Lalu kemudian bantuan kepada lembaga-lembaga atau ormas-ormas Islam di Papua Barat semua dapat bantuan, walau mungkin beberapa satu dua tidak dapat, saya pikir itu hal yang biasa. Tetapi sebagian besar ormas-ormas Islam yang di tingkat provinsi itu mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menunjang operasional rutin setiap tahun dari bapak gubernur, ini sesuatu yang sangat luar biasa, terutama bagi Majelis Ulama Indonesia, alhamdulillah MUI sebagai representasi dari seluruh ormas-ormas Islam di Papua Barat, mendapatkan atensi dan perhatian yang sangat luar biasa, bantuan operasional secara rutin diberikan, kemudian pembangunan kantor MUI, ini yang saya mau sampaikan, pembangunan kantor MUI Papua Barat yang dianggarkan oleh Gubernur Papua Barat dan dibangun tahun 2019, dan selesai juga ditahun yang sama dan kemudian diresmikan pada tahun 2020. Ini merupakan kantor MUI yang sangat megah, dan boleh dikatakan bahwa kantor MUI di Indonesia yang sangat megah dan itu adalah sebuah berkah dari dukungan yang penuh dari bapak gubernur. Ini bukan hanya sebuah ungkapan yang saya sampaikan sebagai ketua MUI Papua Barat yang mendapatkan bantuan, tetapi disampaikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia yang berkunjung ke kantor MUI Papua Barat pada 15 Oktober 2021, itu menyampaikan secara langsung dihadapan para menteri yang hadir, para tokoh-tokoh agama yang hadir pada saat itu bahwa kantor MUI Papua Barat ini adalah kantor yang paling megah di Indonesia dan juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada bapak gubernur, beliau menyampaikan saya sudah berkunjung ke banyak kantor MUI di Indonesia, sudah bertemu para gubernur, ketua-ketua MUI Provinsi di Indonesia, mereka menjanjikan akan membantu MUI untuk pembangunan MUI, kantor sekretariat MUI, tapi ada yang hanya sampai peletakan batu pertama saja, ada yang hanya menjanjikan, tapi Gubernur Papua Barat tidak hanya menjanjikan tetapi langsung membangun dan langsung selesai.

Harapan

Pertama sebagai Ketua MUI Papua Barat, yang selama membangun sinergitas yang sangat baik sekali dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, terutama Bapak gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, yang kami kenal dari kedua pribadi adalah, pribadi yang sangat



Mohamad Lakotani didampingi Ketua MUI Papua Barat saat bertemu dengan pimpinan agama di Arab Saudi. DOK. PRIBADI

luar biasa, sosok yang sangat sederhana, merakyat, dekat dengan masyarakat dan dekat juga dengan para tokoh-tokoh agama. Karena itulah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, kami doakan semoga Bapak Dominggus Mandacan dan Bapak Mohamad Lakotani diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mereka berdua bisa tinggal tetap terus dengan masyarakat sampai tahun 2024. Bahwa nanti kita kembalikan hasil pemilu kepada masyarakat, kepada umat di Papua Barat untuk menentukan pilihannya, tetapi kalau saya boleh menyampaikan sebuah harapan saya ingin menyampaikan atau pesan saya kepada semua masyarakat Papua Barat bahwa pemimpin yang baik seperti bapak Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani ini adalah aset yang

sangat berharga bagi Papua Barat, tokoh yang sangat punya perhatian dan kepedulian kepada masyarakat dan pembangunan di daerah ini. Karena itu kalau ada tokoh yang baik, yang bisa jadi nanti akan muncul tokoh-tokoh yang lain, yang mungkin tahu kepribadiannya, tetapi yang kita lihat saat ini yang merepresentasikan kepedulian, keberpihakan kepada masyarakat Papua Barat. Tidak ada tendensi tertentu atau tidak ada keberpihakan tertentu terhadap kelompok masyarakat di Papua Barat. Kalau boleh saya mengajak ya saya mengajak seluruh umat muslim Papua Barat ya kalau boleh mari kita dukung kedua bapak ini kembali, memimpin Papua Barat untuk 5 tahun berikutnya, agar dapat menyelesaikan apa-apa yang belum terselesaikan dari visi misi yang sudah diprogramkan, agar dapat

meletakkan dasar-dasar fondasi pembangunan di Papua Barat sehingga kepemimpinan atau pemerintahan berikutnya lagi tinggal melanjutkan saja yang sudah baik.

Harapan saya untuk masyarakat Papua Barat, mari kita tetap berikhtiar untuk kita tetap jaga kebersamaan kita, mari kita jaga kerukunan kita di Papua Barat, seperti yang sudah diletakkan oleh beliau berdua selama

5 tahun, sehingga Papua barat mendapatkan predikat sebagai daerah yang dengan tingkat kerukunan toleransi terbaik di Indonesia dan angka yang sangat baik. ●



TOKOH ADAT

Paul Finsen Mayor, S.IP

selama ini ada, menjadi perbedaan antara kita, beliau sampai ketemu juga. Dalam kepemimpinan mereka berhasil baik dalam membangun komunikasi-komunikasi yang efektif dan ini bisa dilihat dari penghargaan dari pemerintah pusat maupun beberapa lembaga lainnya.

Dalam pembangunan atau sentuhan mereka itu sampai ke kampung. Mereka adalah eksekutor yang baik, itu dilihat dari segi eksekutor. Kalau sebagai konseptor ini perlu ditingkatkan, karena sampai hari ini terlepas dari masa corona, kita masih membutuhkan pembangunan-pembangunan fisik oleh pemerintah, membangun seperti di zaman Atururi dulu. Jadi apabila mereka berdua terpilih Kembali perlu mempunyai konsep pembangunan. Konsep pembangunan ini harus banyak pembangunan fisik dan jangan hanya bertumpu di satu daerah saja, tapi harus menyebar luas, tersebar secara merata ke 12 kabupaten dan satu kota sehingga masyarakat benar-benar merasakan.

Dari komunikasi pribadi, dua orang ini sudah baik, lebih baik lagi sebagai eksekutor dan konseptor. Konseptor ini dari awal kepemimpinan mereka sampai hari ini, pola komunikasinya sangat sejuk, baik dan menyeluruh, termasuk masalah-masalah yang paling terberat rasisme pun bisa mereka dua dapat diselesaikan secara baik.

Sebagai seorang kepala suku besar, Bapak Dominggus termasuk orang yang bijaksana, sebagai gubernur beliau berperilaku sebagai layaknya seorang gubernur, sebagai komunikator, sebagai eksekutor baik. Mungkin dalam aspek ini, suatu hal yang mendapat perhatian beliau adalah menambah pro-

gram pembangunan, bukan saja di satu sisi pembangunan gereja, masjid, pura atau yang lainnya, tetapi pembangunan yang lebih menyentuh masyarakat adat. Selain itu, ada masalah bagi sebagian penduduk Papua Barat adalah kesehatan dan pendidikan. Kesehatan hari ini kita Papua Barat punya rumah sakit secara fisik tapi fasilitas masih sangat minim atau dibawah yang diharapkan. Kedepan, harus ada anak-anak Papua yang jadi dokter, sebagai tenaga medis. Dari sisi kesehatan rumah sakit Papua Barat dan di kabupaten kota, ada puskesmas dan pusku itu penting, karena substansi pembangunan orang Papua untuk saat ini adalah perbaikan pendidikan dan kesehatan. Kita sehat dulu baru bisa kerja, bisa cari makan, bisa sekolah, bisa lakukan aktivitas. Kesehatan hari ini masih terasa minim, kita harus akui orang hari ini ke rumah sakit pasti untuk mati, sudah tidak bisa.

Kita lihat contoh di Jawa Tengah, Sleman yang tidak punya APBD sebesar APBD Papua Barat. Luar biasa pembangunan perumahannya hampir-hampir tidak ada rumah kumuh, walaupun kita hitung rumah kumuh tidak sampai 50an. Padahal daerah Sleman itu besar sekitar 135 kecamatan. Nah oleh sebab, yang perlu ditingkatkan adalah konsep pembangunan. Kalau Bapak Gubernur kalau mau jalan ke daerah-daerah bawah salah satu tokoh adat, tokoh agama, bawa kepala-kepala dinas atau kepala-kepala bidang ikut, supaya ketika masyarakat sampaikan informasi, langsung Bapak Gubernur tugaskan kepada OPD terkait. Misalnya, Dinas PU ini tolong laksanakan ini, satu minggu dari sekarang sudah ada progress sehingga Gubernur dapat mengetahui posisi dimana. Dari sisi adat, Pak Ketua Dewan Adat tolong sampaikan hak-hak masyarakat, hak

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani?

Saya melihat kepemimpinan DOAMU (Dominggus Mandacan Mohammad Lakotani) sangat baik. Bapak Dominggus adalah tipe pekerja keras. Ketika ada masyarakat menyampaikan persoalan, beliau langsung bergerak. Beliau kalau menjangkau sesuatu sampai ke pelosok-pelosok sampai ke kampung-kampung, bahkan ada kampung-kampung yang dikunjungi lebih dari satu kali. Padahal beliau ini adalah gubernur yang membawahi 12 kota kabupaten dan 1 kota. Jadi boleh dibalang kepemimpinan mereka dua ini baik dalam hal pelayanan masyarakat dan berusaha menjangkau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok.

Di sisi lain, Bapak Wakil gubernur merupakan salah tokoh muslim di Papua Barat. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Papua Barat (DMI Papua Barat) yang sangat plural, yang sangat baik, sangat majemuk artinya beliau bisa menembus sekat-sekat yang



Ketua DAP Wilayah III Doberay mendampingi Dominggus Mandacan saat menghadiri Penthabisan Rumah Pastori Pendeta GKI Betania Saukabu dan Peresmian Tugu Peringatan Injil Masuk di Kepulauan Paambemuk, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat. DOK. PRIBADI

tanah adat, hutan adat, laut adat dan hak mereka sebagai masyarakat adat diakomodir dengan undang-undang otonomi khusus, pemberdayaan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua seperti pasal 43 dalam UU Otonomi khusus. Dari aspek agama, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua PGGP tolong coba lihat ini bagaimana melayani masyarakat, sehingga mereka semua ini bisa bekerja. Kalau hari ini cuma Pak Gubernur saja yang jalan dengan staf atau orang-orang sekitarnya saja, beliau akan kelelahan untuk mengeksekusi semuanya, sehingga pada masa pergantian orang datang rebut, dan mereka datang komplain di Dewan Adat sini terkait dengan hal-hal seperti ini. Ini yang harus ditambahkan dan harus dilengkapi, terima aspirasi masyarakat bukan hanya iya versi orang Jawa tapi iya versi orang Papua, langsung bertindak (*action*).

Dampak apa yang sudah pernah dirasakan oleh masyarakat adat selama kepemimpinan DOAMU

Ya Tangan Kasih, terus dampak yang mereka bisa terima ya mereka juga bisa lihat

gubernur, karena gubernur bisa turun melihat mereka langsung di kampung-kampung. Mereka bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan gubernur ketimbang dengan para bupati dan walikota, itu agak susah. Tetapi kalau gubernur beliau friendly, beliau tokoh yang komunikatif, beliau tokoh yang menyejukkan, dan masyarakat adat menerima dampak itu. Menjadi catatan penting atas kepemimpinan beliau untuk masyarakat adat adalah pembangunan pondok-pondok pinang yang menyentuh masyarakat. Program ini menyentuh tapi masih berfokus hanya di Manokwari Raya saja. Jadi pondok pinang itu juga menjadi primadona gubernur karena menyentuh. Hanya jangan difokuskan di Manokwari Raya saja, jangan Sorong hanya 10 atau 11 saja, harus 100, 100. OPD terkait Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat harus diberi Pagu yang besar untuk membangun secara merata. Jadi Manokwari 100, Kota Sorong 100, begitu, itu penting! Jangan Manokwari 100, Sorong 10, itu namanya ketimpangan! Yang perlu diingat bahwa Sorong itu kota bisnis, jadi masyarakat adat disana sudah

mulai berpikir bisnis seperti saudara-saudara kita dari Sulawesi, Jawa, jadi kita harus *support*. Mungkin untuk sekarang itu yang signifikan

Selain Pondok Pinang, potensi lain apa yang bisa membantu memberdayakan masyarakat adat

Kita harus melihat potensi di daerah, contoh potensi tambang, yang ada di depan mata kita adalah tambang Manokwari dan Pegaf. OPD terkait ESDM bisa mengeluarkan izin, karena masyarakat butuh makan. Masyarakat sebagai pemilik hak ulayat, tapi saat tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada perizinan, akhirnya dimainkan secara illegal. Kemudian masyarakat ditangkap lah tidak mungkin karena akan ada pemalangan jalan, investor mereka masuk kita tidak bisa larang karna mereka bilang proses di pemerintah berbelit-belit. Lebih baik kita bayar ke oknum-oknum tertentu kemudian kita tabrak masuk saja, masalah nanti kita urus dibelakang, itu sampai nekat begitu, dan itu terjadi di depan mata kita. Artinya OPD terkait tidak sensitif dan responsif terhadap apa yang ada di depan mata, rata-rata di OPD ini kan hanya kerjakan program rutinitas, jarang membuat inovasi. Contoh Balitbangda buat program-program yang dewan adat juga dilibatkan, dan menurut saya ini adalah hal yang baik. Dinas Sosial ada program bagi transportasi mobil dan pondok pinang itu bagus. Mungkin perlu peningkatan.

“Saya tidak tahu dinas atau badan yang lain, belum begitu menyentuh dan masih terbatas dengan program rutinitas, lalu menunggu perintah Pak Gubernur. Saya berharap OPD-OPD lain bisa kreatif dan inovatif, sehingga tidak harus berhubungan dengan gubernur. Kalau Pak Dominggus memimpin dengan jiwa kebabakan, memberi keleluasaan kepada bawahannya, hanya bawahannya tidak produktif. Itu fakta yang terjadi di depan mata kita. Hari ini beliau berhasil di bidang keagamaan, sebagai Tokoh/Bapak Umat Beragama, Bapak pembangunan Itu baik, tapi bukan di satu aspek itu saja. Ingat sebelum ada agama, ada pemerintah yang adat dulu.

Isu lain adalah penghargaan atas ulayat masyarakat. Misalnya, masyarakat mengeluh karena tanah ulayat mereka dipakai untuk pembangunan jalan Trans Nasional Mamei -Windesi sepanjang 700

km, ada sekitar 71 km merupakan tanah ulayat, tanah adat, hutan adat, dan tidak bayar sampai sekarang. Kita dewan adat sudah mediasi dan ketemu Pak Gubernur, asisten, Sekda dan OPD terkait, Balai Jalan Nasional, tapi sampai hari ini tidak ada titik temu dan ganti rugi. Materialnya diambil, kayunya diambil dan pelibatan pihak aparat keamanan dalam proses pembangunan mengakibatkan masyarakat merasa menjadi tersisih, "orang datang membangun di saya punya tanah tapi tidak minta izin.

Ini yang menjadi evaluasi kepada kepemimpinan itu kita dukung, sejauh pembangunan itu memihak kepada masyarakat adat, menguntungkan masyarakat adat. Kita siap menerima pembangunan jalan cor di kampung-kampung, di kita punya ulayat adat, kita tidak akan tuntutan besar kecuali, kita tidak akan tuntutan kalau orang-orang yang

kerja situ kami orang kampung sendiri. Inikan orang bawa orang toraja, bugis, makasar dari luar semua datang kerja, bagaimana kami mau terima, orang datang bangun, dia tidak tahu kami siapa dan dia juga tidak bawa kami kerja, baru orang bangun kita duduk saja jadi penonton di kita punya kampung. Kita kalau protes kita diperhadapkan dengan aparat keamanan, dipanggil ke Polres, Polsek, di panggil ke pos polisi, itu yang terjadi. Akhirnya sekarang masyarakat adat mereka pintar, kalau mau bangun mereka untuk hak ulayat kalau tidak palang pekerjaan. Dan mereka pintar karena tuntutannya sesuai dengan pagu dana pekerjaan, keuntungannya. Jadi kontraktor akhirnya pusing juga untuk mereka yang borong pekerjaan.

Pesan buat Bapak juga, kalau bisa dan kalau ada, sebaiknya memberikan kesempatan buat kontrak lokal untuk mengerjakan

kan. Misalnya, ada pembangunan di Wera-bur Wondama. Kalau ada kontrak lokal yang bisa kasih kesempatan. Nanti minta bantuan kepala desa dan kapolsek bantu awasi pelaksanaannya. Ada dapat pekerjaan dan pekerjaan di kampung sendiri, dia pasti akan sungguh-sungguh. Kalau asal-asal nanti masyarakat bisa marah ke rumah kontraknya. Pembangunan harus menguntungkan masyarakat adat. Kalau misalnya bawa orang dari luar akhirnya nanti ada pemalangan, permasalahan tanah adat, tanah ulayat, masyarakat alasan kiri kanan, bahkan ada kepala kampung yang tolak pembangunan karena masyarakatnya tidak mau dipekerjakan, karena kontraktor bawa tukang yang kerja cepat dan bagus itu yang dari luar. Ya kita tidak bisa salahkan kontraktor juga, karena memang dia bukan orang dari situ, dia dari luar jadi dia butuh cepat. ●



TOKOH PEREMPUAN

Yuliana Numberi, S.S, M.Si

ini sangat baik, untuk menjawab persoalan di masyarakat serta mendorong sebuah sistem pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat. Ini bisa dilihat dari program-program yang dibuat dalam visi misi bapak berdua ini sepertinya sudah jelas, bagaimana mereka ingin mewujudkan Papua Barat yang baik, Papua Barat yang sejahtera.

Namun ada persoalan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam program ini, karena ada beberapa sektor yang belum disentuh terutama dalam usaha pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan. Hal ini dapat kita lihat dengan rendahnya keterlibatan atau rendahnya perencanaan menjawab persoalan *gender* baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota. Hal ini antara lain disebabkan karena regulasi telah dibuat gubernur belum dapat disosialisasikan secara baik oleh dinas teknis kepada bupati dan walikota, kebijakan itu belum dapat diterjemahkan dalam program dan kegiatan di kabupaten dan kota, serta belum ada perhatian atas isu *gender* atau perspektif *gender* di berbagai sektor pemerintahan. Saya lihat kita lebih

mengejar pada sektor pendidikan dan kesehatan, padahal kalau kita berbicara tentang pembangunan gender itu ada pada semua sektor.

Hal lainnya adalah pada kemampuan staf pada dinas teknis terkait, sehingga belum dapat menerapkan dengan baik regulasi nasional jelas pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana dimuat dalam peraturan Mendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang bagaimana pembangunan gender itu harus merata di seluruh Indonesia dan wajib dilakukan oleh gubernur, bupati dan wali kota. Tetapi sampai hari ini banyak kabupaten kota belum mengimplementasikan itu dalam program kegiatan, sehingga kalau kita lihat angka kemiskinan masih ada pada masyarakat karena bias gender yang terjadi.

Hal lainnya dalam pengentasan kemiskinan hanya fokus pada laki-laki sebagai kepala keluarga, banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga mereka tapi mereka belum mendapat manfaat dari setiap kebijakan pembangunan, maka pengarus utamaan

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani?

Dari perspektif perempuan dan anak, saya melihat visi dan misi dari kedua pemimpin



Perwakilan Perempuan Papua dari berbagai daerah di Tanah Papua yang bekerja dalam berbagai isu dan keahlian saat bertemu Presiden RI Jokowi Widodo di Istana Negara. DOK. PRIBADI

gender itu menjadi penting, sehingga nanti kebijakan pembangunan di semua sektor akan melihat berapa persen yang diberikan untuk perempuan kepala keluarga, berapa untuk laki-laki kepala keluarga.

Dampak yang dirasakan?

Saya lihat dampak yang paling signifikan ketika masa Covid-19, saya melihat banyak perempuan mendapatkan akses untuk mendapat bantuan dan sebagainya. Saya juga merasakan itu karena saya juga sebagai seorang perempuan yang berstatus janda. Tetapi sebetulnya itu dampak yang diberikan secara marathon atau dalam jangka waktu tertentu, padahal yang kita butuhkan adalah dampak dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, yang harus dirasakan oleh para laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, kaum difabel dan kelompok minoritas. Ini yang belum terlihat dengan baik, oleh sebab itu kalau bicara dampak secara umum.

Harapan dalam kepemimpinan yang akan datang?

Untuk kepemimpinan kedepan, saya

berikan apresiasi agar kedua bapak ini dapat terlihat lagi. Tapi ada hal yang harus menjadi catatan untuk kedua bapak ini, termasuk:

Mereka kalau bisa membangun Papua Barat selain sebagai provinsi konservasi tapi juga membangun provinsi Papua Barat yang peka isu-isu *gender*. Kenapa ini menjadi penting, karena ini akan menjawab apa yang tadi saya sampaikan bahwa banyak perempuan, banyak anak-anak, banyak kaum difabel yang belum dapat kesempatan, manfaat dari kebijakan pembangunan. Harus memberikan kesempatan partisipasi, kontrol dan manfaat bagi semua orang makanya harus mendorong provinsi yang responsif *gender*, provinsi yang lebih melihat kepada keberpihakan laki-laki, perempuan, anak laki-laki-laki, anak perempuan, kelompok difabel dan kaum minoritas mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah.

Kemudian harus ada ketegasan dari kedua bapak ketika terpilih nanti untuk mendorong pembangunan gender itu harus dilaksanakan, wajib di per provinsi maupun di kabupaten kota dengan memberikan orang-

orang yang punya kapasitas, yang punya kualitas dalam pemahaman gender. Mereka itu yang terlibat dalam memberi pemahaman, edukasi dan sosialisasi kepada pimpinan OPD provinsi maupun kabupaten kota.

Harus mendorong kerja bermitra, tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, kuat dan partisipatif. Itu harus melibatkan lintas sektor, jadi kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakatnya siapa? Masyarakat asli Papua. Karena didalam rencana induk percepatan pembangunan 2022-2041 bagaimana pemerintah pusat mengharapkan Papua dan Papua Barat menjadi provinsi yang cerdas, Papua cerdas, Papua sehat, Papua kreatif, Papua berkelanjutan, Papua hijau, Papua tersambung, dan Papua berkarya, maka mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan.

Harus melibatkan beerbagai tokoh masyarakat dalam Musrembang Otsus, dimana ada keharusan untuk melibatkan tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh

agama yang dimulai dari kampung. Program pembangunan harus mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan adalah orang Papua sejahtera dengan aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Kemudian bapak berdua kedepan menempatkan orang pada birokrasi sebagai pelayan publik adalah orang-orang berkapasitas dan mampu berinovasi, bukan stagnan bukan jalan di tempat. Harus berinovasi sehingga menerjemahkan program itu kedalam kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat baik di tingkat kota, tingkat distrik maupun tingkat kampung.

Harapan saya, 2024-2029 harus ada komitmen untuk membangun Papua menuju Papua sejahtera, maka tetap mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan Papua, karena di RIPP ini sudah terencana bahwa 2022-2024, 2025-2029 dan setiap tahun harus ada evaluasi, karena itu penting, sehingga kita bisa melihat kemajuan tiap sektor, dan membantu sektor yang belum sehingga sehingga pembangunan bisa merata.

Kedepan juga perlu adanya regulasi yang memberi perlindungan bagi perempuan dan anak asli Papua, terutama perempuan asli

Papua yang di minang secara adat oleh laki-laki Papua, itu harus wajib dinikahkan dan masyarakat adat harus ada regulasi yang dipegang menjadi dasar untuk menikahkan mereka secara adat, sekalipun belum nikah secara pemerintahan., sehingga itu menjadi dasar untuk perempuan, ketika dia mengalami kekerasan, dia bisa menggugat, nah ini yang belum dilakukan. Peraturan ini sudah dirintis oleh Fraksi Otus pada 2019, tetapi belum ditetapkan. Peraturan perlu juga untuk melindungi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, kesempatan dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi kreatif. ●



PENGUSAHA PAPUA Wempi Ayomi

sekarang ini kita diberikan kesempatan dengan batas-batas nilai pekerjaan tertentu untuk pengusaha orang Papua dan harus saling bersaing. Tapi kesempatan ini belum dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Papua kita sendiri. Kemudian sistem lelang didalam sendiri pun tidak begitu transparan yang selama ini kita rasakan. Begitu kita mau masukkan, biar selengkap apapun data kita, ya kalau siapa yang diutamakan yan orang itu yang menang, dan orang yang menang itu pasti orang punya duit, karena kita putra daerah yang juga ikut bersaing, saya juga pernah merasakannya. Kita punya profil selengkap apapun juga kalau tidak ada dukungan dari dalam, sulit untuk menang lelang.

Sekarang pengusaha orang Papua dikasih kesempatan untuk lelang, tapi paket pekerjaan itu dibagi. Misalnya, 1 paket pekerjaan senilai 500 juta Rupiah, akan dibagi sampai bisa buat 10 pengusaha atau lima orang. Jumlah itukan sangat kecil sekali untuk kita putra daerah. Nilai pekerjaan 500 juta Rupiah dibagi 5 pengusaha jadi kita bisa dapat sekitar 100 juta rupiah. Padahal didalam undang-undang, nilai pekerjaan antara 500 juta sampai 1 milyar itukan diutamakan orang asli Papua (OAP).

Saya berharap kedepan sistem ini diubah. Kalau memang benar-benar terbuka, kita harus bersaing dengan sehat, tidak ada embel-embel, kita benar-benar bersaing

secara sehat. Karena hanya karena proyek 1 paket itu orang-orang dari daerah harus datang tinggal disini 1-2 minggu hanya untuk kejar paket 500 juta itu saja. Padahal 500 juta mereka tidak kerja sendiri tapi harus dibagi lagi untuk 5 atau 10 orang.

Jadi ke depan sebaiknya sistem dibuka buat pengusaha Orang Asli Papua. Saya sering ikut lelang di Provinsi karena ada kekecewaan. Lebih baik kita bersaing di paket-paket APBN tapi bersaing sehat, dari pada kita masuk di provinsi dan kabupaten juga sama saja.

Saya ingat ada kebijakan putra daerah, untuk paket pekerjaan senilai 1 milyar, itu bisa dengan penunjukkan di Papua dan Papua Barat. Tapi 1 milyar itu juga akan dipecah menjadi 500 juta, dan mungkin paket pekerjaan 500 juta rupiah juga nanti dipecah lagi mungkin menjadi 100 juta atau 50 juta.

Saya berharap ke depan, bisa diperbaiki oleh pemerintahan gubernur yang akan datang, karena itu akan mensejahterakan orang asli Papua/putra daerah. Selanjutnya saya minta ke teman-teman Papua juga, yang selama ini hanya jadi direktur di atas kertas, kalau bisa kita harus turun langsung kerja. Itu yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat, direktornya orang Papua tapi yang kerja bukan orang Papua. Terus

Bagaimana tanggapan 5 tahun kepemimpinan Dominggus Mandacan dan Mohamad Lakotani?

Saya atas nama pengusaha Papua, yang selama ini saya ikuti dan saya juga rasakan selama kepemimpinan Pak Dominggus ada banyak kendala kita hadapi sebagai kontraktor lokal Papua, terutama pada saat lelang (tender) pekerjaan, karena lelang

ada yang pekerjaanya kita sudah tunggu berhari-hari untuk dapat, tapi begitu kita sudah dapat kita jual ke orang lagi, itu sistem

yang harus kita ubah kalau orang Papua mau maju. Ya kita harus bekerja, karena ini kita punya tanah, kita yang harus bisa kerja,

jadi kita punya sistem mental ini yang harus diubah.

● Penulis : Yance de Fretes. (YKI)

Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani merangkul semua, tidak membedakan dari agama, suku dan lain sebagainya, terutama para tokoh-tokoh lintas agama dalam upaya membangun kerukunan. Ini merupakan hal yang luar biasa, sebab kunci sebenarnya seperti pepatah/kata bijak dari seorang tokoh, “tidak ada perdamaian dunia kalau tidak ada perdamaian agama-agama, tidak perdamaian agama tanpa ada dialog antara agama”.



Kunjungan Kepala Balai BWS Papua Barat Beserta Rombongan di lokasi kerja Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Malaos Kabupaten Sorong.
DOK. PRIBADI

TRANSAKSI MUDAH DENGAN



&



BI Fast

Transfer ke Bank Lain
dengan **BI-Fast** hanya
Rp. 2.500



- Transfer Antar Rekening Bank Papua
- Transfer Antar Rekening Bank Lain
- BI - Fast
- Bayar Listrik PLN
- Bayar Telepon
- Beli Pulsa & Data Telkomsel
- Beli Pulsa Indosat
- Beli Pulsa XL
- Beli Pulsa PLN
- Pembayaran Kartu Kredit
- Pembayaran Tagihan Lainnya

DOWNLOAD APLIKASINYA DI :



SCAN ME



SCAN ME

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Terdaftar
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



PT. Bank Pembangunan Daerah Papua
merupakan peserta penjaminan LPS.

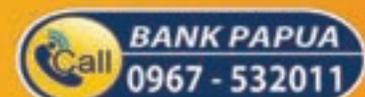


bankpapua1966

@bankpapua1966

@bankpapua_id

www.bankpapua.co.id



Mendorong Percepatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Provinsi Papua Barat Lewat Pendidikan S2 dan S3



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA-UI). DOK.BALITBANGDA PB

Upaya mendukung komitmen pemerintah dan semua instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan perlindungan 70% luasan hutan di Pa-

pua, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong peningkatan sumberdaya manusia sebagai objek utama pembangunan itu sendiri. Melalui Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat melakukan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indo-



nesia (FMIPA-UI). Perjanjian kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama (PKS) antara pimpinan kedua lembaga, yang berlangsung di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Jumat, 1 Juli 2022.

Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS menjelaskan isi nota perjanjian kerjasama itu adalah tentang penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana magister (S2) dan doktor (S3). Adanya kerjasama ini akan

Indonesia adalah sebanyak empat orang diantaranya 3 ASN dan 1 tenaga honorer.

Selain itu perjanjian kerjasama lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah program *double degree* melalui Split Site Master's Program. Split-Site Master's Program (SSMP) adalah program beasiswa jangka panjang yang merupakan wujud kerja sama antara Pemerintah Australia melalui *Australia Awards in Indonesia* (AAI) dan Pemerintah Indonesia (organisasi/ kementerian/ lembaga/



Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS. saat memberikan arahan kepada 2 kandidat yang lulus untuk mengikuti tes IELTS. DOK. BALITBANGDA PB

mempermudah para pegawai negeri sipil dari lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengambil program S2 dan S3 ke FMIPA Universitas Indonesia melalui jalur khusus.

“Balitbangda Papua Barat akan mendorong percepatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lewat pendidikan S2 dan S3 terutama program lewat jalur riset, dan tentunya program riset dan inovasi terkait pembangunan berkelanjutan,” kata Profesor Heatubun. Pada tahun 2022 ini jumlah yang sudah dinyatakan lulus dan siap mengikuti perkuliahan di Universitas

pemerintah daerah) dengan kesepakatan pendanaan bersama. Program ini memberikan kesempatan bagi para penerima beasiswa untuk meraih dua gelar S2 dalam waktu yang bersamaan dari universitas di Indonesia dan di Australia dalam kurun waktu 2,5 tahun.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan proses seleksi SSMP yang berlangsung sejak Desember 2021 – April 2022 melalui seleksi administrasi sebanyak 20 orang pendaftar. Seleksi dilakukan bertahap baik melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat, Australia Awards Indonesia dan Uni-



Adanya Penyelenggaraan program pendidikan pascasarjana magister (S2) dan doktor (S3) ini akan mempermudah para pegawai negeri sipil dari lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengambil program S2 dan S3 ke FMIPA Universitas Indonesia melalui jalur riset.

— **Charlie D. Heatubun** —



Koordinasi tim Balitbangda Provinsi Papua Barat dengan Ketua Program Studi Biologi Pasca Sarjana FMIPA UI terkait persiapan perkuliahan.
DOK. BALITBANGDAMEDIA PB

versitas Indonesia.

Seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu mengutamakan ASN dan Tenaga Honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dan memiliki rekomendasi dari pejabat eselon II. Selanjutnya yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Program SSMP yaitu nilai IPK minimal 2.9, seleksi kemampuan Bahasa Inggris, dalam hal ini melalui tes *International English Language Testing System* (IELTS) yang dilakukan pada 19 Maret 2022 di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, dan diikuti dengan tes wawancara yang merupakan

seleksi terakhir oleh pihak AAI. Sedangkan seleksi Universitas Indonesia melalui jalur reguler dengan proses tahapannya melalui seleksi administrasi, ujian SIMAK UI dan Wawancara.

Dari semua tahapan seleksi ini, satu peserta atas nama Irman Lilingan ASN dari Kota Sorong berhasil menjadi penerima beasiswa Split Site Master's Program tahun 2022.

Dengan Gebrakan awal Tahun 2022 yang dilakukan Kepala Balitbangda Papua Barat ini, memberi sinyal kepada seluruh PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat,

agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga jalur khusus ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri, tapi juga dapat berkontribusi melalui riset dan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Sekadar diketahui nota perjanjian kerja sama dengan nomor 001/PKS/FMIPA/UI/2022 dan 001/PKS/Balitbangda-PB/1/2022 ditandatangani langsung oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan Dekan FMIPA UI, Dede Djuhana, Ph.D.

● Penulis : Arissa M. (Balitbangda PB)



Kepala Balitbangda Papua Barat saat bersama BHS Senior Manager YKAN Lukas Rumetna (kanan). DOK. BALITBANGDA PB

Empat Daerah Menjadi Fokus Kajian Terkait Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Provinsi Papua Barat

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) akan mendukung Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) melakukan kajian terkait variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan iklim di pesisir Provinsi Papua Barat.

Sebagai Koordinator Mitra Pembangunan Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS mendiskusikan terkait 4 (empat) daerah yang menjadi fokus kajian tim peneliti adalah Kota Sorong,

Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat bersama tim dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dengan melibatkan tim peneliti yang berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), YKAN dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Inisiatif ini disambut baik oleh Profesor Charlie Heatubun dimana YKAN menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap kajian yang akan dilakukan, walaupun Balitbangda Papua Barat tidak dilibatkan dari awal perencanaan.

Gubernur telah mendelegasikan kepada Balitbangda Papua Barat untuk mengkoordinir mitra pembangunan yang melakukan kerja-kerja di wilayah Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Karena itu, dirinya berharap dukungan dari semua mitra pembangunan untuk mengkomunikasikan dari awal rencana-rencana kerja yang akan dilakukan, sehingga ada persoalan-persoalan tertentu dari pemerintah daerah dapat diakomodir dan dipecahkan dalam rencana dan aksi yang akan dilakukan di wilayah Papua Barat.



Prof. Heatubun saat memberikan arahan lebih lanjut sebelum berakhirnya pertemuan bersama tim Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). DOK. BALITBANGDA PB

BHS Senior Manager YKAN, Lukas Rumetna menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat melalui Kepala Balitbangda Papua Barat, yang telah menerima mereka. Selain bersilaturahmi, atas nama lembaga, Lukas Rumetna pada kesempatan itu juga meminta dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk memulai sosialisasi dan rencana kajian di satu kota dan tiga kabupaten di wilayah Papua Barat.

Kajian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya atau ancaman bencana akibat faktor alam (hidrometeorologi an geologis) dan faktor antropogenik, serta menilai tingkat kerentanan, kapasitas dan risiko masyarakat pesisir terhadap potensi bencana. Selanjutnya tim peneliti akan menyusun opsi-opsi adaptasi dan mitigasi pengurangan risiko bencana (khususnya akibat perubahan iklim).

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)



Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dengan melakukan penandatanganan PKS dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara terkait pengelolaan sumber alam hayati. DOK. BALITBANGDA PB

■ UPDATE TINDAK LANJUT

1. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan YKAN telah menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan YKAN telah melakukan Kick Off Kajian Kerentanan Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Provinsi Papua Barat secara daring (online) pada tanggal 20 April 2022.



Diskusi Kepala Balitbangda Papua Barat, COE Yayasan EcoNusa, Kepala KCU Bank Papua Manokwari Ibu Bertha Affar didampingi oleh wakil KCU Bapak Ronny Wabia dan staf Yunus Waimbo. DOK. BALITBANGDA PB

Buka Peluang Kerjasama Balitbangda Fasilitasi Pertemuan Bank Papua dan Yayasan EcoNusa

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS memfasilitasi pertemuan antara CEO EcoNusa, Bustar Maitar dengan Kepala Bank Papua Kantor Cabang Utama (KCU) Manokwari, Bertha Affar yang didampingi Wakil Kepala Bank Papua KCU Manokwari, Ronny Wabia, di Pondok Pertemuan Kepala Balitbangda pada Rabu, 2 Februari 2022.

Tujuan mempertemukan CEO EcoNusa dan pihak Bank Papua, kata Prof. Heatubun adalah untuk mendiskusikan peluang kolaborasi antara kedua belah pihak.

Yayasan EcoNusa selaku lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di wilayah timur Indonesia, secara khusus di Papua Barat, sedang mendorong bisnis komoditi lokal yang melibatkan pemuda, masyarakat dan komunitas-komunitas di tingkat kampung, karenanya, diharapkan Bank Papua dapat memberi dukungan, sehingga upaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kampung dapat tercapai dalam waktu singkat.

Bustar Maitar mengatakan, EcoNusa memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang siap dioperasikan untuk membantu penguatan ekonomi masyarakat kampung. Hanya saja

diperlukan kolaborasi bersama, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, termasuk Bank Papua, sehingga progresnya bisa cepat.

Sementara itu, Bertha Affar atas nama Bank Papua memberikan apresiasi kepada Yayasan EcoNusa yang telah melakukan kerja-kerja luar biasa di Tanah Papua, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan komunitas anak muda. Hal ini sejalan dengan kerjasama antara Bank Papua dan Pemerintah Daerah melalui pola kemitraan yang dapat direalisasikan dengan program-program CSR maupun pengembangan bisnis kecil yang menjadi tanggung jawab sosial



Kepala Balitbangda Papua Barat, Kepala dan Wakil KCU Bank Papua Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

EcoNusa memiliki sejumlah fasilitas pendukung yang siap dioperasikan untuk membantu penguatan ekonomi masyarakat kampung, tinggal diperlukan kolaborasi bersama, baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak swasta, termasuk Bank Papua, sehingga progresnya bisa cepat.

— **(Bustar Maitar)**



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si saat menjelaskan kinerja Balitbangda Papua Barat pada Dashboard DASI BRIDA. DOK. BALITBANGDA PB

Bank Papua kepada masyarakat.

“Saya akan membawa hasil pertemuan ini ke tingkat rapat pimpinan pusat, untuk selanjutnya didiskusikan apa yang bisa dilakukan Bank Papua untuk berkolaborasi dalam kegiatan EcoNusa,” jelas Bertha.

Kepala Balitbangda, Prof. Heatubun

mengapresiasi apa yang telah dikerjakan Yayasan EcoNusa dan niat baiknya untuk menggandeng Bank Papua dalam mendukung kegiatan bisnis komoditi lokal di tingkat kampung. Dirinya berharap, pada pertemuan berikut sudah ada *progress* yang bisa ditindaklanjuti bersama.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)

Kolaborasi Multipihak Untuk Kemajuan Kakao Ransiki



Pertemuan empat lembaga internasional, UK *Climate Change Unit* (UKCCU) dan *Green Economy Growth* (GEG) Inggris, *United State Agency for International Development* (USAID) Amerika Serikat dan Rabo Foundation Belanda, didampingi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat serta Yayasan Tekad. DOK. BALITBANGDA PB

Perkembangan dan kemajuan Koperasi Eiber Suth Ransiki yang kini telah menjadi PT. Eiber Suth telah menghasilkan biji kakao berkualitas terbaik sehingga kian hari semakin meningkat, bahkan juga rencana pengembangan ke depan. PT. Eiber Suth menghasilkan kakao sebagai komoditas non deforestasi telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas unggulan dari Papua Barat dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Produk dari Kakao Ransiki menjadi primadona di pasar internasional bahkan ini merupakan bukti nyata dari kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, PT. Eiber Suth, Mitra Pembangunan, petani dan pembeli. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat

turut membantu mencari pasar di hilir, memperbaiki rantai pasok, dan membenahi produktivitas di bagian hulu. Perjalanan memang masih panjang bagi PT. Eiber Suth. Namun, upaya dengan memberdayakan warga lokal dan menjaga kualitas sudah dalam jalur yang tepat bagi cokelat Ransiki menuju kebangkitan hakiki.

Selain dukungan dari pemerintah daerah pada Rabu 2 Februari 2022, ada empat lembaga internasional dari tiga negara, yakni UK *Climate Change Unit* (UKCCU) dan *Green Economy Growth* (GEG) dari Inggris, *United State Agency for International Development* (USAID) dari Amerika Serikat dan Rabo Foundation dari Belanda, didampingi Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yayasan Tekad bersama didampingi perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan ke Ransiki, Manokwari Selatan. Kunjungan tersebut untuk melihat dari dekat potensi perkembangan komoditas unggulan kakao, kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang akan didorong menjadi inkubator bisnis di daerah, melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam melakukan implementasi kolaborasi antara Program GEG-PEP dan TEKAD di Wilayah Papua Barat.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), dr. Hengky Tewu menyambut baik kunjungan tersebut dan memperkenalkan sekilas tentang Kabupaten Mansel dan juga



Dampingi Dirjen PPDT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), dr. Hengky Tewu saat menyimak penjelasan salah satu petani kakao di Kampung Nuhuway. DOK. BALITBANGDA PB

histori peralihan aset eks PT. Cokran, hingga terbentuknya Koperasi Ebier Suth yang kini telah menjadi PT. Eiber Suth. Hengky menguraikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Mansel akan membentuk kelembagaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk mendukung Koperasi (Ebier Suth) dalam pengembangan komoditas kakao secara profesional. Pemerintah Kabupaten Mansel dan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda dan Mitra Pembangunan juga akan memberikan dukungan terhadap pengembangan kakao di Kabupaten Mansel melalui dukungan pembangunan gedung inovasi kakao yang kedepannya akan menjadi kawasan terpadu untuk riset dan inovasi peningkatan produksi biji kakao dan produk olahan kakao.

Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Dr. Dwi Rudi Hartoyo, MS dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang menjadi atensi pimpinan antara lain program kerja sama Kemendes PDTT dengan GEG-PP akan berakhir pada Bulan September 2022, namun keberlangsungan dari program GEG ini tetap dilanjutkan oleh program TEKAD Kemendes.

Demikian juga untuk Program Ekonomi Hijau selanjutnya akan didukung oleh Pemerintah Kerajaan Inggris melalui kerja sama UKCCU-USAID dan Rabo Foundation (Belanda). Kemendes PDTT melalui TEKAD akan bersinergi mendukung pemerintah daerah terutama untuk kepada para Petani pada beberapa kampung di Kabupaten Mansel untuk mengembangkan komoditas kakao yang nantinya akan mendukung Ebier Suth.

Dari Kemendes PDTT melalui Pemerintah Daerah selanjutnya ada keinginan mendirikan Pusat Kakao di Mansel, nantinya ke depan juga akan ada pendirian sekolah kakao dan kopi seperti di Jember yang nanti menampung dan sekaligus menyiapkan bibit kakao supaya tidak kehilangan ciri khas dari Ransiki.

“Perlu studi bagaimana bibit yang baru ini bisa sama rasanya dengan pendahulunya. Sekaligus kita memikirkan bagaimana kita meningkatkan produksi kakao yang sudah ada. Pemerintah tolong perankan TEKAD dengan P3MD meskipun programnya sudah selesai namun keberlanjutannya dilanjutkan oleh teman-teman TEKAD untuk melakukan pendampingan kepada petani yang ada di

kampung-kampung,”ujarnya.

UKCUU, melalui Mr. Daniel Jones, Head of Sustainable Landscape Foreign, Commonwealth and Development menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan kemitraan spesial antara kemitraan Kemendes dengan Pemerintah Inggris. Kunjungannya ke Ransiki adalah untuk belajar dan melihat perkembangan yang ada di coklat Ransiki. Selain memastikan kelancaran produksi, ia juga ingin mengetahui bagaimana dengan dukungan yang selama ini diberikan oleh kemitraannya melalui ekonomi hijau dan rencana ke depan terkait kelembagaan ini.

Selanjutnya, USAID Indonesia yang diwakili oleh Amin Budiarjo, *Terrestrial Biodiversity Sector Lead*, Environment Office menyampaikan ada dua tujuan bersama Pemerintah Amerika dan Pemerintah Indonesia yaitu bagaimana meningkatkan manajemen hutan sehingga tidak ada lagi deforestasi, tidak ada lagi penebangan hutan, tetapi memanfaatkan area-area untuk menanam pohon-pohon keras, pohon kayu yang produktif seperti kopi dan pala. Juga terkait manajemen lahan yang benar



Kotak fermentasi kakao. DOK. BALITBANGDA PB

sehingga lahan yang ada dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi serta secara tidak langsung juga dapat mendukung prinsip-prinsip hijau. “Intinya kami juga ingin belajar dan melihat apa yang sudah ada di sini,” tandasnya.

Rabo Foundation yang diwakili oleh ibu Retno Dwi Jayanti mengatakan tujuan berkunjung ke Ransiki untuk melihat potensi yang ada dan membangun kolaborasi lebih jauh terkait perbaikan lahan tanaman kakao, juga terkait penguatan dari kelembagaan koperasi itu sendiri dan perbaikan sisi produksinya. “Kami juga butuh diskusi panjang bagaimana kita bisa lebih maju untuk rencana kegiatan ini. Kami ingin belajar lebih lanjut dan melihat keadaan di lapangan,” tuturnya.

Selanjutnya, Mr. Simon Field, *team leader* GEG, yang baru menjabat di program GEG satu bulan lalu, mengatakan dirinya sudah pelajari beberapa perkembangan, dan masih mau belajar bersama dan mencari informasi bagaimana GEG bisa bekerja sama dengan koperasi sampai akhir September 2022.

Sebelum balik ke Manokwari, rombongan juga berkunjung ke Kampung Nuhwey, Distrik Ransiki, untuk melihat progress program GEG yang telah dilakukan. Juga menyempatkan untuk berdialog langsung dengan petani yang menjadi binaan program GEG di kebun kakao. Rombongan juga

berkunjung ke lokasi pembangunan gedung inovasi kakao di Warnapi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda.

Haerul Arifin, S.Hut., M.Si. selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mengatakan bahwa pembangunan gedung inovasi ini merupakan tahap awal dari rencana pengembangan yang lebih besar mencakup

juga pembangunan fasilitas *Science Techno Park* (STP), lahan untuk plot pengamatan terkait riset dan inovasi peningkatan produksi dan pengembangan produk olahan kakao serta fasilitas publik pendukung lainnya yang nantinya akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balitbangda Provinsi Papua Barat.

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)



Gedung inovasi kakao di Ransiki, salah satu fasilitas Science Techno Park (STP). DOK. BALITBANGDA PB

Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Menyoroti Pemuda dan Potensi Komoditas Unggulan Daerah Papua Barat



Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama CEO Yayasan EcoNusa Bustar Maitar saat mendengarkan dengan seksama penjelasan Dirjen Kebudayaan Dr. Hilmar Farid. DOK. BALITBANGDA PB

Dalam beberapa kunjungan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hilmar Farid, Ph.D di Provinsi Papua Barat, Hilmar Farid juga mengagendakan khusus bertemu dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS.

Profesor Heatubun menyambut baik

kehadiran Dirjen Dr. Hilmar Farid dan tim, lalu memperkenalkan dan menyajikan informasi kinerja dan pencapaian-pencapaian Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui layar Dashboard Dasi Brida.

Dari beberapa penjelasan yang disampaikan Kepala Balitbangda, yang menarik perhatian Dr. Hilmar Farid, yaitu terkait fasilitasi bagi pemuda yang tergabung dalam kelompok wirausaha milenial. Papua

Muda Inspiratif menjadi salah satu sorotan kelompok pemuda yang sangat aktif berwirausaha di Papua Barat dalam setiap bidang yang mereka geluti.

Profesor Heatubun menjelaskan bahwa antusiasme pemuda di Papua Barat cukup tinggi, sehingga Pemda Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda membuat database Profil Usaha para pelaku usaha pemuda di Papua Barat bekerjasama dengan Mitra

Pembangunan, dan ini akan mempermudah intervensi pemerintah daerah sesuai dengan tupoksi dari masing-masing OPD dan para pihak lainnya di Provinsi Papua Barat.

Perhatian lain dari Doktor Farid dan tim yaitu bagaimana pengembangan komoditas unggulan daerah seperti Pala, Kopi dan Kakao. Sambil menyajikan produk olahan dari komoditas-komoditas itu, Profesor Heatubun menjelaskan bahwa Pemerin-

Tanah Papua”, jelas Profesor Heatubun.

Selain itu juga Kepala Balitbangda menyinggung terkait pengembangan konsep Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Papua Barat, dimana ini menjawab pertanyaan penting Dirjen Kebudayaan terkait keberadaan spesimen-spesimen perkehidupan alam (*natural history*) Tanah Papua saat ini, yang saat ini tersimpan dan terpencair di beberapa lembaga, salah satu-

berguna bagi generasi yang akan datang.

Hal ini menjadi catatan khusus Dirjen untuk kedepan akan terus berkoordinasi dengan Balitbangda Papua Barat dalam pengembangan potensi-potensi daerah baik sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusianya.

Selanjutnya Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama CEO Yayasan EcoNusa



Penyerahan Hasil Diseminasi Kelitbang Provinsi Papua Barat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS kepada Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Hilmar Farid, Ph.D dan tim. DOK. BALITBANGDA PB

tah Provinsi Papua Barat telah membentuk tim Satgas Komoditas Unggulan Daerah Non Deforestasi dengan tujuan untuk memfasilitasi dan menyatukan seluruh proses pengembangan dan juga keterlibatan semua Mitra Pembangunan untuk mendukung masyarakat mulai dari hulu sampai hilir.

“Ini merupakan bagian dari proses memperbaiki dan menjaga relasi yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan Mitra Pembangunan untuk melindungi kekayaan

nya di Universitas Papua, Manokwari.

Profesor Heatubun menjelaskan, dalam proses percepatan pembangunan KSPN ini, salah satunya adalah tentang pendirian museum sejarah alam (*natural history museum*) di Kawasan Hutan TWA Gunung Meja, Manokwari. Rencana pembangunan museum ini adalah untuk menyimpan spesimen-spesimen rujukan (*reference collections*) yang kemudian hari akan menjadi warisan ilmu pengetahuan dan

Bustar Maitar yang juga mendampingi kehadiran Dirjen Kebudayaan Dr. Hilmar Farid dan tim, mengundang mereka menikmati olahan salah satu produk komoditas unggulan daerah non-deforestasi Papua Barat, yaitu Kopi Arabika Anggi dan Kopi Arabika Minyambouw di café Matoa yang dikelola oleh anak-anak muda Papua yang tergabung dalam Koperasi Bekal dan perkumpulan Bentara Papua.

● Penulis : Arissa M. (Balitbangda PB)

Dominggus Mandacan

Diabadikan Sebagai Nama Pada Lahan Kebun Kakao Milik Klasis Ransiki, Manokwari Selatan



Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan rombongan saat disambut oleh tarian Tumbuk Tanah. DOK. BALITBANGDA PB

Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan bahkan sudah menjadi perhatian dunia sampai saat ini karena berkomitmen untuk menjaga keutuhan hutan hingga 70% dari luas keseluruhan wilayah Papua Barat. Menjadi provinsi yang berkelanjutan, Papua Barat terus mendorong pengembangan berbagai

komoditas lokal yang ada. Salah satu komoditas yang hingga saat ini dikembangkan dan sudah menjadi *brand* di Papua Barat adalah Kakao Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

Pada tahun 2020, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan dana untuk membantu petani coklat di Kabupaten Manokwari Sela-

tan dengan membuka lahan baru seluas 100 ha dan juga oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat seluas 100 ha. Namun dengan adanya pandemi Covid-19, maka terjadinya *refocusing* anggaran dan berdampak pada semua sektor termasuk sektor pertanian di Provinsi Papua Barat, baik APBD maupun APBN, sehingga bantuan 100 ha dari Kementerian Pertanian, hanya

Salah satu komoditas yang hingga saat ini dikembangkan dan sudah menjadi brand di Papua Barat adalah Kakao Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.

bisa dimanfaatkan 40 ha pada tahun 2020 serta 100 ha dari Provinsi Papua Barat juga hanya bisa dimanfaatkan 40 ha. Jadi total ada 80 Ha lahan kebun coklat yang sudah ditanami.

Pada APBD tahun 2022 Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan 100 Ha khusus untuk penanaman coklat di Kabupaten Manokwari Selatan, melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Papua Barat, termasuk 3 Ha yang dimiliki GKI Klasis Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan.



Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si saat menyampaikan sambutan. DOK. BALITBANGDA PB



Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dengan resmi membuka Papan Pencanangan Kebun Coklat GKI di Tanah Papua. DOK. BALITBANGDA PB

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si ketika mencanangkan Gerakan Tanam Bibit Kakao dan Buah Naga di Kebun Coklat Gereja Kristen Injili (GKI) Ransiki Manokwari Selatan (4/2/2022) mengatakan bahwa potensi lahan pertanian Provinsi Papua Barat adalah seluas 2.869.411 Ha, sementara di Kabupaten Manokwari Selatan potensi luas lahan yang dapat dimanfaatkan adalah 1.668 Ha. Ini, bisa ditanami coklat dan tidak menutup

kemungkinan komoditas unggulan daerah lainnya bisa di kembangkan, seperti kopi, ubi-ubian dan buah buahan. "Saya minta agar lahan ini dapat dioptimalkan dengan baik, supaya memberikan manfaat bagi Jemaat, Gereja dan daerah ini," tambah Gubernur Mandacan.

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan bahwa akan melengkapi fasilitas atau peralatan penunjang, mulai dari proses budidaya

tanam (*on farm*) sampai produksi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan lokal, industri, maupun permintaan ekspor.

Sebelum mengakhiri sambutan, Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, penca- nangan ini adalah wujud dari pelayanan, bahwa gereja dan jemaat tidak hanya melak- sanakan penaburan benih injil, tetapi gereja juga ikut melakukan taburan benih tanam yang kelak bertumbuh, kemudian akan menjadi sumber pangan untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan gizi warga jemaat dan meningkatkan pendapatan eko- nomi warga jemaat.

Sementara itu, Ketua Klasis Ransiki Kabu- paten Manokwari Selatan, Pdt. Frans Mofu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua Barat. “Dengan kesempurnaan visi dan misi sederhana Bapak Gubernur Dominggus Mandacan, yaitu “Membangun dengan Ha- ti dan Mempersatukan dengan Kasih” te- lah menjadi inspirasi terpenting untuk pembangunan Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Barat, ucap Ketua Klasis.

Pdt. Mofu juga mengatakan mengatakan bahwa penca- nangan ini adalah sejarah bagi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dimana Ketua Sinode yang pertama Tuan Pdt. F.J.S. Romainum sebelum menjadi Ketua Sinode, adalah mandor kebun milik Nipon (Jepang) di Distrik Momiwaren selama 3 tahun dan dalam masa kepemimpinannya ada hal penting yang ditanamkan yaitu kerendahan hati dan penyerahan hidup yang total kepada Tuhan serta kepada penduduk di Tanah Papua. “Maka kita akan mengalami ke- majuan-kemajuan yang hebat,” ujarnya.

“Inspirasi ini akan terus dilanjutkan dan menjadi motivasi bagi Jemaat di GKI Kla- sis Ransiki,” serta program ini menjadi perhatian GKI di Tanah Papua sebagai bentuk Pekabaran Injil, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang berada di Kabupaten Ma- nokwari Selatan, tutup Pdt. Mofu.

Adapun berbagai upaya yang sudah dilak- ukan pemerintah antara lain menyiapkan bibit unggul dalam rangka peremajaan, pembersihan kebun (sanitasi), perluasan area tanam baru, bantuan peralatan budidaya



Penanaman bibit Kakao secara simbolis oleh Gubernur Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

dan pasca panen serta sedang dalam proses pembangunan industri pengolahan biji kakao. Koordinasi dan perpaduan kinerja antar berbagai stakeholder termasuk lem- baga keagamaan terus di sinergikan untuk menggerakkan potensi yang dapat men- dorong pembangunan pertanian yang maju,

mandiri dan modern.

Adapun luas lahan yang dimiliki adalah tiga ha, dimana dua ha lahan berada di Klasis Ransiki dan satu ha lagi di Distrik Momiwaren.

● Penulis : Yohanis P. (Balitbangda PB)

Pengembangan Konten Digital Menjadi Bagian Universal di Semua Kalangan



Foto bersama Poster Noken Rahim Kedua dan Jam'U yang adalah serial film dokumenter dan animasi Tanah Papua. DOK. BALITBANGDA PB

Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Konten pada media ini dapat diartikan sebagai suatu alat yang menjadi media berkomunikasi antar pengguna media elektronik. Dengan perkembangan teknologi dan internet saat ini, maka hadirilah yang kemudian disebut dengan konten digital. Konten digital sendiri adalah konten dalam berbagai format yang diubah ke bentuk digital sehingga dengan mudah dapat dibagikan melalui berbagai jenis perangkat atau gadget. Misalnya melalui media sosial, di messenger seperti *WhatsApp* dan *Line*, atau bisa pula antar *smartphone*.

Salah satu bentuk pengembangan konten digital yang juga dapat menjadi media sarana

informasi yaitu berupa film dokumenter. Upaya pengembangan ini diantaranya dilakukannya kegiatan Workshop dan Pemutaran Film Dokumenter *Noken Rahim Kedua* yang diselenggarakan oleh TOP (Torang Orang Papua) Production.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS Dalam Sambutannya mewakili Gubernur Papua Barat, memberikan apresiasi yang tinggi atas kegiatan yang diselenggarakan oleh TOP Production Manokwari ini, karena sangat bermanfaat bagi anak muda dan secara umum bagi warga Manokwari. "Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kepedulian TOP Production dan Imaji Papua dalam membuat film berjudul "*Noken Rahim kedua*" yang

telah masuk nominasi Piala Citra kategori film dokumenter Pendek Terbaik dari Papua".

Prof. Heatubun menambahkan bahwa Balitbangda sendiri sudah melakukan fasilitasi belajar konten digital dengan membuat berita pendek dan editing video singkat menggunakan *handphone* (HP). Saat ini pengembangan konten digital sangat dibutuhkan bukan hanya oleh perorangan tertentu saja namun sudah menjadi bagian universal di semua kalangan baik masyarakat umum maupun instansi-instansi teknis lainnya dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas kerjanya dalam bentuk berita atau video ke publik.

Kepala Balitbangda merasa bangga akan film yang diputar oleh TOP Production memperlihatkan bagaimana hubungan kedekatan

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat menyampaikan sambutan dalam pembukaan workshop produksi film dokumenter dan konten kreatif.

DOK. BALITBANGDA PB

antara kita manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia sebagai sebuah ikatan sosial, tetapi itu juga dilambangkan dengan noken sebagai salah satu maha karya budaya kebendaan yang terlihat di dalam film noken Rahim kedua. Beliau mengapresiasi capaian Imaji Papua yang telah mendedikasikan diri dan juga berkarya bagi Tanah Papua, Bangsa dan Negara serta Kemanusiaan. Banyak nilai filosofi yang sangat dalam terkandung dari isi cerita dan representasi noken dalam adat dan budaya masyarakat Papua, terutama suku Hubula di Lembah Baliem.

Selanjutnya, Elly Krey pengrajin karya seni dan budaya Papua meminta kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk memberikan wadah (sekolah khusus seni dan budaya) bagi para penggiat seni dan budaya di Provinsi Papua Barat, sehingga dunia luar bisa mengenal jati diri Orang Papua. "Masih banyak budaya yang belum diangkat, selain noken jadi perlu dibangun sekolah seni di Provinsi Papua Barat agar dikenal lebih luas lagi tentang budaya Papua" tambahnya.

Lebih lanjut Ketua Fraksi OTSUS DPR



Papua Barat, George Dedaida memberikan apresiasi yang tinggi dan mengharapkan agar potensi budaya bukan hanya di Papua saja yang divisualisasikan dalam bentuk film, namun potensi Budaya Papua Barat juga ikut serta di dalamnya, baik dalam bentuk film dokumenter maupun film animasi.

Yulika Anastasia Indrawati selaku produser Imaji Papua dan juga sutradara dari film Noken Rahim Pertama dan Noken

Prof. Heatubun menambahkan bahwa Balitbangda sendiri sudah melakukan fasilitasi belajar konten digital dengan membuat berita pendek dan editing video singkat menggunakan handphone (HP).



Profesor Heatubun ketika membubuhkan tanda tangan di atas poster Noken Rahim Kedua dan poster film animasi karya Imaji Papua. DOK. BALITBANGDA PB

Rahim Kedua mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan Forkopimda Papua Barat dan peserta yang hadir mengambil bagian dalam *workshop* ini. Sutradara yang biasa di sapa dengan Mbak Yulika ini menjelaskan tentang film dokumenter yang dibuat ini hanya 4 hari namun proses riset dan pengeditannya memakan satu setengah tahun (riset satu tahun dan edit 6 bulan), karena terkendala dengan Pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia. "Film dokumenter ini penting untuk diproduksi, karena nilai dokumenter itu akan selalu ada dan akan menjadi warisan bagi generasi berikut baik 50 hingga 100 tahun yang akan datang." Tandanya.

● Penulis : Christ M. (Balitbangda PB)



Foto bersama setelah penyerahan cendera mata. DOK. BALITBANGDA PB

Tunggu Rekomendasi Pemda Papua Barat: PKT Siap Bangun Kawasan Industri Petrokimia

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS menerima kunjungan kerja PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di di Manokwari, Senin (21/2/2022). Kunjungan kerja PT. PKT secara khusus ke Balitbangda adalah untuk menjalin silaturahmi dan juga berdiskusi sekaligus saling memberikan

informasi tentang rencana pengembangan PKT di Provinsi Papua Barat.

Di awal pertemuan, Teguh Ismartono selaku sekretaris yang juga sebagai pimpinan rombongan menjelaskan secara umum bahwa tujuan pembangunan pabrik petrokimia di Teluk Bintuni adalah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Timur

Indonesia. Pabrik yang akan dibangun dengan kapasitas produksi amonia sebesar 2.000 ton/hari, kapasitas produksi metanol sebesar 3.000 ton/hari, dan urea dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 ton/hari. Pada kesempatan ini, Teguh juga menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dengan Wakil Gubernur Papua Barat dan pimpinan OPD terkait. "Kami telah berdiskusi terkait rencana pengembangan dan pembangunan perusahaan serta lokasi. Untuk lokasi ada beberapa alternatif yang akan menjadi lokasi pembangunan perusahaan PKT diantaranya Teluk Arguni, Karas dan Goras," jelasnya.

Teguh menyampaikan rencana awal lokasi pembangunan pabrik Petrokimia, Kawasan Industri Petrokimia Urea dan Metanol akan dibangun di Kabupaten Teluk Bintuni karena didukung oleh aspek *onshore* (darat) namun dari aspek *offshore* (lepas pantai) sangat tidak mendukung, sehingga harus mencari



Profesor Heatubun saat menerima tim kerja PT. PKT di salah satu Hotel berbintang di Manokwari. DOK. BALITBANGDA PB

lokasi alternatif lain. Ada beberapa alternatif yang sudah kami kaji, tapi dari segi ekonomi sangat membutuhkan biaya infrastruktur yang terlalu besar, ungkap Teguh.

Sekretaris perusahaan itu juga menambahkan bahwa dari hasil diskusi sebelumnya dengan Wakil Gubernur dan OPD terkait, setelah mempertimbangkan berbagai faktor dari beberapa lokasi alternatif diatas, maka muncul usulan lokasi yang dapat dijadikan lokasi alternatif, yaitu di Goras, Kabupaten Fakfak. Lokasi ini kemudian menjadi target kami untuk dikaji kemudian, tambah. Untuk itu, kami ber-

harap dengan kunjungan ini, PT. PKT mendapatkan banyak masukan-masukan penting maupun rekomendasi terkait pembangunan PT. PKT dan juga memungkinkan adanya sinergitas antara PKT dan Balitbangda kedepannya.

Menyikapi paparan singkat dari pimpinan rombongan PT. PKT, Prof. Heatubun mengatakan bahwa "Harus ada tim terpadu dari PT. PKT dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk percepatan prakondisi pembangunan kawasan industri." Selain itu, juga sangat penting melibatkan Pemerintah

Provinsi, "Kawasan industri tersebut akan berhubungan langsung dengan Pemerintah Kabupaten dan juga masyarakat adatnya, oleh karena itu keterlibatan Pemerintah Provinsi sangat penting, terutama proses koordinasi, sosialisasi/diseminasi dan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten, masyarakat adat pemilik ulayat guna menghindari kemungkinan timbul masalah dikemudian hari nantinya" ucap Heatubun.

Untuk itu, hasil kajian calon lokasi pembangunan dapat disampaikan juga ke Balitbangda sehingga dapat menjadi bahan telaahan kepada Gubernur, tambahnya.

Profesor Heatubun mengatakan kepada seluruh rombongan kunjungan kerja yang terdiri dari sembilan orang bahwa saat ini pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat, pada sektor ekonomi prioritasnya dengan mengedepankan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi kreatif, tutupnya. Prof. Heatubun juga menyerahkan beberapa hasil publikasi buku-buku Kelitbangan dan Inovasi daerah, Majalah Kasuari Inovasi dan Jurnal Ilmiah Igya Ser Hanjop Pembangunan Berkelanjutan, serta salah satu produk pengembangan ekonomi hijau di Papua Barat yaitu kopi Anggi kepada tim.

● Penulis : Christ M. (Balitbangda PB)

"Kami telah berdiskusi terkait rencana pengembangan dan pembangunan perusahaan serta lokasi. Untuk lokasi ada beberapa alternatif yang akan menjadi lokasi pembangunan perusahaan PKT diantaranya Teluk Arguni, Karas dan Goras," jelas Teguh.



Suasana Pertemuan oleh tim kerja PT. PKT bersama Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan staf. DOK. BALITBANGDA PB

Balitbangda Cup Usia 40 : Membangun Serta Menjaga Kemitraan Antar OPD Melalui Olahraga



Acara penutupan Mini Turnamen Balitbangda Cup U-40. DOK. BALITBANGDA PB

Turnamen ini diikuti oleh tujuh tim yang berasal dari seputaran Manokwari Raya. Tujuh tim tersebut diantaranya dari ASN Setda Kabupaten Manokwari, PS. Pemda Pegaf, All Star UNIPA, Setda Provinsi Papua Barat, ASN Provinsi Papua Barat, Setda Kabupaten Teluk Wondama dan Legend Perseman 86. Turnamen ini perdana dilaksanakan pada Sabtu, 2 April 2022 dan diselenggarakan selama satu bulan dengan setiap pertandingannya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu untuk setiap pekan.

Turnamen ini sepenuhnya disponsori oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat. Usulan yang diberikan oleh sekelompok ASN pecinta sepak bola ini mendapat respon positif dari Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si saat menerima usulan tersebut.

Profesor Heatubun saat diwawancarai mengatakan bahwa "Saya rasa turnamen ini bukan hanya sebatas game, olahraga maupun hobi tetapi dengan turnamen ini dapat

Mini Turnamen Balitbangda Cup U-40 merupakan Turnamen hasil inisiatif dari sekelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) pecinta sepak bola yang bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dilaksanakannya Turnamen ini adalah untuk saling mengenal dan menjalin kebersamaan antara pemain sepakbola, menjaga kebugaran, menghindari stress pekerjaan kantor dan sebagai sarana untuk membangun komunikasi/koordinasi/relasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. Usia pemain yang bertanding pada turnamen ini terdiri dari dua kategori yaitu, 40 tahun ke atas dan usia 35-39 tahun.



Penyerahan piala dan uang pembinaan kepada salah satu perwakilan dari tim ASN Papua Barat yang keluar sebagai pemenang turnamen. DOK. BALITBANGDA PB

meningkatkan relasi dan menjalin kemitraan antar OPD, OPD dengan masyarakat maupun antar pemda provinsi dengan kabupaten”, oleh karena itu Balitbangda Provinsi Papua Barat mendukung penuh pelaksanaan Turnamen ini.

Setelah melewati berbagai pertandingan, akhirnya puncak dari Mini Turnamen Balitbangda Cup U-40 mempertemukan tim ASN PB vs SETDA PB di partai Final pada Minggu 15 Mei, 2022 di Lapangan Borarsi Manokwari. Dari hasil pertandingan tersebut, tim ASN PB keluar sebagai Juara I, diikuti oleh Setda PB Juara II, UNIPA All Star juara III, Setda Kabupaten Manokwari Juara IV, Pemda Pegunungan Arfak Juara V dan Perseman Legend sebagai Juara VI. Selain itu, keluar sebagai pemain inspiratif yaitu Yosias Saroy, SH, MH selaku kapten tim Pemda Pegaf yang juga merupakan Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak. Sosok kepala daerah ini mau turun lapangan, bergabung dengan tim



Pemda Pegaf membawa nama daerah yang dipimpinnya untuk bertanding. Ini menjadi inspiratif bagi pemimpin-pemimpin lainnya karena dengan contoh tersebut, jarak yang biasanya terbentuk di lingkungan kerja antara pimpinan dan staf dapat dihilangkan sehingga komunikasi yang terbatas menjadi lebih akrab lagi antara pimpinan dan staf.

Turnamen ini kiranya dapat menjadi inisiator, motivasi dan semangat bagi OPD terkait dan pihak-pihak lain untuk dapat menyelenggarakan turnamen yang sama.

● Penulis : Ishak A. (Balitbangda PB)

Aksi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa saat berebut bola dengan salah satu pemain Legenda Perseman Manokwari.
DOK. BALITBANGDA PB



Salah satu aksi Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy saat pertandingan melawan tim UNIPA dalam turnamen Balitbangda Cup U-40.
DOK. BALITBANGDA PB

Kolaborasi Balitbangda Provinsi Papua Barat dan The Samdhana Institute

Fasilitasi Pendaftaran HKI di Kota Sorong



Proses fasilitasi pendaftaran HKI pada hari pertama. DOK. BALITBANGDA PB

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Kanwil Kemenkumham Papua Barat) pada tahun 2020 sejak penandatanganan Nota Kesepahaman bersama pada tanggal 21 Juli 2020 di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas Kekayaan Intelektual masyarakat di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2020, Balitbangda telah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual masyarakat sebanyak

21 kekayaan intelektual yang terdiri dari 11 Merek, 6 Hak Cipta, 2 Desain Industri dan 2 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sedangkan pada tahun 2021 hingga bulan Juni 2022, ada 41 hak kekayaan intelektual telah didaftarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dan 11 diantaranya merupakan Kerjasama dengan The Samdhana Institute.

Fasilitasi Pendaftaran HKI dilaksanakan dalam 2 (dua) pertemuan yang pertama ialah sosialisasi dan pendataan serta yang kedua ialah verifikasi berkas dan pendaftaran. Sosialisasi dan pendataan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 di Mansinam Beach Hotel, Manokwari sedangkan verifikasi dan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2021 di Mansinam Beach Ho-

tel, Manokwari serta Kerjasama Balitbangda dengan The Samdhana Institute melaksanakan *Coaching Clinic*, Asistensi dan Pendaftaran HKI pada tanggal 12 – 13 April 2022 di Kampung Noken, KM. 13 Kota Sorong.

Pada pertemuan sosialisasi dan pendataan kekayaan intelektual yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2021 di Mansinam Beach Hotel Manokwari, Gubernur Papua Barat mengatakan kekayaan Intelektual harus dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan terpadu agar dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat dengan tidak merusak hutan. Tahun 2020, saya juga memberikan penghargaan kepada Bapak Yance Rumbino atas ciptaan lagu Tanah Papua yang telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan menjadi lagu resmi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga saya telah menerima beberapa sertifikat kekayaan intelektual dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat diantaranya Sertifikat Hak Cipta Lambang Daerah Provinsi Papua Barat, Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional yaitu Rumah Adat Kaki Seribu Suku Arfak. Pengetahuan Tradisional Tarian Tumbu Tanah Suku Arfak, Igya Ser Hanjop, Buah Hitam dan Makanan Tradisional sagu Buah Hitam dari Kabupaten Teluk Wondama. Piagam Pencatatan Indikasi Geografis yaitu Buah Merah Bintuni, Kopi Arabica Anggi dan Kakao Ransiki serta petikan sertifikat merek dagang Papua Faholo Wabur atas nama Bapak Herman Baru di Kota Sorong ucap Gubernur. Lebih lanjut pada kesempatan tersebut Gubernur menitipkan amanah kepada para bupati dan walikota beserta jajarannya untuk melindungi kekayaan intelektual di daerah masing melalui proses pendaftaran pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

HKI YANG DIDAFTARKAN PADA PERIODE 2021 - JUNI 2022

No.	Nama HKI	Pemilik	Fasilitator	Status
1.	Buku Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat	BALITBANGDA	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
2.	Buku Kajian Bidang Ekonomi : Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat	BALITBANGDA	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
3.	Buku Orang Asli Papua Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi di Kepala Burung Papua	BALITBANGDA	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
4.	Lagu Hey Tayo	Alfreth Bennyamin kambu/ Irian Jaya 95 (BBC)	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
5.	Lagu sa bukan kaleng kaleng	Alfreth Bennyamin kambu/ Irian Jaya 95 (BBC)	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
6.	Lagu crazy ko	Alfreth Bennyamin kambu/ Irian Jaya 95 (BBC)	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
7.	Lagu bucin	Alfreth Bennyamin kambu/ Irian Jaya 95 (BBC)	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
8.	Lagu masih terbayang	Alfreth Bennyamin kambu/ Irian Jaya 95 (BBC)	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
9.	Tari City Demands	Dedi Ronald Maniakori	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
10.	Tari Chameleon	Dedi Ronald Maniakori	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
11.	Tari Sigemerai " (kayu besi)	Erikxon Frits Kindewara	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
12.	Lagu Mami Pipa	Mambri Sroyer	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
13.	Lagu Sa Rindu Ko Skali	Mambri Sroyer	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
14.	Lagu Bila Kitong Dua Jumpa Lagi	Mambri Sroyer	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
15.	Lagu Aroro Iroro	Mambri Sroyer	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
16.	Lagu Give Me Another Chance	Mambri Sroyer	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
17.	Motif Fara /cumu-cumi	Hengki Hein Wonsiwor	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
18.	Motif Waumis / Teteruga Sisik	Hengki Hein Wonsiwor	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
19.	Motif Waupakpur/Teteruga Ikan	Hengki Hein Wonsiwor	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
20.	Motif Manswar	Hengki Hein Wonsiwor	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
21.	Tari RI Mamuna Kuri Pasai	George Wilem Yomaki	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
22.	Tari RI Somsen/Peyambutan	George Wilem Yomaki	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit

No.	Nama HKI	Pemilik	Fasilitator	Status
23.	Tari Ri Piworotu/Tari Tifa	George Wilem Yomaki	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
24.	Lagu Indonesia Rumah Kita	Yance Malagifik	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
25.	Buku Mamberamo	Alberth Yomo	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
26.	Motif Anak Panah	PHILIPUS AURI	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
27.	Motif Bunga Putri	PHILIPUS AURI	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
28.	Motif Bunga Raya	PHILIPUS AURI	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
29.	Motif Burung Merpati	PHILIPUS AURI	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
30.	Motif Gurita	PHILIPUS AURI	BALITBANGDA	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
31.	Motif Cenderawasih Sedang Meniup Suling di Atas Tifa	Mika Duwit	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
32.	Lagu Pau Maladum	Oktovianus Malagifik	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
33.	MOTIF KARWAR ARBUR KE 2	DAVID WOMSIWOR	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
34.	MOTIF NAKOR KORBEN (GIGI NAGA)	DAVID WOMSIWOR	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
35.	Motif Karwar Arbur	DAVID WOMSIWOR	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
36.	Motif Pohon Sagu yang sudah berbuah	DAVID WOMSIWOR	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
37.	Motif Embusan	DAVID WOMSIWOR	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
38.	MOTIF KATAWE	MERIYONES FAMI	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
39.	MOTIF KEIK MOI	MERIYONES FAMI	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
40.	MOTIF MISTERI KEHIDUPAN	FLORIDA REBA	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Terdaftar/Sertifikat Sudah Terbit
41.	MEREK KEIK KUOK MOI	FEBRIANI SPRITIA WALLY	BALITBANGDA dan The Samdhana Institute	Dalam Proses/ Sertifikat Belum Terbit



Salah satu peserta, Bapak Oktovianus Malagifik yang menciptakan lagu Pau Maladum asal daerah Sorong yang sudah melakukan pendaftaran HKI. DOK. BALITBANGDA PB



Proses pendaftaran HKI hari kedua. DOK. BALITBANGDA PB

Kolaborasi Bersama The Samdhana Institute

Kolaborasi Bersama The Samdhana Institute merupakan bentuk Kerjasama dengan Mitra Pembangunan di bidang kekayaan intelektual yang baru pertama kali dilaksanakan melalui kegiatan *Coaching Clinic*, Asistensi dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Tahun 2022 dengan tujuan untuk memfasilitasi Pendaftaran HKI buah karya para pengrajin, seniman dan budayawan Papua dan juga sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Women Summit 20 (W-20) di Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 12 – 13 April 2022 di Kampung Noken, KM. 13 Kota Sorong. Secara luring di hadir oleh staf Balitbangda, The Samdhana Institute dan para pengrajin, seniman dan budayawan papua serta secara daring dihadiri oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si dan Pimpinan The Samdhana Institute. Dalam sambutannya Prof. Heatubun mengatakan HKI merupakan hasil dari olah pikir dan kreativitas manusia yang terkait dengan komunitas, adat dan budaya. Semua potensi ini memiliki nilai ekonomi. Apabila tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka di kemudian hari bisa menimbulkan masalah jika hasil karya ini bisa diklaim oleh pihak lain sebagai milik mereka dan dikomersialisasikan, yang artinya bisa dijual untuk kepentingan industri, pertunjukan atau urusan seni budaya lainnya. Perlindungan HKI juga merupakan bagian dari bagaimana kita menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya hasil karya umat manusia yang menjadi identitas suku-suku di Tanah Papua.



Proses pendaftaran HKI hari kedua oleh Balitbangda Papua Barat dan Mitra Pembangunan Samdhana. DOK. BALITBANGDA PB

Pada kegiatan tersebut, sekitar sembilan karya milik lima pengrajin, seniman dan budayawan di Kota Sorong mendaftarkan karya mereka untuk dilindungi. Enam pengrajin, seniman dan budayawan yang mendaftarkan HKI antara lain: Ibu Florida Reba mendaftarkan design motif kain, Ibu Febriyani Wally mendaftarkan merek dagang, Ibu Meriyones Fami mendaftarkan motif tenun dan motif batik khas suku Moi, Bapak David Womsiwor mendaftarkan motif batik dan gambar ukiran khas suku Biak, Bapak Oktovianus Malagifik mendaftarkan lagu ciptaannya "Pau Maladum" dan Cerita Rakyat, dan Bapak Petrus Amsamsium, mendaftarkan motif batik tulis khas suku Biak.

Kekayaan intelektual merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Balitbangda dan juga kerjasama ini juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Balitbangda sebagai koordinator Mitra Pembangunan di Provinsi Papua Barat. Kerjasama ini akan terus dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan beberapa agenda diantaranya melakukan FGD/Talk Show dan Menoken *Online* tentang Kekayaan

Intelektual, *Coaching Clinic*, Asistensi dan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) buah karya para pengrajin, seniman dan budayawan papua di semua kabupaten dan kota, menyusun regulasi setingkat Peraturan Gubernur tentang SOP tata cara verifikasi HKI Komunal Masyarakat Adat sebagai turunan dari Raperdasus Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua.

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah banyak melakukan langkah-langkah maju dalam membangun legalitas dan layanan pendaftaran HKI yang lebih optimal. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda Papua Barat dan *stakeholder* terkait telah Menyusun Raperdasus Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua, mendorong terbentuknya Kantor khusus yang bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pemanfaatan HKI dan menciptakan Inovasi Pelayanan Publik tentang Fasilitasi Pendaftaran HKI dengan Judul "Jemput Koper" dan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual (SINDI) melalui website <https://hakibridapb.com>.

● Penulis : Viktor K. (Balitbangda PB)



Penjemputan Pejabat Gubernur Papua Barat

Pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si dan Nyonya Roma Waterpauw telah tiba di Bandara Rendani Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Kamis (19/5/2022) dan disambut mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si bersama Nyonya Juliana Mandacan, serta Mohamad Lakotani, SH, M.Si bersama Nyonya Lani Lakotani, serta Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si.

Tarian adat dari Fakfak dan Kaimana menyambut kedatangan Paulus Waterpauw, ibu dan rombongan dari Jakarta. Kepala Suku Besar Fakfak-Kaimana menyerahkan Penjabat Gubernur Papua Barat kepada Kepala Suku Besar Arfak dan Pemerintah Papua Barat yang diterima baik oleh Nataniel Mandacan. Ikut dalam rombongan penjemputan Bupati Manokwari, FORKOPIMDA Provinsi Papua Barat, sejumlah pimpinan OPD dan masyarakat turut menyambut kehadiran Penjabat Gubernur Papua Barat ini. Setelah beristirahat sejenak di Ruang VIP Bandara Rendani dan pejabat gubernur Papua Barat melakukan serah terima jabatan yang akan dilaksanakan di Auditorium PKK Arfai Papua Barat pada Jumat 20 Mei 2022.

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)

Suasana penjemputan Pj. Gubernur Papua Barat oleh Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, Mohamad Lakotani, SH, M.Si, Sekretaris Daerah Dr. Nataniel D. Mandacan, M.Si, serta Forkopimda Papua Barat di Bandara Udara Rendani Manokwari yang diwarnai dengan berbagai tarian dari daerah Kepala Burung, Papua Barat.

DOK. BALITBANGDA PB

Ini adalah masalah yang serius, bila dilihat potensi penduduk Indonesia sebesar 20% dari 260 juta penduduk, cukup besar penduduk yang berpotensi mengalami gangguan mental. Layanan kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas belum dimanfaatkan oleh masyarakat, karena mereka berpikir layanan itu untuk orang yang sakit jiwa, yang kita kenal dengan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Pada dasarnya, layanan kesehatan jiwa yang ada di Puskesmas diperuntukkan bagi masyarakat umum yang sehat maupun sakit. Minimnya informasi yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu penyebab, layanan ini tidak dimanfaatkan secara baik.

Dengan adanya sosialisasi yang diberikan pada kader dan keluarga, diharapkan, layanan kesehatan jiwa di Puskesmas dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sehat maupun yang mengalami permasalahan psikososial, serta yang mengalami gangguan kesehatan mental. Konflik-konflik keluarga dan interaksi keluarga yang negatif dapat menumpuk *stress* pada anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga meningkatkan resiko gangguan tersebut.

Salah satu tugas keluarga di bidang kesehatan adalah memelihara kesehatan anggota

ga agar kondisi gangguan jiwa tidak makin parah. Sekarang ini kebanyakan pasien diterapi sudah dalam kondisi parah. Menurut WHO, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta orang terkena *skizofrenia*, serta 47,5 juta terkena demensia.

Di Indonesia, kondisi kesehatan jiwa masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal. Padahal secara jumlah, penderita gangguan jiwa terus meningkat. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 23,6 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami pasung.

Gangguan jiwa dipicu oleh berbagai faktor antara lain faktor biologis (seperti faktor bawaan, penyakit infeksi virus, malaria cerebral, penyakit degeneratif, kecelakaan di kepala), faktor psikologis (kepribadian kurang matang, trauma psikologis masa lalu, konflik batin, dan keinginan yang tidak tercapai sehingga menimbulkan frustrasi), faktor sosial (masalah hubungan dalam keluarga, konflik dengan orang lain, masalah ekonomi, pekerjaan dan tekanan dari lingkungan sekitar, hingga keadaan bencana).

Pencegahan primer merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Pencegahan primer sendiri adalah peningkatan kesehatan dan pencegahan terjadinya gangguan jiwa yang meliputi; pendidikan kesehatan, sosialisasi, manajemen stress, persiapan menjadi orang tua, dukungan sosial, pencegahan dan penyalahgunaan zat, peningkatan koping yang adaptif untuk meminimalkan gangguan jiwa.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mendefinisikan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Terdapat beberapa isu strategis terkait masalah kesehatan jiwa, antara lain:

a. Anggaran untuk pencegahan dan pe-



Suasana sosialisasi kesehatan jiwa bagi keluarga beresiko di Kampung Arowi.
DOK. RUTH FAIDIBAN

Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi tentang kesehatan jiwa dan pencegahan primer pada 4 kader dan 10 keluarga beresiko menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa masih rendah. Dari wawancara dan pengkajian yang dilakukan, didapatkan bahwa ada 4 keluarga dari 10 keluarga beresiko yang memiliki anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan jiwa, yaitu depresi, retardasi mental, gangguan perilaku dan penyalahgunaan alkohol. Pengkajian lebih lanjut sangat perlu dilakukan agar dapat memberi terapi yang tepat bagi anggota keluarga yang bermasalah.

keluarganya dan memberi perawatan serta dukungan kepada anggota keluarga yang sehat maupun sakit sehingga terhindar dari kecacatan. Dukungan keluarga merupakan salah satu dukungan sosial yang terdapat dalam masyarakat dimana dukungan ini ialah suatu proses hubungan antara keluarga dengan lingkungan sosialnya. Permasalahan gangguan jiwa dapat terjadi mulai dari masa anak, remaja, dewasa dan usia lanjut jika tidak ditanggulangi atau diobati akan menyebabkan gangguan jiwa berat yang menyebabkan turunnya produktivitas dan membebani keluarga.

Kesehatan jiwa tidak bisa kita abaikan, perlu sinergi semua pihak, terutama keluar-

ngendalian kesehatan jiwa dan napza yang terbatas, belum semua daerah menganggarkan untuk program keswa dan napza, karena belum optimalnya komitmen pengambilan kebijakan untuk program keswa dan napza.

- b. Regulasi dan kebijakan, masalah kesehatan jiwa belum merupakan program prioritas, program pelayanan kesehatan jiwa di daerah masih belum terlaksana secara berkesinambungan, sehingga regulasi dan kebijakan bidang kesehatan jiwa seringkali tidak sejalan antara pusat dan daerah.
- c. Akses dan mutu layanan, luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan jiwa, masih ada delapan provinsi yang tidak memiliki RSJ. selain itu mutu pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan juga belum berjalan optimal, seperti rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dilakukan sesuai dengan prosedur rujukan yang benar, begitu pula pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer belum dilakukan sesuai dengan

pedoman/standar yang baku.

- d. Sumber daya manusia, tenaga spesialis dan subspecialis jiwa masih terbatas, dan penyebarannya masih belum merata.
- e. Stigma dari masyarakat, keengganan masyarakat membawa Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mencari pengobatan medik, mereka malu bila ada keluarganya mengalami gangguan jiwa.
- f. Ketersediaan obat, yang berkesinambungan obat psikotropik di puskesmas. Hal ini perlu mendapat perhatian, mengingat penatalaksanaan gangguan jiwa yang sebagian besar bersifat kronis, memerlukan ketersediaan obat secara kontinyu.
- g. Sistem pelaporan yang belum optimal, format laporan juga belum seragam, petugas pencatatan dan pelaporan kesehatan jiwa belum memahami tentang tata cara pelaporan kesehatan jiwa sehingga mempersulit pelaporan.
- h. Koordinasi dan Kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum

optimal. Kegiatan Kesehatan Jiwa yang Berhubungan dengan program Kesehatan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut: Pemeriksaan kesehatan jiwa pada Ibu hamil dalam kegiatan ANC (Antenatal Care). Deteksi kemungkinan ibu nifas mengalami *baby blues syndrome* atau depresi *postpartum* dalam kegiatan kunjungan ibu nifas dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kesehatan jiwa, perlu perhatian pemerintah dan kerja sama semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap masalah kesehatan jiwa. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa, penyediaan obat, meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa, melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi bidang kesehatan jiwa dan penyediaan pembiayaan. Semoga kerjasama antara pemangku kebijakan lintas sektor dapat mendukung program kesehatan jiwa di setiap daerah, terlebih khusus di Manokwari.

● Penulis : Ruth F, dkk. (Poltekkes Sorong)



Sosialisasi kesehatan jiwa bagi keluarga beresiko di Kampung Arowi. DOK. RUTH FAIDIBAN

Transformasi “Balitbangda” Menjadi “BRIDA” Provinsi Papua Barat



Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat dan jajaran staf bersama Staf Ahli Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Dr. Hendrik Renyaan, SH, M.Hum. DOK. BALITBANGDA PB

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang meliputi: kedudukan; struktur organisasi; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; hak keuangan dan fasilitas; pengintegrasian; pendanaan; dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021, BRIN mulai menata kelembagaan dan SDM di mana di dalamnya menaungi pengalihan tugas dan fungsi jabatan peneliti antar kementerian dan lembaga.

Pasca penetapan Perpres tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat yang berdiri sejak Januari 2017 juga segera harus menata kelembagaannya sesuai dengan Perpres

dimaksud.

Proses pembentukan BRIDA di daerah dapat berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan atau bidang penelitian dan pengembangan daerah. Namun karena di provinsi Papua Barat sudah ada perangkat daerah yaitu Balitbangda yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka otomatis hanya tinggal mengurus proses transformasi nomenklatur setelah mendapat persetujuan dari BRIN dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

Setelah melalui berbagai upaya dan tahapan, akhirnya pada 22 April Tahun 2022, Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, Balitbangda resmi berubah nomenklatur menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat.

Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, Kepala Balitbangda yang kini menjadi Kepala BRIDA menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur Balitbangda menjadi BRIDA merupakan satu amanat yang harus dilaksanakan karena sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di tingkat pusat. “Kita tahu bahwa undang-undang tentang sistem nasional dan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditetapkan, juga terkait peraturan pemerintah tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional, sudah jelas bahwa di daerah me-

memiliki kewajiban untuk membentuk BRIDA. Secara khusus di Papua Barat, sebenarnya kita sudah jauh sebelum disahkan undang-undang tersebut,” Jelas Profesor Heatubun.

Tugas dari BRIDA Provinsi Papua Barat nantinya melanjutkan apa yang telah ada dan sementara dijalankan oleh Balitbangda sebelumnya serta melakukan tugas-tugas baru sesuai undang-undang dan arahan dari BRIN secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Sejak tahun 2018, kita sudah maraton memikirkan bagaimana memperkuat sistem riset dan inovasi di daerah namun juga secara kelembagaan, bagaimana penguatan Balitbangda pada saat itu, kita juga bekerja secara simultan untuk bagaimana membentuk dasar hukum peraturan daerah khusus, PERDASUS maupun PERDASI mengenai riset dan inovasi daerah, sehingga akan mengeksplorasi kegiatan pertumbuhan pembangunan yang ada di daerah, demikian juga dengan perubahan nomenklatur, kita harus menyesuaikan dengan kelembagaan di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BRIDA menyampaikan rasa syukur karena proses yang berjalan telah berhasil disahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua perangkat daerah sehingga ini secara nyata menulis dengan jelas perubahan pembentukan BRIDA yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan penelitian, pengkajian, pe-



FGD (Focus Group Discussion) Raperdasus Riset & Inovasi. DOK. BALITBANGDA PB

ngembangan, rekayasa dan inovasi daerah sehingga akan menjadi lembaga yang memiliki peran dan fungsi untuk membina kegiatan riset dan inovasi di Papua Barat.

Kehadiran BRIDA Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan riset dan inovasi nasional di daerah, seperti memajukan dan meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi di daerah, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah serta harus mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah.

“Kita berharap perubahan nomenklatur

akan berubah secara organisasi mengikuti perkembangan dengan terbentuknya UPT-UPT Badan dan bagaimana profesionalitas dari staf dengan jabatan-jabatan fungsional yang akan diisi sesuai dengan organisasi riset/ pusat riset yang akan kita kembangkan. Tentunya yang sudah ada dan akan kita menindaklanjuti segera yaitu bagaimana pembentukan pusat riset dan inovasi pengembangan komoditas unggulan daerah, kantor layanan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), karena Perdasus HaKI telah siap untuk disahkan, demikian juga pusat riset dan inovasi Kawasan esensial ekosistem Mangrove, yang juga PERDA tersebut siap disahkan. Ini perkembangan yang kemudian kita akan lihat terutama terkait potensi keanekaragaman hayati, budaya yang ada sehingga pembentukan Museum Sejarah Alam sebagai pusat riset dan inovasi keanekaragaman hayati dan budaya juga harus segera kita bentuk,” jelas Kepada BRIDA.

Selain itu Kepala BRIDA menambahkan bahwa, Sistem penguatan riset dan inovasi di daerah tentunya akan bekerjasama dengan organisasi-organisasi riset dan inovasi yang telah ada, baik di daerah maupun tingkat nasional dengan badan riset dan inovasi nasional dari kementerian terkait. Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina dari pemerintah daerah, dan juga secara internasional BRIDA Provinsi Papua Barat akan membangun kerjasama yang kuat dengan berbagai lembaga riset dan inovasi di tingkat internasional, Perguruan tinggi lokal, nasional maupun internasional, sehingga akan membantu untuk akselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)



Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Balitbangda Provinsi Papua Barat, Ir. Haviedz Fatamasya, M.Si ketika menjadi moderator pada saat pemaparan materi oleh Staf Ahli Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat Dr. Hendrik Renyana, SH, M.Hum dalam acara FGD Raperdasus Riset dan Inovasi Daerah. DOK. BALITBANGDA PB

In Memorium Ronald George Petocz

Pejuang Konservasi Modern Tanah Papua



Ronald George Petocz. DOK. KELUARGA

Aakhir tahun 2021, penggiat konservasi dunia dikagetkan dengan berita duka kepergian dua penggiat konservasi dunia. Adalah Thomas Eugene Lovejoy III, yang lahir pada tahun 1941 di Amerika dan meninggal tepat pada tanggal 25 Desember 2021, adalah seorang ekolog yang banyak bergerak di bidang konservasi. Pernah memimpin berbagai program konservasi biologi, termasuk proyek *minimum critical area* untuk konservasi. Dia termasuk salah satu ahli yang memperkenalkan mempromosi konsep *bio-*

logical diversity atau yang kita kenal keanekaragaman hayati pada tahun 1980.

Sehari sesudah kepergian Tom Lovejoy (begitu dia dikenal di komunitas penggiat konservasi dan biodiversitas), ada berita meninggalnya Edward Wilson. Ed Wilson, lahir pada tahun 1929 dan meninggal 26 Desember 2021, adalah seorang ahli semut (*mymecologist*) yang terkenal dari Universitas Harvard. Walaupun ahli semut, namun sama dengan Tom Lovejoy, Ed banyak bekerja di bidang konservasi dan merupakan salah

pencetus konsep *sociobiology* dan konsep biodiversitas. *Sociobiology* adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek sosial fauna, suatu gagasan yang cukup menarik pada saat itu. Bagi mahasiswa yang pernah belajar konservasi pasti pernah membaca buku “wajib” mata kuliah konservasi “*The Theory of Island Biogeography*” yang ditulis Ed bersama R. MacArthur dan diterbitkan oleh Princeton University Press pada tahun 1967. Buku ini menyampaikan teori bahwa jumlah spesies pada suatu pulau (atau hutan) tergantung pada luas pulau tersebut



Ronald George Petocz saat di kremasi dan abunya dilarungkan di Sungai Mekong. DOK. KELUARGA

dan jarak pulau tersebut ke benua terdekat. Biasanya pulau berukuran besar dan berjarak dekat dengan benua akan memiliki spesies yang lebih banyak daripada pulau berukuran kecil dan terletak jauh dari benua. Gagasan ini menjadi dasar yang penting dalam penentuan luas minimum kawasan konservasi. Walaupun sangat terkenal dan sibuk, tetapi Ed Wilson (begitu panggilan akrabnya) selalu rendah dan suka sekali membantu kegiatan-kegiatan penelitian dan konservasi. Ed, dalam kesibukannya, tetap saja bersedia membantu dalam proses penulisan buku *The Ecology of Papua* (yang diterbitkan oleh Periplus pada tahun 2007) termasuk menulis pengantar pada buku tersebut.

Khusus untuk kita di Tanah Papua, ada berita duka tentang meninggalnya Ronald George Petocz atau yang biasa dikenal Ron Petocz, pada tanggal 21 Februari 2022 di Bangkok. Sama seperti dua penggiat konservasi sebelum, Ron juga dikenal lewat

berbagai buku dan laporan konservasi di Tanah Papua. Mungkin hampir semua mahasiswa kehutanan atau konservasi di Tanah Papua, pasti pernah membaca tulisannya, termasuk buku *“Conservation and Development in Irian Jaya: A Strategy for Rational Resource Utilization”* yang diterbitkan oleh J. Brill pada 1984.

Perkenalan

Saya mengenal Ron sekitar akhir 1980, saat Ron memimpin proyek IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dan WWF (*World Wildlife Fund*) dalam penyiapan perencanaan dan pengusulan kawasan konservasi di Papua. Waktu itu, Ron mencari beberapa mahasiswa dari Universitas Cenderawasih untuk membantu persiapan pengusulan kawasan konservasi di Papua, berdasarkan laporan FAO 1980. Ron adalah warga negara Amerika yang lahir dan berasal dari New Jersey, namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar negeri, terutama di Asia Tenggara. Setelah

memperoleh gelar doktor dari Universitas Alaska, Ron sempat bekerja di Universitas Calgary, Kanada. Proyek konservasi pertama yang diurusnya Tingkah Laku dan Konservasi Kambing Gunung di Afghanistan. Sayang sekali sesudah penyusunan rencana pengelolaan disusun, Ron harus “terusir” dari Afghanistan karena invasi Rusia. Semua rencana dan kegiatan pelestarian kambing gunung pun berhenti dan Ron harus kembali ke Amerika. Namun, nasib baik membawanya ke Jayapura. Dia ditunjuk sebagai Proyek Nasional FAO (National Conservation Plan for Indonesia. Vol. VIII: Maluku and Irian Jaya), IUCN-WWF dan didanai UNDP FAO untuk memulai kegiatan pelaksanaan konservasi di Papua. Ada beberapa dosen dan teman mahasiswa akhirnya terlibat langsung dalam proyek ini. Tugas utama pada saat itu membaca semua laporan hasil-hasil penelitian ekologi dan taksonomi yang dilakukan di Tanah Papua maupun di Papua New Guinea, terutama takson burung dan mamalia. Ini adalah usaha awal

menyiapkan informasi awal tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Papua sebagai bahan utama pengusulan dan pengelolaan kawasan konservasi. Walaupun tugasnya sangat berat karena harus membaca dengan saksama hasil penelitian dalam bahasa Inggris, saya juga harus mengerti (membaca) biogeografi Pulau New Guinea, ekologi, dan berbagai kegiatan penelitian yang pernah dilakukan di sini, termasuk kegiatan penelitian oleh Alfred Russel Wallace, Archbold Expeditions dan lainnya. Karena kemampuan Bahasa Inggris dan pemahaman ekologi yang terbatas, saya banyak membuat kesalahan yang tidak perlu. Tetapi Ron dengan semangat bersedia menjelaskan kenapa kesalahan itu terjadi. Pada saat proyek, Kantor WWF di Angkasa Indah, Jayapura hanya memiliki 1 kursi dan 1 meja tulis dilengkapi mesin ketik Olivia yang panjang itu. Kami berdua, terpaksa harus bergantian menggunakan meja dan kursi yang tersedia demikian juga mesin ketik. Beruntung saya lebih banyak bekerja pada *weekend* di kantor Angkasa. Pada hari kerja biasa, selain harus kuliah, saya melaksanakan pekerjaan di rumah. Jumat dan Sabtu adalah waktu untuk memeriksa pekerjaan dan membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Mentor Andalan

Saya bersyukur, walaupun Ron sangat tegas, teliti dalam membuat laporan dan agak keras, tetapi dia tetap sabar dan selalu memberikan kesempatan untuk saya dan teman-teman lain yang terlibat untuk belajar dan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Hasil pekerjaan ini, kemudian dilaporkan dalam *Avifauna of Reserves in Irian Jaya dan Mammals of Reserve in Irian Jaya*. Ron juga memperkenalkan saya pada beberapa ahli konservasi dan taksonomi spesies New Guinea yang terkenal. Sebut saja, Jared Diamond, John Mackinnon, Bruce Behleer, Geoff Hope dan hal ini yang mendorong saya untuk tetap bekerja di bidang konservasi, walaupun saat itu ada kesempatan untuk mengabdikan diri di Uncen.

Pengalaman yang paling menarik dan tidak pernah akan dilupakan bersama Ron adalah ketika kami berdua melakukan survei lapangan selama dua bulan dengan berjalan kaki dan ditemani sekitar 20 porter dari Bilogai (atau kita kenal dengan Intan Jaya sekarang) melalui New Zealand pass, ke

Dataran Tinggi Kemabu (Kemabu Plateau), kemudian turun ke Lembah Danau-danau di Pegunungan Cartenz pada tahun 1984. Saya bisa melihat berbagai spesies burung dan mamalia yang selama ini hanya bisa dibaca atau dilihat fotonya di berbagai hasil penelitian yang harus dibaca. Ron menjadi mentor bagaimana menjadi seorang peneliti dan konservasi lapangan yang harus tetap bekerja walaupun pada suhu sekitar 4-10 derajat Celcius misalnya “keharusan” memeriksa mistnet pada malam hari atau suhunya untuk memastikan agar fauna yang tertangkap tidak mati kedinginan dan kelaparan.

Terlempar dari Indonesia

Ternyata nasib Ron berbanding terbalik dengan hasil pekerjaan. Sama seperti pengalaman di Kabul, Afghanistan pada tahun 1980. Pekerjaan Ron di Papua terhenti, karena dia tidak mendapatkan lagi dukungan

Walaupun terlempar dari Papua, tetapi Ron tetap memperhatikan perkembangan konservasi dan pembangunan serta keadaan sosial-budaya di Papua.

dari *counterpart* WWF saat itu. Persoalan ini terjadi karena Ron tidak dapat berkompromi dan memprotes sikap *counterpart* yang seharusnya membantu pelaksanaan konservasi, ternyata mendukung usaha-usaha pemanfaatan spesies (buaya dan kupu-kupu) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Ron kemudian pindah ke Manila dan menjadikan kota ini homebase selama dia melakukan berbagai pekerjaan konservasi di Asia Tenggara. Walaupun terlempar dari Papua, Ron tidak pernah melupakan Papua dan teman-teman yang pernah dia kenal di sini. Secara reguler Ron selalu berkomunikasi dan bertanya mengenai keadaan dan kemajuan pelaksanaan konservasi di Papua.

Walaupun terlempar dari Papua, tetapi Ron tetap memperhatikan perkembangan konservasi dan pembangunan serta keadaan sosial-budaya di Papua. Kami selalu berkomunikasi secara reguler dan menanyakan perkembangan konservasi. Pada awal tahun 2018, Ron menyampaikan keinginannya untuk mendedikasikan koleksi buku dan jurnal ilmiah tentang New Guinea yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Buat saya ini merupakan salah satu koleksi mengenai keadaan alam, budaya dan sejarah serta sosial-budaya tentang New Guinea (Tanah Papua dan Papua New Guinea) yang paling lengkap. Setelah berusaha beberapa kali, dan berkat bantuan dari BP-Tanggus, akhirnya ribuan koleksi sudah tiba di Kampus Universitas Papua. Ron sangat berharap agar koleksinya dapat dibuat ruang khusus atau “*reference*” dalam perpustakaan di Universitas Papua.

Sakit dan meninggal

Beberapa tahun belakang ini teman-teman dekat sudah mendengar bahwa Ron menderita sakit perut akut yang membuat dia harus pembatasan pada makanan tertentu. Pada awal 2019, lewat email Ron mengabarkan bahwa dia akan melakukan perjalanan untuk bertemu teman-temannya di Laos dan Kanada. Namun, nasib berkata lain pada saat berkunjung ke Luang Prabang, Laos, yang sedianya hanya beberapa hari sebelum ke Kanada. Namun, Covid-19 melanda dunia dan semua rencana perjalanan dan penerbangan terganggu. Ron “tertahan” selama hampir 3 tahun di Laos dan itu juga merupakan perjalanan terakhirnya.

Seminggu sebelum Ron meninggal, dia masih sempat mengirim email menanyakan tentang pengelolaan koleksi dan perkembangan pandemi di Papua. Namun, sayang sekali karena berbagai kesibukan email belum sempat dibalas. Ron juga sempat menggambarkan bahwa karena Covid sudah mereda, dia dalam waktu dekat akan melanjutkan perjalanannya ke Kanada. Namun, nasib berkata lain. Pada tanggal 21 Februari 2022, saya mendapat berita bahwa Ron telah meninggal dari salah satu teman. Jenazahnya kemudian didoakan dan dikremasi pada 28 Februari 2022 dan abunya dilarungkan di Sungai Mekong. Selamat jalan Ron...

● Penulis : Yance de Fretes. (YKI)



Pimpinan & Staf
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi Papua Barat

Mengucapkan Selamat Memperingati

ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD S.A.W

"Selamat memperingati hari Isra Miraj untuk seluruh kaum muslim di Indonesia. Semoga di hari yang penuh hikmah ini kita selalu di rahmati dan berada dalam lindunganNya"

27 RAJAB 1443H



Prof. Dr. Charlie D. Healubun, S.Hut, M.Si, FLS
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat

GALERI



Wawancara Media Nasional kepada Wakil Ketua Panitia W20 dan Y20 Manokwari Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si di Sultan Hotel Jakarta.
DOK. BALITBANGDA PB

Sambutan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Melkias Werinussa, SE, M.H dalam Talk Show Pre Event W20 & Y20 Manokwari di Sultan Hotel Jakarta.

DOK. BALITBANGDA PB



Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Melkias Werinussa, SE, M.H bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Hans Lodewik Mandacan dan Ketua BKOW Papua Barat Ny. Lani Lakotani menabuh tifa sebagai peluncuran Side Event W20 dan Pre Summit Y20 Manokwari di Sultan Hotel Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB



Suasana Talk Show Pre Event W20 dan Y20 Manokwari dengan Topik “Kontribusi Perempuan & Pemuda Dalam Pembangunan 5 Tahun Terakhir di Provinsi Papua Barat” dengan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Melkias Werinussa, SE, M.H selaku Ketua Panitia Side W20 dan Y20, Hans L. Mandacan (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, Elsina Y. Sesa S.Sos, M.M (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat), dr. Rosline Rumaseuw, M.Kes (Ketua Cendekiawan Perempuan Papua), Michael Jakaramilena (Musisi Papua) dan dipandu oleh moderator dari Yayasan EcoNusa April Sirait di Sultan Hotel Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan Plakat kepada oleh Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Ny. Lani Lakotani kepada Ketua Panitia Side Event W20 dan Pre Summit Y20 Manokwari, Melkias Werinussa, SH, ME dan juga sejumlah narasumber lainnya. DOK. BALITBANGDA PB

GALERI



Daniel Jones (Head of Sustainable Landscape Foreign, Commonwealth and Development) bersama Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Rengku, Perwakilan Kemendes PDDT dan perwakilan mitra pembangunan saat berkunjung ke solar dryer Ransiki. DOK. BALITBANGDA PB

Direktur Penyerasian
Pembangunan Daerah Khusus
Kemendes PDPT,
Dr. Dwi Rudi Hartoyo, MS saat
berdiskusi dengan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kampung Kabupaten Manokwari
Selatan Yesaya Tuhepari di Lokasi
Pengembangan Perkebunan
Kakao Mansel.
DOK. BALITBANGDA PB





Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, Bupati Teluk Wondama Ir. Hendrik S. Mambor, MM, Bupati Manokwari Selatan Markus Waran saat berdiskusi dalam talk show Semarak Maju Papua Barat memperkenalkan potensi pariwisata di Provinsi Papua Barat bersama dua influencer Indonesia Marlon Abraham dan Jeremiah Lakwani di Sultan Hotel Jakarta. DOK. BALITBANGDA PB



Kunjungan ke Pameran Produk Lokal dari Papua Barat dalam Semarak Maju Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Consellor British Embassy, Wakil Gubernur Papua Barat dan didampingi oleh COE Yayasan EcoNusa. DOK. BALITBANGDA PB

GALERI



Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D saat memberikan ucapan selamat kepada Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si didampingi oleh istri setelah prosesi pelantikan sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. DOK. KEMENDAGRI RI



Wawancara Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw saat diwawancarai oleh sejumlah media nasional maupun lokal setelah proses pelantikan sebagai Pj. Gubernur Papua Barat di Jakarta. DOK. KEMENDAGRI RI





Proses penandatanganan serah terima SK Pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A, Ph.D dan Pj. Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpuw, M.Si. DOK. KEMENDAGRI RI



Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si bersama Mohamad Lakotani, Pangdam XVIII/Kasuari, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Sekda Provinsi Papua Barat.
DOK. KEMENDAGRI RI

Jauh sebelum dikenalnya sistem perekonomian modern (pra kapitalisme) oleh para pendatang dari luar Papua, masyarakat lokal di Papua secara formal telah mengenal beberapa tahapan proses pemanfaatan sumber daya alam yang berhubungan dengan sistem interaksi tradisional. Pertama adalah melalui sistem interaksi dengan alam subsisten sebagai sistem transaksi individual. Kedua melalui sistem transaksi berbagi dengan sesama komunitas (satu arah) serta ketiga melalui sistem transaksi barter (dua arah) yang terjadi secara eksternal dengan masyarakat di luar komunitas Papua.

Sistem interaksi dengan SDA adalah proses awal pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan subsisten keluarga batih (inti). Dalam tahapan ini, masyarakat belum mengenal sistem transaksi ekonomi modern. Sifat ketergantungan masyarakat lokal secara individu (skala keluarga inti) sangat tinggi yang dilaksanakan dengan cara berburu dan meramu hasil hutan. Pada tahapan itu kegiatan transaksi difokuskan pada pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarga inti. Pada awalnya kegiatan ini tidak menyebabkan kerusakan alam karena adanya daya dukung dan pemulihan (regenerasi) alam sangat baik dengan SDA yang berlimpah saat itu.

Interaksi tahap kedua melalui sistem berbagi dengan sesama dalam komunitasnya. Tahapan ini merupakan proses lanjutan dari



Konstruksi Etnosains: Sistem Barter Dalam Kehidupan Masyarakat Papua

kelompok keluarga inti yang membagikan hasil berburu/meramu/berkebun kepada kelompok lain dalam komunitasnya tanpa mengharapkan pamrih untuk menerima kembali materi dari kelompok lain. Pada tahapan kedua ini, interaksi terjadi satu arah dan sistem transaksi modern belum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Interaksi dalam tahapan ini didasari atas nilai-nilai penghormatan dan penghargaan kepada pemimpin kelompok ataupun karena ikatan keluarga (marga) yang dituakan di dalam komunitas masyarakat tersebut.

Tahap ketiga adalah awal masuknya sistem transaksi modern melalui sistem barter. Sis-

tem barter umumnya diperkenalkan dari luar komunitas masyarakat lokal di Papua sebagai bagian dari akulturasi. Pada awalnya prinsip barter pada masyarakat Papua dengan pihak luar merupakan bagian dari pemberian atas dasar penghormatan dan penghargaan yang kemudian menciptakan pranata baru dalam aktivitas sosial.



Benda-benda berharga dalam ritual adat.
DOK. KELUARGA J. AURI

Para pendatang pertama seperti para ilmuwan, peneliti, penyiur agama dan peluang serta pedagang yang datang memperkenalkan aktivitas transaksi tukar-menukar hasil SDA dengan barang/peralatan modern berupa bahan makanan, perhiasan, gerabah, kain, pisau, parang dan senjata. Hal ini memunculkan aktivitas sosial baru yang disebut sebagai sistem barter. Sistem ini dipertegas dengan kehadiran pedagang niaga nusantara dan bangsa penjajah yang mulai memperkenalkan sistem nilai kegunaan SDA dengan alat tukar berupa uang sebagai era baru penanda ekonomi kapitalis.



Indonesia dikenal sebagai wilayah pelayaran niaga nusantara yang pernah disinggahi banyak bangsa, seperti Eropa, China dan Arab. Sementara gerak niaga nusantara antara wilayah Kepulauan Maluku dan Papua, merupakan aktifitas perdagangan yang sesungguhnya menghubungkan zona-zona kekuatan ekonomi antara wilayah Timur Indonesia. Dapat dikatakan wilayah-wilayah yang dilalui sebagai lintasan perdagangan dari wilayah kerajaan terutama Ternate dan Tidore, merupakan sebuah formasi yang sengaja dibangun untuk memperkuat kekuatan ekonomi kedua kerajaan tersebut (Handoko, 2007). Kedua kerajaan ini memiliki historis dengan wilayah Papua terutama di kepala burung, seperti Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana.

Dalam perkembangannya aktivitas interaksi pemanfaatan SDA di wilayah ini semakin intensif dengan meningkatnya pasar permintaan komoditas tersebut, sehingga memaksa masyarakat lokal fokus untuk mencari SDA bernilai ekonomi tinggi seperti hasil hutan baik berupa tumbuhan, bahan makanan, hasil rempah, satwa, dan hasil kebun untuk ditukar. Nilai SDA hutan bagi etnis di Papua sebagai sumber penghidupan materil dan non materil mulai tergantikan dengan fokus pada nilai ekonomi sehingga mempengaruhi tatanan perilaku sosial budaya masyarakatnya dengan kehadiran pihak luar sebagai tanda hadirnya sistem modernisasi.

Interaksi melalui transaksi sistem barter dengan pihak luar meninggalkan bukti sejarah



Proses penyambutan tamu menggunakan benda-benda berharga. DOK. KELUARGA J. AURI

yang sebagian besar masih tersimpan dengan baik. Artefak benda-benda hasil transaksi barter kemudian banyak tersimpan dan dijadikan sebagai benda pusaka dan harta dalam aktivitas ritual adat di Papua. Selain perhiasan logam (gelang, anting, kalung), keramik (piring besar/gantung dan guci), kain tenunan, dan senjata api jenis mauser peninggalan Perang Dunia II. Benda-benda ini yang kemudian dalam perkembangan masyarakat Papua dijadikan sebagai salah satu material yang berhubungan dengan sistem adat dan perkawinan.

Secara fisik benda-benda pusaka yang digunakan sebagai alat tukar umumnya memiliki karakter: (1) Barang ini termasuk langka (berasal dari luar daerah atau tempat

yang jauh) sehingga sulit diperoleh secara perorangan. (2) Peredarannya dikendalikan oleh para penduduk tua, sehingga untuk mendapatkannya harus bisa menempatkan diri dan berbakti kepada mereka terlebih dahulu (Keesing, 1989). Umumnya benda-benda budaya yang merupakan harta dan benda pusaka etnis Papua seperti perhiasan gelang, anting, piring gantung, burung cenderawasih, dan bulu burung kasuari sampai saat ini masih digunakan dalam ritual pesta adat (upacara adat) masyarakat Papua sebagai bagian dari proses interaksi transaksional yang lebih mengarah pada nilai ekonomi global.

Dalam tulisan ini, konstruksi sistem barter jika dikontekstualkan saat ini telah banyak

terdegradasi dengan menghilangkan arti sesungguhnya dalam nilai-nilai dan norma tradisional yang menitikberatkan pada penghormatan kesetaraan dan keadilan sosial dalam tatanan masyarakat di Papua. Perlu menjadi catatan dan pengingat bagi semua pihak bahwa sistem interaksi ini turut berpengaruh besar terhadap sistem pengelolaan sumberdaya alam terutama hutan di Papua agar tidak terjebak pada fokus eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Keberadaan aspek ekologi dan sosial-budaya Papua adalah bagian penting yang juga perlu dijaga dan dirawat bersama terutama dalam pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

● Penulis : Antoni U. (Fahutan UNIPA)

Interaksi melalui transaksi sistem barter dengan pihak luar meninggalkan bukti sejarah yang sebagian besar masih tersimpan dengan baik. Artefak benda-benda hasil transaksi barter kemudian banyak tersimpan dan dijadikan sebagai benda pusaka dan harta dalam aktivitas ritual adat di Papua.



Pimpinan dan Staf
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**



Mengucapkan Terima Kasih Kepada :

**Drs. Dominggus Mandacan, M.Si
dan
Mohammad Lakotani, SH., M.Si**

**Atas Pengabdian Sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Barat
Periode 2017 - 2022**



Eksotik barangkali kata yang paling tepat dialamatkan kepada organ tubuh ini, *hemipenis*. Organ kopulasi ini tersembunyi di bagian dalam pangkal ekor ular. Organ ini akan mengalami ereksi dan keluar dari salurannya ketika otot *retractor penis magnus* mendorongnya keluar pada saat kopulasi hendak berlangsung. Asosiasi dengan otot spesialis lainnya, yakni otot *retractor penis basalis* dan otot *retractor penis parvus* membantu peristiwa ereksi *hemipenis*. Penemuan fantastis saat ini bahwa setiap spesies ular memiliki struktur, bentuk, dimensi dan ornamentasi *hemipenis* yang bervariasi. Dua contoh berbeda ditunjukkan pada *hemipenis* spesies ular *Stegonotus cuculatus* (Colubridae) dan *Micropechis ikaheka* (Elapidae).

Hemipenis : Organ Kopulasi Ular



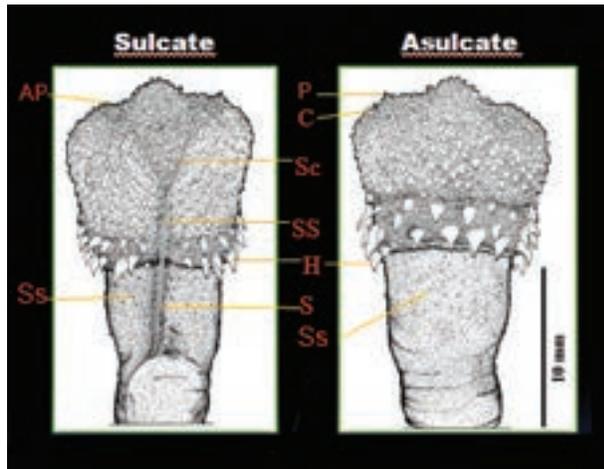
Keterangan Gambar

Atas: *Hemipenis* ular *S. cuculatus*.
Hasil foto langsung tanpa media etalase berisi alkohol.

Kiri Bawah: *Hemipenis* ular *M. ikaheka*.
Hasil foto menggunakan media etalase berisi alkohol.
DOK. PRIDABI



Stegonotus cuculatus dari Pulau umfor, Papua. DOK. PRIDABI



Keterangan Gambar

Ilustrasi morfologi hemipenis ular putih, *Micropechis ikaheka* (SS: sulcus spermaticus H: hooks, Sc: spicules, S: spines, C: calyces, Ss: small spines, P: papillae, AP: apical lobe)



Bagaimana mengetahui hemipenis ular dari?

1. Menghitung jumlah sisik *subcaudals* (ekor): 1-46
2. Deteksi percabangan otot *hemipenis* pada sisik *subcaudal* urutan sisik ke 5 dan 6
3. Otot *retractor penis magnus* terdeteksi dalam ekor mulai sisik 18, 19 dan seterusnya

Keterangan Gambar

Posisi anatomi hemipenis ular pada basal kloaka



Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Begitu pula metode dan teknik penelitian. Beberapa referensi yang disarankan antara lain artikel hemipenis yang dipublikasi oleh Myers & Cadle (2003), Zaher & Prudente (2003), Jadin & Smith (2010), dan juga Harvey et al. 2012. Preparasi hemipenis ular cukup mudah dikerjakan (lihat gambar berikut). Alat dan bahan yang digunakan juga mudah diperoleh di laboratorium. Memang diperlukan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan dalam melakukan penelitian hemipenis ular.

● Penulis : Keliopas K. (FMIPA UNIPA)

Keterangan Gambar

Preparasi hemipenis ular

Bentang alam yang datar, dengan sumber air berlimpah, dan tanah yang subur, membuat Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel sejak lama dianggap potensial dikembangkan sebagai areal pertanian untuk menyangga kebutuhan pangan nasional. Namun, di sisi lain kawasan yang dikenal sebagai Bumi Anim Ha, yang artinya “manusia sejati” ini, juga menjadi benteng keberagaman hayati dan dihuni Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki pangan lokal. Bersama dengan Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel yang sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Papua telah ditetapkan menjadi Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 pada 25 Juli 2022. Penetapan provinsi baru ini bisa menjadi momen untuk menyiapkan regulasi dan tata ruang baru yang bisa mempertemukan kepentingan pangan nasional, masyarakat adat, dan lingkungan.

Agroekosistem lahan basah di kawasan Merauke dan sekitarnya diperkirakan mencapai 1,9 juta ha dan sebagian besar (80,25%) memiliki topografi datar (lereng < 3%). Lahan ini memiliki ketersediaan air cukup untuk usaha pertanian, termasuk padi sawah. Curah hujan tahunan di Merauke rata-rata adalah 1.692 ± 406 mm/ tahun dengan jumlah Bulan Basah (BB) rata-rata per tahun adalah 4 bulan dan Bulan Kering (BK) 5 bulan (Subiksa, 2008).

Sebelumnya, Merauke dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi Papua untuk disiapkan sebagai pusat Pengembangan Kawasan Pangan Merauke (PKPM). Selain tanaman pangan, kawasan ini juga dijadikan pusat pengembangan perkebunan untuk tanaman tebu, karet dan sawit, pengembangan perikanan, dan peternakan sapi. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua pada 2015 menyebutkan, lahan di Kabupaten Merauke yang disediakan untuk perkebunan seluas 1.434.750 hektar dan yang dimanfaatkan sebesar 0,68% atau 9.768 hektar. Sedangkan di Boven Digoel lahan yang tersedia seluas 618.200 hektar yang baru dimanfaatkan baru 3% atau 18.541 hektar. Lalu di Kabupaten Mappi seluas 591.767 hektar dan yang dimanfaatkan baru 5.069 hektar atau 0,86%.

Dari sisi lingkungan, hutan di Papua mempunyai nilai penting yang saat ini terancam mengalami degradasi. Gaveau dkk (2021) menunjukkan bahwa Papua kehilangan hutan seluas 0,75 ha atau 2% selama sembilan belas tahun dari 2001 hingga 2019. Dari luasan hutan yang hilang tersebut, sekitar 45% atau 0,34 juta ha diantaranya dikonversi menjadi perkebunan industri, jalan, tailing tambang, atau penggunaan lainnya, dan sekitar 55% atau 0,41 juta h dibuka akibat penebangan kayu secara selektif, meluasnya perairan (sungai dan danau), kebakaran, dan pertanian berpindah. Model spasial memprediksi bahwa sekitar 4,5 juta ha hutan akan hilang pada tahun 2036 di Papua jika pola perubahan terjadi seperti di Kalimantan. Gaveau dkk (2021) merekomendasikan adanya perubahan kebijakan dan pentingnya bekerja dengan masyarakat adat, pemimpin lokal, dan pemerintah provinsi untuk melindungi hayati dan kekayaan budaya masih terkandung di wilayah hutan Papua ini. Berbagai

Mempertemukan Kepentingan Masyarakat Adat, Lingkungan, dan Ketahanan Pangan Nasional di Merauke



upaya untuk mencegah hilangnya hutan di Papua juga sangat penting dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat saat ini dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi dalam konteks FOLU Net Sink 2030 (KLHK 2022).

Sejarah pengembangan kawasan Merauke sebagai lumbung pangan

Potensi Merauke dan sekitarnya sebagai kawasan pertanian, terutama dalam hal ini tanaman padi, telah banyak dilaporkan sejak sebelum zaman kemerdekaan. Belanda pernah mencoba menanam padi di lahan pasang surut Rawa Kurik, Merauke pada 1939 dengan memanfaatkan transmigran dari Jawa sebagai penggarap. Orde Baru kemudian melanjutkan upaya ini dengan dinarasikannya Merauke sebagai lumbung padi

di luar Jawa. Dengan mengandalkan para transmigran, sawah-sawah baru di Merauke dan sekitarnya terus dibuka. Pada tahun 1986, menurut laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Merauke, luas sawah tadah hujan di Merauke mencapai 12.000 hektar (Kompas, 31 Januari 1986).

Pada tahun 2007, Kementerian Pertanian mengeluarkan kajian tentang kesesuaian lahan untuk pertanian tanaman pangan di Merauke yang menjadi landasan usulan program Merauke Integrated Rice and Energy Estate (MIREE). Kajian tersebut m e n d u k u n g pencadangan 1,2 juta hektar la-

han di Merauke dan sekitarnya untuk pengembangan pertanian (Kementan, 2010). Komoditas pangan yang akan dikembangkan adalah padi, jagung, kedelai, tebu dan sapi. Ketersediaan lahan juga didukung oleh sumberdaya air dari empat sungai besar yang mengalir di wilayah Merauke, yakni Sungai Bian, Digul, Kumbe, dan Maro (BBSDL dan Litbang, 2007). Pada saat itu, sebagian besar lahan ini merupakan savana dan hutan. MIREE ini kemudian menjadi cikal bakal Program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)



yang diresmikan pada 11 Agustus 2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

MIFEE tidak berjalan mulus karena dalam perkembangannya terjadi tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke dan Pemerintah Pusat terkait dengan areal dan luas lahan yang menjadi lokasi proyek ini. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua mengalokasikan lahan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke hanya seluas 552.316 ha. Luasan ini jauh lebih kecil dari yang dikehendaki oleh Pemerintah Pusat dan Pemda Merauke, yaitu 1,2 juta ha (Zakaria, dkk., 2011). Selain itu, MIFEE mendapat banyak penentangan karena dianggap lebih memprioritaskan pada aspek biofisik dan kesesuaian lahan untuk investasi skala besar dan cenderung kurang mempertimbangkan aspek budaya dan kepemilikan lahan ulayat (Zakaria, dkk., 2011; Santosa, 2014). Selain penentangan dari aspek sosial, proyek ini juga dinilai bisa memicu persoalan lingkungan hidup (Suryani, 2016; McDonnell, 2019).

Kemajuan MIFEE yang dinilai sangat lambat membuat Kementerian Pertanian mencari lokasi lain untuk dikembangkan sebagai *food estate* pada 2012, dan dipilihlah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Savitri, 2015). Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghidupkan kembali cita-cita untuk menjadikan Merauke dan sekitarnya sebagai lumbung pangan. Dalam rapat terbatas pada 5 Juni 2015, Jokowi mendorong kembali pengembangan Kabupaten Merauke menjadi lumbung pangan nasional (*Tempo*, 6 Juni 2015). Wacana mengenai lumbung pangan semakin menguat dalam respon Jokowi terhadap pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan ke depan yang disampaikan pada pertengahan 2020.

Koordinator Desk Papua Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Arumingsih dalam diskusi daring yang diselenggarakan CIFOR pada 28 April 2021 mengatakan, *food estate* telah menjadi bagian dalam program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor, sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo



dalam rapat terbatas mengenai Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Ada lima lokasi yang diarahkan untuk *food estate*, dua lokasi awal yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Sedangkan lokasi selanjutnya adalah Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Arumingsih menjelaskan, *food estate* di Papua merupakan bagian dari koridor Ekonomi Indonesia Timur yang menjadi pusat simpul pertanian untuk Pulau Papua, Kepulauan Maluku hingga Nusa Tenggara untuk mengentaskan masalah ketahanan pangan dan penyediaan sumber pangan berkualitas. Mengacu pada Keputusan Kementan No 472/Kpts/RC.040/6/2018, komoditas pangan prioritas yang hendak ditanam di Merauke adalah padi dan jagung. Untuk perkebunan, komoditas yang akan dikembangkan adalah perkebunan karet, kelapa, dan pinang. Komoditas peternakan yang akan dikembangkan adalah sapi potong. Sedangkan untuk hortikultura, komoditas yang akan dikembangkan adalah bawang merah, cabai, kacang panjang, kubis, dan tomat, dan terung. Selain untuk menyangga kepentingan pangan nasional, pembangunan *food estate* di bagian timur Indonesia ini juga didasari oleh rendahnya Indeks Ketahanan Pangan di Papua dan

Papua Barat.

Tanah Subur, Bagian dari Ekosistem yang Rentan

Daratan di Merauke, Mappi, dan Boven Digoel terbentuk dari bahan induk endapan sungai, endapan laut, pelapukan bahan organik, dan batuan sedimen yang subur sehingga potensial dikembangkan untuk pertanian. Namun demikian, Utami, konsultan Bappeda Provinsi Papua dan CIFOR dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) Merauke dan sekitarnya mengatakan, "Ekosistem ini termasuk rentan oleh perubahan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati.". Ekosistem ini dianggap rentan karena berupa hutan, rawa, termasuk gambut, selain savana, yang menjadi kawasan lindung dan resapan air bagi daerah sekitarnya.

Menurut Rencana Tata Ruang Kawasan Ekonomi Strategis Provinsi Merauke dan Sekitarnya (Laporan Akhir 2020, Pemerintah Provinsi Papua dan CIFOR), kawasan hutan lindung berada di sepanjang Sungai Digoel (Distrik Ilwayab), Selat Marianne (Distrik Ilwayab dan Tubang), sepanjang pantai selatan (Distrik Tubang, Okaba, Malind) dengan luas total 263.335 ha. Kawasan gambut dengan luas 61.850 ha berada di Distrik Oka-



Gagal panen yang dialami masyarakat karena terdampak frost (embun upas).
DOK. AHMAD A.

tempat keramat dan sakral. Selain OAP, kawasan ini juga menjadi ruang hidup para transmigran, terutama dari Jawa dan Nusa Tenggara.

Utami menjelaskan, perhatian secara khusus perlu diberikan pada ekosistem rentan seperti rawa, savana dan gambut yang ternyata menjadi tempat bergantung OAP. Ekosistem rentan tersebut perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup OAP. Konversi ekosistem rentan ini harus dihindarkan dan pemanfaatan hutan produksi dan lahan produktif lainnya perlu dilakukan dengan kehati-hatian. Menurut Utami, kondisi lingkungan Merauke dan sekitarnya yang rentan ini dalam berbagai program perencanaan terdahulu belum banyak diperhitungkan. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan di KSP Merauke dan Sekitarnya yang berlangsung periode waktu yang lampau belum sepenuhnya memperhatikan perihal kerentanan ekosistem. Ini dapat dipahami mengingat ketersediaan peta dasar dan informasi relevan pendukung lainnya belum mencukupi pada waktu itu.

Setelah semakin banyak data yang menunjukkan tentang kerentanan ekosistem di kawasan ini, Utami berharap, upaya pengembangan kawasan Merauke dan sekitarnya bisa dikoreksi untuk mengurangi dampak negatifnya. Apalagi, dengan adanya visi pembangunan berkelanjutan Papua atau dikenal sebagai Visi Papua 2100 yang merupakan manifestasi membangun Papua dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

"Tersedianya informasi rinci tentang kawasan rentan kami anggap menjadi sinyal agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola lingkungan. Pemerintah patut mempertimbangannya dalam perencanaan kawasan yang lebih detail, termasuk dalam RTR KSP Merauke dan sekitarnya ini," kata Utami.

Selain berpotensi berdampak terhadap ekosistem lokal, penanaman berbagai komoditas pangan prioritas nasional juga

berpotensi mempercepat ditinggalkannya pangan lokal. Studi Mehraban dan Ickowitz (2021) telah menunjukkan penurunan dalam keragaman makanan dari waktu ke waktu di rumah tangga di Indonesia karena keragaman produksi mereka yang menurun. Karena pangan prioritas yang hendak ditanam di Merauke dalam program *food estate*, seperti padi dan jagung, tidak dikonsumsi secara tradisional oleh orang asli Papua, maka ketersediaan pangan non-lokal yang melimpah dapat menjadi faktor pendukung pergeseran pola konsumsi. Pangan tradisional masyarakat di Merauke dan sekitarnya seperti sagu, keladi, dan ubi jalar akan kalah bersaing dari segi ketersediaan, akses, pemasaran dan lainnya. Pergeseran pola konsumsi masyarakat memiliki konsekuensi ketahanan pangan dan gizi yang tidak disukai masyarakat lokal.

Mempertemukan Kepentingan Lokal dan Nasional

Bagaimana mempertemukan kebijakan yang tidak sinkron ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Di satu sisi, Merauke dan sekitarnya menjadi tumpuan untuk mendukung pemenuhan pangan nasional. Di sisi lain, ekosistem di kawasan ini rentan dan sekaligus menjadi tumpuan masyarakat adat. RTR KSP Merauke dan sekitarnya bisa membantu mempertemukan silang kepentingan ini. Syaratnya, pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan kelautan yang terpadu di kawasan ini harus mengutamakan kualitas hidup dan memberdayakan kearifan etnis masyarakat Anim Ha. Kemandirian dan kesejahteraan orang asli Papua yang inklusif berdasarkan kearifan lokal harus menjadi tolak ukur pembangunan di KSP Merauke dan sekitarnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ini, diantaranya:

- pengembangan sentra produksi sesuai daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan, dan daya tampung atau kemampuan lingkungan menyerap zat, energi atau komponen lain,
- pengoptimalan pemanfaatan lahan, terutama yang sudah dilengkapi perizinan dan mempertahankan luas lahan pertanian,
- pengembangan produk-produk lokal unggulan bernilai tinggi seperti sagu, kayu putih, dan hasil hutan non kayu di

ba, Tubang, Ngguti, Kurik, Malind, Animha, Semangga, Tanahmiring, Jagebob, Sota, Ulin, Edera, Yakomi, Jair, dan Subur. Kawasan resapan air terutama berada di bagian utara dengan luasan 338.380 ha. Hutan rawa primer itu berada di Distrik Ilywab, Okaba, Tubang, Ngguti, Kaptel, Kurik, Animha, Semangga, Tanahmiring, Jagebob, Sota, Elikobel, Kimaam, Yakomi, dan Subur. Sedangkan savana berada di Distrik Ilwayab, Okaba, Tubang, Ngguti, Kurik, Animha, Semangga, Tanahmiring, Jagebob, Sota, Elikobel, Edera, dan Yakomi, dengan luas 89.367 ha.

Secara tradisional bentang alam dari Bumi Anim Ha ini telah menjadi ruang hidup bagi berbagai kelompok etnis orang asli Papua (OAP), baik yang tinggal di pesisir maupun pedalaman, seperti Marind Anim di Merauke, Awyu di Kabupaten Mappi, Wambon atau Mandobo dan Muyu yang menguasai Kabupaten Boven Digoel. Selain itu, ada berbagai etnis pendatang dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara melalui beberapa program transmigrasi. Secara tradisional, OAP telah memiliki komoditas pangan lokal seperti jambu mete, sagu, umbi-umbian, hingga ikan, penyu dan udang hasil tangkapan masyarakat. Di lingkungan ini juga terdapat beragam fungsi kultural seperti cagar budaya, dusun sagu, jalan leluhur, kuburan moyang, tempat berburu,

- kampung-kampung OAP, juga pengembangan sumberdaya manusia (OAP) melalui pendidikan, dengan mengadaptasi kearifan lokal yang terkait dengan bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Dari sisi lingkungan, kawasan yang tutupannya berupa hutan primer, kawasan dengan nilai konservasi tinggi (HCV), kawasan lindung, gambut, rawa dan savana, hutan sekunder dan ekosistem hutan rentan dan penting lainnya, baik yang berada di kawasan pertanian, HP, HPT maupun HL, perlu dilindungi dan tidak dibuka untuk pengembangan lahan pangan.

Pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) juga sangat penting untuk tetap menjadi agenda penting dalam semangat membangun Merauke sebagai lumbung pangan, secara khusus dalam mempertahankan spesies-spesies endemik lokal di Kawasan Selatan Papua. Upaya untuk tetap mempertahankan tutupan hutan di Kawasan Selatan Papua ini juga sejalan dengan upaya penurunan emisi CO₂ (karbon dioksida) sebagaimana telah menjadi agenda Nasional FOLU Net Sink 2030. Selain itu, perlu juga adanya alokasi ruang untuk dapat mengakomodir pangan lokal dan juga alokasi ruang khusus bagi masyarakat (OAP) yang masih bergantung kepada hutan sebagai tempat untuk meramu dan berburu.

Tantangan untuk melakukan hal-hal di atas, diantaranya adalah keterlanjuran pelepasan izin kawasan di Merauke dan sekitarnya. Misalnya, di bagian barat Merauke sudah terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK), yang tinggal selangkah lagi menjadi Hak Pengelolaan (HPL). "Bagaimana RTS KSP bisa menahan itu? Ditahan dengan membuat prioritas, supaya tidak begitu saja mudah beralih fungsi menjadi non-hutan," usul Utami. Pembuatan prioritas dalam pembukaan lahan dapat menghindari terjadinya konversi lahan secara besar-besaran.

Dalam acara diskusi daring yang diselenggarakan CIFOR, Utami menjelaskan pembuatan prioritas bisa diwujudkan dalam bentuk pengembangan secara bertahap sampai 2040 sesuai pola ruang. Ruang cadangan untuk pengembangan pertanian untuk *food estate* dapat diprioritaskan pertama pada kawasan yang secara ekologis tidak

Kawasan Merauke dan sekitarnya yang datar dan subur mengundang banyak minat dan kepentingan, salah satunya sebagai lumbung pangan nasional. Program ini dulu disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan sekarang menjadi food estate. Tujuan food estate adalah untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional dari produksi pangan Merauke dan sekitarnya. Namun tujuan ini banyak menemui tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya. Tulisan ini berupaya mencari titik temu dari silang kepentingan masyarakat adat, lingkungan, dan program ketahanan pangan nasional di Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Ekonomi Merauke dan sekitarnya. Data dan informasi berasal dari diskusi daring yang diselenggarakan CIFOR pada 28 April 2022, dan diperdalam melalui wawancara.

terlalu rentan dengan luasan maksimal 407,007 hektar. Prioritas pengembangan pertama tersebut fokus pada kawasan budidaya dalam rencana pola ruang yang belum ada realisasi, baik yang masuk dalam kawasan pertanian maupun Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan tutupan lahan belukar dan lahan terbuka. Berikutnya prioritas kedua mencakup luas 125,684 hektar, yang diarahkan pada kawasan HP yang penutupan lahannya hutan lahan kering sekunder. Prioritas ketiga seluas 124,572 hektar diarahkan pada kawasan HP yang penutupan lahannya berupa belukar, belukar rawa dan lahan terbuka. Total ruang pengembangan ini mencapai 657,263 hektar. Luasan ini adalah di luar kawasan yang sudah dimanfaatkan sesuai fungsi dan perizinannya seluas 231,027 hektar (yang mencakup Areal Penggunaan Lain berupa hutan tanaman, pertanian lahan kering, perkebunan dan sawah) dan ruang yang dipertahankan seluas 1,809,256 hektar karena alasan ekologis dan kearifan lokal.

Upaya mengedepankan kemandirian dan kesejahteraan orang asli Papua yang inklusif berdasarkan kearifan lokal ini juga sejalan dengan konsep regionalisasi sistem pangan yang diajukan Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasio-

nal (Bappenas). Regionalisasi sistem pangan ini diajukan untuk menjawab sistem pangan berkelanjutan di negara kepulauan, yang diharapkan tidak hanya membantu mengakhiri kelaparan, namun juga membantu memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sistem pangan harus memperhitungkan aspek kesehatan, inklusif dan berkelanjutan. Untuk konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, hal ini bisa diwujudkan jika kita menerapkan regionalisasi sistem pangan yang berbasis pada keberagaman sumber daya lokal.

Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho dalam diskusi daring yang diselenggarakan IPB University pada Kamis (30/12/2021) mengatakan, regionalisasi sistem pangan ini didasarkan pada pendekatan geografis dalam membangun sistem pangan. Dengan dasar ini, sistem pangan Indonesia dibagi menjadi enam, yaitu Sumatera, Jawa, Bali- Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi-Maluku, dan Papua. Anang juga mengatakan, transformasi sistem pangan diarahkan menuju pada pangan yang bergizi, inklusif, berkelanjutan dan handal. "Transformasi sistem pangan ini harus dibangun oleh sistem pangan lokal berbasis potensi lokalitas," tambahnya.



Kondisi tanaman di halaman rumah warga yang tertutup es akibat frost. DOK. AHMAD A.

Prioritaskan Sistem Pangan Lokal, sejalan dengan Program Pemerintah

Aruminingsih menilai munculnya pertanyaan mengenai apakah *food estate* di Papua bakal berkelanjutan sebagai sesuatu yang wajar. "Kita akan belajar dari perencanaan sebelumnya. Pada saat perencanaan ketahanan pangan di Indonesia timur ini, kita akan memikirkan jangka panjang dari aspek lingkungan dan masyarakatnya sendiri," janji Aruminingsih.

Upaya mengedepankan kemandirian dan kesejahteraan orang asli Papua yang inklusif berdasarkan kearifan lokal ini juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah pusat dalam berbagai peraturan. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 mengenai Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 mengenai Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Keputusan Menteri Pertanian. No. 64.1/KPTS/RC.110/J/12/2017 mengenai Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Mandiri

Pangan Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2014 mengenai Pedoman Gizi Seimbang.

Selain peraturan-peraturan ini, prioritas pembangunan sistem pangan yang mengedepankan sistem pangan lokal juga sejalan dengan konsep regionalisasi sistem pangan yang diajukan Kementerian Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas). Regionalisasi sistem pangan bisa menjadi peluang untuk mempertemukan kepen-

tingan pemenuhan pangan nasional dengan sistem pangan berbasis karakteristik lokal. Maka, pembangunan pertanian di Merauke dan sekitarnya seharusnya tidak dengan meminggirkan beragam pangan lokal. Sebaliknya, dusun-dusun sagu yang selama ini menjadi sumber pangan masyarakat lokal harus dipertahankan, bahkan seharusnya diperkuat agar tidak terjadi pergeseran pola pangan.

Pembangunan sistem pangan di Merauke dan sekitarnya ini juga perlu melihat tren ke depan, terutama setelah ditetapkannya Provinsi Papua Selatan. Hal ini kemungkinan akan memicu pertumbuhan kota-kota baru dan migrasi penduduk dari luar, yang pada akhirnya akan mempercepat perubahan pola makan. Kebutuhan beras, terutama dengan kedatangan orang luar daerah akan semakin meningkat sehingga perlu jadi pertimbangan dalam kebijakan pangan ke depan di kawasan ini. Penting dicatat bahwa kebijakan terkait regulasi dalam mendukung atau mengatur ketahanan pangan lokal hingga saat ini belum ada di Papua maupun Papua Barat. Rencana strategi terkait pengembangan pangan lokal juga belum ada. Sebagai provinsi baru, Papua Selatan bisa menjadi pionir untuk membuat regulasi yang bisa melindungi keragaman pangan lokal ini, sehingga tidak hanya menjadi area bagi *food estate* yang lebih ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

● Penulis : Ahmad Arif, Paulus Mandibodibo, Charlie D. Heatubun. (Kompas/Balitbangda PB)

- Merauke dan sekitarnya dari aspek ketersediaan lahan berpotensi menjadi area ekstensifikasi pertanian dan telah ditetapkan sebagai salah satu *food estate* yang bisa menopang kebutuhan pangan nasional
- Di sisi lain, Merauke dan sekitarnya juga memiliki ekosistem yang rentan karena sebagian berupa hutan, rawa, termasuk gambut, selain savana, yang menjadi kawasan lindung dan ruang hidup Orang Asli Papua dengan beragam pangan lokalnya.
- Pembangunan *food estate* di Merauke dan sekitarnya yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan pangan nasional perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan yang spesifik.
- Regionalisasi sistem pangan bisa menjadi peluang untuk mempertemukan kepentingan pemenuhan pangan nasional dengan sistem pangan berbasis karakteristik lokal.

Sumber Data Keanekaragaman hayati dan Pembuatan Model Distribusi

Salah satu tantangan utama dalam perencanaan berbasis lingkungan adalah keterbatasan data keanekaragaman hayati, tipe dan keadaan luasan ekosistem. Boleh dibilang hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ataupun lembaga penelitian di Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas terkait data keanekaragaman hayatinya. Kalau pun ada, maka biasanya terfokus pada daerah tertentu sehingga tidak dapat digunakan untuk perencanaan berbasis lingkungan yang biasanya dilakukan pada level provinsi ataupun bentangan. Selain itu, kebanyakan data keanekaragaman hayati yang tersedia saat ini merupakan data poin (*species occurrence*) ataupun hasil pengamatan lapangan pada lokasi tertentu, sehingga belum dapat dimanfaatkan langsung dalam perencanaan. Untuk mengatasi kelangkaan data poin dan spatial (distribusi), Yayasan Konservasi Indonesia (YKI), Moore Center-Conservation International dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA Papua Barat) melaksanakan pelatihan tentang sumber data keanekaragaman hayati dan pemodelan spasial keanekaragaman hayati, yang dilaksanakan di Swiss- Belhotel, Manokwari, pada tanggal 28 Juni 2022. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memperkenalkan berbagai platform atau sumber data keanekaragaman hayati yang tersedia secara online dan memperkenalkan program modeling sederhana (*Wallace*) merubah data poin menjadi informasi spasial.

Sumber Data Keanekaragaman Hayati

Buat para peneliti keanekaragaman mungkin telah “familiar” dengan beberapa platform atau database yang menyiapkan data keragaman hayati, tetapi bagi para perencana platform ini belum banyak dikenal. Secara umum dikenal platform *Global Biodiversity Information Facility* (GBIF) dan IUCN Redlist. Selain itu ada belasan platform lainnya seperti *Botanical Information and Ecological Network* (BIEN), eBird dan Bison, MOL, vernet serta lainnya.

IUCN Red List

IUCN Red List didirikan pada 1964 telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi yang lengkap mengenai status konservasi fungi, flora dan fauna. IUCN Red List menjadi sumber informasi penting dalam menentukan status keanekaragaman dunia. Saat ini IUCN Red List telah menilai status konservasi berbagai taksa di dunia, dimana sekitar 32 persen merupakan spesies terancam. Kelebihan IUCN Red List adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala oleh para ahli yang berkompeten. Data status spesies disajikan dalam database maupun spatial data (peta distribusi). Platform ini dapat diakses secara mudah dan data dapat diunggah sesuai kebutuhan kita. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap dan detail, pengguna harus mendapatkan pin atau akses tertentu sebelum diunggah.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

GBIF dibentuk berdasarkan rekomendasi kelompok Organisasi Untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pada tahun 1999, dengan tujuan menyediakan data keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. GBIF memiliki kantor sekretariat di Kopenhagen yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan kerjasama pengumpulan data dari berbagai negara dan organisasi penelitian di dunia. Data dan informasi tersebut dapat diakses secara gratis.

Saat ini ada tersedia data sekitar 2 milyar data kehadiran (*occurrence*) atau data hasil pengamatan di lapangan, ada sekitar 70.000 data set, bekerjasama dengan sekitar 2 juta penerbit serta data dari GBIF telah digunakan dalam penulisan 7.000 artikel ilmiah.

BIEN (Botanical Information and Ecological Network)

Kalau GBIF mengumpulkan data dari berbagai taksa (atau kelompok flora dan fauna), maka BIEN hanya fokus pada data flora (tumbuhan), walaupun demikian, BIEN banyak melibatkan ahli komputer, dan spatial. Tujuan utama untuk mengumpulkan data kekayaan spesies tumbuhan, pola-pola keanekaragaman, fungsi dan distribusi. Perbedaan lainnya dengan GBIF, BIEN dibentuk dan dikelola oleh NCEAS, NSF (*National Science Foundation*), Universitas Arizona dan Conservation International.

More than 32,000 species are threatened with extinction

That is still 27% of all assessed species.

AMPHIBIANS
41%



MAMMALS
26%



CONIFERS
34%



BIRDS
14%



SHRUBS & HERBS
30%



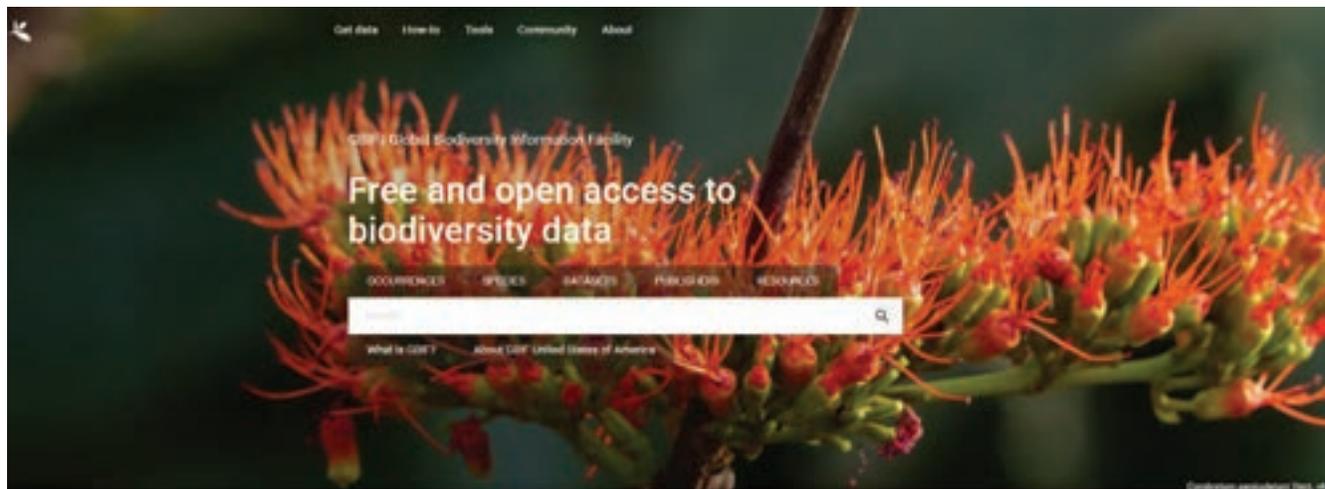
REEF CORALS
33%



SELECTED INSECTS
28%



Informasi status spesies terancam. Ada sekitar 32.000 spesies yang terancam. Kelompok katak (anuran) merupakan yang paling tinggi tingkat keterancamannya 41% katak (anuran) disusul hutan konifer (34%) dan terumbu karang (33%). Secara umum, ada sekitar 26 % tingkat keterancamannya spesies pada semua taksa (Red List, 30 Juni 2022)



BIEN (*Botanical Information and Environmental Network*) adalah salah satu sumber data yang keanekaragaman hayati usus mengumpulkan data kekayaan flora di dunia.

Jumlah datanya terus berkembang dari tahun ke tahun, kemudian *software* yang digunakan untuk menyajikan data. Saat ini BIEN mengelola sekitar 200 juta pengamatan, yang terlibat 400 spesies serta 300.000 peta penyebaran. Keanekaragaman *hayatusus* untuk New Guinea (Indonesia dan Papua New Guinea) terdapat sekitar 300.000 data koleksi.

e-Bird

Dari namanya sudah dapat diduga bahwa portal database ini dikhususkan pada

pengumpulan data keanekaragaman hayati dan kelimpahan burung. Dibuat oleh Cornell Laboratory of Ornithology, Universitas Cornell di Ithaca, Amerika Serikat dan National Audubon Society (sebuah perkumpulan pecinta burung di Amerika) pada tahun 2002. Pada awalnya keanekaragaman hayati khususnya untuk burung di bagian Utara (Amerika dan Kanada), namun pada tahun 2008, memasukkan burung-burung dari Selandia Baru dan pada tahun 2020 terbuka untuk burung seluruh dunia.

Ciri keanekaragaman hayati pada portal *e-Bird* ini lebih banyak melibatkan pengamat burung amatir, masyarakat dan ahli burung. Para pengamat burung, misalnya, dapat mengupload hasil pengamatan lapangan mereka, tanpa ada prosedur yang kaku yang harus diikuti. Pada Mei 2021, *e-Bird* telah memiliki sekitar 1 milyar data observasi distribusi burung dan data bertambah sekitar 100 juta observasi per tahun.

Pakai Yang Mana?

Pertanyaan selanjutnya bagi pengguna data adalah mau menggunakan sumber data yang mana. Semua tergantung dari tujuan penggunaan data. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan konservasi, maka IUCN-Red List lah paling tepat. Demikian juga untuk informasi distribusi tumbuhan. Beruntung buat calon pengguna data yang serius, karena waktu telah terbit sebuah artikel ilmiah yang membahas berbagai database ini, hubungan atau keterpaduan antara database serta kelebihan dan kekurangan tiap database di *Global Ecology and Biogeography (A Review of the heterogeneous landscape of biodiversity databases: Opportunities and challenges for synthesized biodiversity knowledge base)*, pada 8 April 2022 (artikelnya dapat diunduh pada link <https://doi.org/10.1111/geb.13497>).

	Jumlah di BIEN 3.4	Jumlah di BIEN 4.0	Jumlah di BIEN 4.1.1
Jumlah data observasi	81,693,397	106,705,854	205,212,333
Jumlah spesimen	64,269,636	64,897,324	62,651,839
Plot pengamatan	17,423,761	17,430,379	17,247,823
Plots	114,182	114,211	363,258
Species	378,554	438,875	
Pengukuran sifat	951,680	26,888,342	26,888,342
Penyebaran	81,274	81,274	300,000+
Taxonomic Data	374,685	441,231	485,902



Data hasil pengamatan lapangan (occurrence data) New Guinea yang dikelola oleh BIEN. Data ini telah digunakan untuk berbagai publikasi ilmiah tentang keragaman flora di New Guinea. Dalam pelatihan spesies modeling, data ini digunakan untuk membuat model distribusi spesies yang untuk penentuan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Papua Barat.

Tulisan itu menyimpulkan bahwa data besar, belum tentu memiliki kualitas data yang baik. Misalnya, data flora pada GBIF, sekitar 50% menggunakan nama yang salah dan hanya sekitar 33% menggunakan data dengan koordinat yang benar.

Data besar belum tentu memiliki kualitas baik, karena proses pengumpulan data dan inventori atau katalog melibatkan banyak orang dengan berbagai keahlian dan kepedulian. BIEN misalnya menerapkan enam tahapan dalam memproses data lapangan (standarisasi data) sebelum data disajikan untuk kepentingan umum. Langkah-

langkah itu termasuk:

- 1) Menentukan apakah suatu spesies adalah asli (*native*) atau introduksi
- 2) Memastikan nama, terutama nama ilmiah, yang digunakan benar dan *terupdate*, bukan sinonim, kesalahan penulisan atau nama lama
- 3) Memastikan sebenarnya, bukan lokasi yang digunakan dalam hubungan politik dan sebagainya
- 4) Spesies yang dikultivasi (tanam) atau kehadirannya alami (*natural occurrence*)
- 5) Memastikan lokasi geografis yang misalnya, untuk catatan lokasi yang umum,

maka spesies dapat dipetakan di tengah habitat dimana spesies diharapkan ada

6) Memastikan bahwa koordinat atau lokasi yang digunakan benar (*geo validation*).

Tahapan penting selanjutnya, bagaimana cara untuk mengunduh dan menggunakan database, menjadi informasi yang berguna dan siap dipakai dalam perencanaan berbasis lingkungan. Sebagian portal database memberikan akses gratis buat semua, namun dengan pemakaian terbatas. Beberapa database, misalnya, IUCN Red List menyaran untuk menjadi anggota agar dapat mengunduh database secara utuh. Namun pengunduhan dengan cara ini hanya memberikan informasi secara umum dan terbatas pemakaiannya. Beruntung banyak portal database telah memanfaatkan perangkat lunak (*software*) untuk mengunduh dan mengolah data. Misalnya, *rgbif*, untuk mengakses data GBIF, atau *r-redlist* untuk data IUCN-Red List. Program R, selain dapat membuat peta distribusi, program ini dapat melakukan analisis multivariat untuk menentukan faktor-faktor apa yang paling berpengaruh dalam pola dan distribusi spesies. Syaratnya pengunduh harus memahami R Program (bahasa R) agar dapat menggunakannya secara efektif.



Salah satu contoh paket R untuk mengakses data keanekaragaman hayati di GBIF.

Permodelan

Pekerjaan belum selesai sesudah mengunduh data dari sumber database yang dipilih. Tahapan berikutnya adalah pemo-

delan. Namun sebelum melakukan hal ini, sebaiknya memperhatikan hal-hal ini: model yang dipilih harus bisa melakukan ekstrapolasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi daerah penyebaran, dapat melakukan ekstrapolasi pendugaan daerah penyebaran, terutama pada daerah yang terbatas datanya, dan dapat melakukan analisa pengaruh perubahan lingkungan terhadap daerah penyebaran. Sebagus apapun model yang digunakan, sangat tergantung pada data yang digunakan. *Garbage in, garbage out*, ungkapan yang sering digunakan pengelolaan data. Artinya, sampah yang masuk, sampah yang keluar (data jelek akan menghasilkan hasil jelek juga).

Ada banyak model yang tersedia saat ini, dari yang paling rumit sampai yang hanya menggunakan web (*web based model*). Model yang umum digunakan adalah *Maxent GUI*, *Dismo R Paket*, *Biomod R Paket* dan *Wallace Web Interface*. Dalam pelatihan ini, peserta dilatih menggunakan *Wallace Web Interface*.

Terlampir contoh penggunaan data pengamatan (*species occurrence*) tumbuhan yang berasal dari BIEN untuk membuat peta distribusi kekayaan jenis (*species richness*) untuk New Guinea. Data BIEN merupakan data koleksi tumbuhan yang dihimpun dari berbagai herbarium yang ada di Eropa dan Amerika. Pemodelan ini menggunakan sekitar 300.000 spesies tumbuhan yang telah distandarisasikan.

● Penulis : Yance de Fretes (YKI)



a. Data species occurrence



b. Modeled Plant Species Richness



Data koleksi tumbuhan (a) yang digunakan untuk membuat model kekayaan jenis tumbuhan, (b) dimana daerah dengan warna merah maron menunjukkan daerah dengan kekayaan jenis tumbuhan yang tinggi.





Pimpinan & Staf
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
Provinsi Papua Barat



Mengucapkan Selamat Memperingati
Selamat Hari Raya
Nyepi

TAHUN SAKA 1944



balitbangda.papuarbaratprov.go.id



Pimpinan dan Staf
Badan Penelitian & Pengembangan Daerah
Provinsi Papua Barat

Mengucapkan
SELAMAT
Hari Raya
Paskah

Rayakan musim paskah dengan hati
penuh kegembiraan dan kebahagiaan



[@balitbangdamedia_pb](https://www.instagram.com/balitbangdamedia_pb)



GIZ FORCLIME Siap Mendukung Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Lembaga internasional asal Jerman, GIZ FORCLIME menyatakan akan mendukung lembaga pemerintah daerah dan kelompok masyarakat di Papua Barat yang melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan berkelanjutan.

“Pertemuan kami dengan Prof. Heatubun adalah untuk menyampaikan rencana kerja Tahun 2022. Selain itu, pada tanggal 26-27 Januari akan ada rapat *technical committee* di KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi ini dalam rangka menginput data untuk menyempurnakan *workframe* kita,” jelas Sidiq.

Sidiq menegaskan bahwa GIZ FORCLIME sangat mendukung Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bidang kehutanan, pelestarian keanekaragaman hayati dan kegiatan terkait pembangunan berkelanjutan lainnya.

Dalam penyampaian kepada Kepala Balitbangda Papua Barat selaku koordinator Mitra Pembangunan di Papua Barat, Sidiq menjelaskan, pada Tahun 2022 ini, PROCLIME dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat akan bekerja dari tingkat kampung. Empat kampung yang dipilih sebagai *pilot project* adalah Kampung Wendi dan Kampung Haha di Kabupaten Sorong Selatan, serta Kampung Emaus dan Kampung Bikar di Kabupaten Tambrauw.

Kegiatan yang akan dilakukan pada empat kampung ini adalah pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator dan pendampingan kelompok tani hutan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

fasilitator kampung dan kelompok tani hutan di kampung. Tujuannya agar fasilitator dan kelembagaan kelompok tani hutan pada tingkat kampung memiliki kompetensi sesuai syarat yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Selain itu, GIZ FORCLIME juga akan membantu mengembangkan unit-unit yang diajukan dari KLHK, baik dalam hal pengelolaan usahanya hingga pengembangan jaringan pasar. GIZ FORCLIME juga akan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, kelompok tani dan tim kerja KPH.

GIZ FORCLIME juga telah bekerjasama dengan Universitas Papua (UNIPA) dalam mendukung program magang mahasiswa, dan mendukung program Kampus Merdeka Belajar. Selain itu, bersama Fahutan Unipa akan membentuk International Forest Student Association (IFSA) Center di Papua. “Di Papua belum ada, jadi kami dorong pembentukan IFSA Papua Center,” ucapnya.

GIZ FORCLIME juga akan memberikan dukungan terhadap inventarisasi hutan yang lokusnya adalah Hutan Mangrove di KPH Sorong Selatan. Juga akan melakukan pemetaan sagu dan mendukung pusat riset mangrove di Papua Barat.

Sementara itu, Prof. Heatubun yang juga sebagai anggota tim pengarah program *Forest and Climate Change 4.0* pada kerjasama pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, dalam arahnya berharap GIZ FORCLIME dapat berkontribusi juga dalam mendukung penerbitan hasil-hasil riset dan penelitian ilmiah di Papua Barat, juga membantu dalam mendukung upaya-upaya pengembangan komoditas unggulan dan pembangunan *Science Techno Park* di Papua Barat.

“Sagu adalah salah satu komoditas unggulan di Papua Barat, tapi Provinsi Riau sudah menyatakan mereka sebagai provinsi sagu. Kenapa? Karena dalam hal pengelolaan sagu, mereka lebih progresif,” tandas Prof. Heatubun.

Karena itu, Prof. Heatubun berharap agar dapat dibentuk tim untuk mereview status sagu di Papua dan rekomendasinya seperti apa. “Banyak yang lakukan penelitian sagu, tapi tidak tahu datanya kemana. Jadi jangan kita mengulangi hal yang sama berulang. Kita sudah harus bekerja baik dari tingkat dasar maupun pengelolaan produk turunan. Jadi riset-riset ini harus betul-betul diperhatikan.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)

Update: GIZ FORCLIME telah menyatakan kesediaannya secara lisan untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dengan bergabung dalam konsorsium pengelolaan Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua (*Crown Jewel of Tanah Papua*). Secara formal GIZ PROCLIME akan menyampaikan surat kesediaan untuk bergabung dalam konsorsium secara tertulis.

Pertemuan Perdana Manajemen Baru GEG dengan Kepala Balitbangda Papua Barat

Tim manajemen baru Green Economic Growth (GEG) melakukan pertemuan perdana dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun S.Hut, M.Si di Kantor Balitbangda Fanindi, Rabu, 19 Januari 2022.

Dalam pertemuan tersebut Kepala Balitbangda Papua Barat menyambut baik Tim GEG dan menyampaikan terkait kerjasama yang pernah dilakukan pihak GEG bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Balitbangda bahkan evaluasi secara umum terkait program kerja yang dilakukan juga bersama masyarakat di Papua Barat serta fokus program tahun 2022.

“Saya pernah bekerja dengan GEG ada progress yang kita hasilkan. Walaupun sedikit terlambat, ini juga menjadi catatan dan perhatian untuk tim GEG melihat ini. Karena GEG lebih cukup lama di Tanah Papua” tutur Kepala Balitbangda.

Menurutnya kegiatan GEG dimulai sejak 2018 dengan adanya ICBE dan beberapa kegiatan lainnya. Sebagai Koordinator Mitra pembangunan Papua Barat dirinya mengkoordinir semua mitra dalam menjalankan program di Papua Barat dengan tetap berkomitmen melindungi minimal 70% luasan hutan di Papua Barat dan ini merupakan komitmen yang dibuat secara global.

Prof. Heatubun menyampaikan bahwa Gubernur Papua Barat mendukung apa yang dikerjakan oleh mitra asalkan serius dan bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan komoditi di Papua Barat serta Pemerintah Daerah. “Program harus meningkatkan hal yang baik bagi masyarakat, internal bagi kami pemerintah daerah. Kami tidak suka orang hanya datang ke Papua Barat karena ada *project*.”



Prof. Heatubun saat menjelaskan kerja sama awal tahun 2018, bersama GEG di ruang kerjanya. DOK. BALITBANGDA PB



Simon Field saat menerangkan program yang akan dikerjakan oleh GEG di tahun 2022 kepada Kepala Balitbangda Papua Barat, yakni pengembangan Komoditi Pala di Kabupaten Fakfak. DOK. BALITBANGDA PB

Dukungan Pemerintah yang bisa kita lihat saat ini dengan proses tahapan pembangunan Gedung Inovasi di Ransiki Manokwari Selatan dan dukungan pengembangan komoditi lokal lainnya seperti coklat Ransiki dan lainnya”. Jelasnya.

Di Level Provinsi sudah ada Tim Satgas Komoditi, Rumput Laut, Pala semuanya sendiri-sendiri. Ada banyak Mitra yang bekerjasama dan memberi dukungan.

“Kami berharap sisa waktu project rumput laut bisa diteruskan dan terus memberi

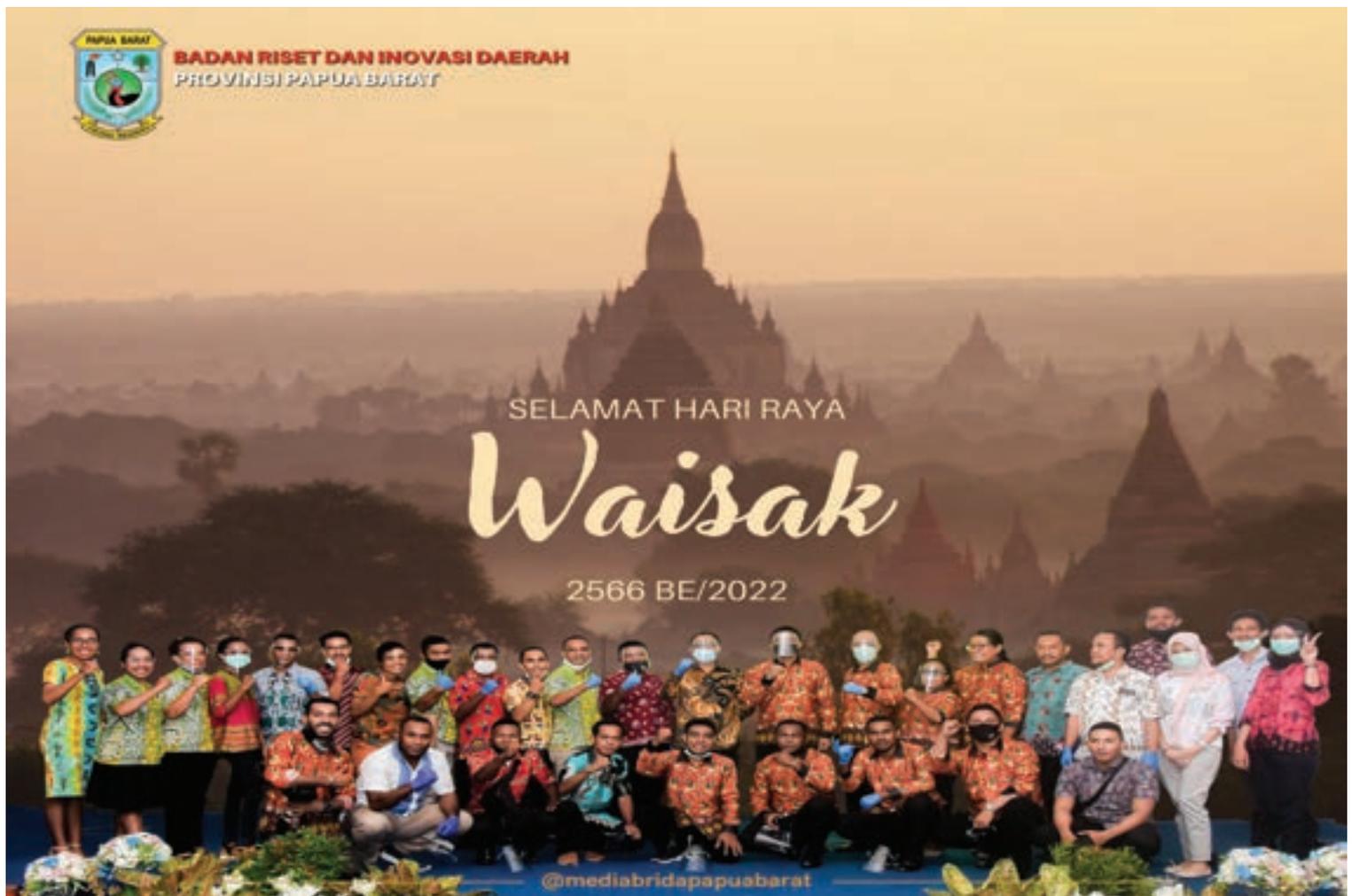
motivasi untuk para nelayan. Balitbangda juga sementara menyusun *master plan* untuk Rumput laut di Wondama. Untuk mencapai hasil yang baik harus berkolaborasi dengan semua pihak. Kita juga harus kolaborasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, karena jika jalan sendiri-sendiri maka hasil yang kita harapkan tidak bisa tercapai” tegasnya.

Selanjutnya, Tim manajemen baru GEG yang dipimpin oleh Simon Field dan rombongan menyimak penyampaian Kepala Balitbangda serta siap berkoordinasi serta menyampaikan fokus pengembangan Komoditi Pala yang akan dilakukan di Kabupaten Fakfak pada tahun 2022 ini.



● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)

Penyerahan diseminasi kelitbang Provinsi Papua Barat oleh Prof. Heatubun kepada manajemen baru GEG, Simon Field. DOK. BALITBANGDA PB



Walaupun Berganti Entitas, CI Tetap Mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat



Indonesia Program Divisi Advisor – Conservation International, Susan Vulpas (kanan) menyimak dengan baik penjelasan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Heatubun tentang hasil-hasil diseminasi dan publikasi yang dilakukan CI bersama Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menerima tim Conservation International (CI) di Kantor Balitbangda Papua Barat, pada tanggal 20 Januari 2022, di Manokwari. CI menyampaikan apresiasi hasil-hasil publikasi dan diseminasi yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Papua Barat, karena sangat membantu publik untuk mengikuti program-program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama para mitra.

Hal itu disampaikan Direktur Program Conservation International di Papua Barat, Meity Mongdong didampingi Susan Vulpas (*Indonesia Program Development Advisor*) saat melakukan pertemuan dengan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof.

Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS di Manokwari, Kamis (20/1/2022). Dalam pertemuan itu, Meity juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat CI akan memiliki entitas baru sebagai yayasan lokal. Jadi tidak lagi menggunakan nama Conservation International, tapi akan berubah menjadi Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia atau Yayasan Konservasi Indonesia. Meskipun terjadi perubahan di tingkat pusat, rencana kerja 2022 tetap berjalan seperti biasa di bawah pengendalian lembaga baru.

Meity menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan masih terfokus di Bentang Laut Kepala Burung, melakukan kajian kawasan strategis provinsi berkelanjutan dan bersama lembaga lain memperkuat program pengembangan Mahkota Permata Tanah Papua, penguatan kelembagaan lo-



Penyerahan hasil Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan Provinsi Papua Barat oleh Prof. Heatubun kepada Susan Vulpas (Indonesia Program Divisi Advisor –Conservation International). DOK. BALITBANGDA PB

kal di kawasan pelestarian perairan serta bekerjasama dengan media outreach untuk mempublikasikan capaian-capaian praktek pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Profesor Heatubun yang didampingi Kepala sub bagian Diseminasi dan Publikasi Ezrom Batorinding, S.Hut, M.Sc mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh CI di Tanah Papua dan secara khusus di Papua Barat. Berkat dukungan CI, nama Papua Barat makin dikenal di dunia dan mendapat perhatian berbagai negara dalam upaya mendukung program-program pembangunan berkelanjutan. Mengakhiri pertemuan itu, Prof. Heatubun menyerahkan sejumlah buku, majalah dan jurnal hasil publikasi Balitbangda Papua Barat.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)





Bank Papua Siap Dukung Balitbangda Provinsi Papua Barat

Bank Papua sebagai salah satu bank yang mengelola keuangan daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil, secara khusus bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan program kerjasama seperti yang telah

dijajaki dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat.

Bank Papua menyatakan akan mendukung dan memperkuat kerja-kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasikan kebijakan Gubernur Papua Barat dalam konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Penyerahan Proposal kerja sama oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Heatubun kepada Wakil Kepala Cabang Utama Bank Papua Manokwari, Ronny Wabia. DOK. BALITBANGDA PB

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Kepala Cabang Utama Bank Papua Manokwari, Ronny Wabia dan Kepala Balitbangda Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS, di Manokwari, Rabu, 26 Januari 2022.

Bank Papua mengakui dan mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama mitra pembangunan lainnya yang telah berkontribusi dalam mengangkat nama Papua, khususnya Provinsi Papua Barat ke tingkat dunia. " Ya, Balitbangda ini luar biasa. tidak ada kantor,



tapi telah melakukan hal-hal yang hebat,” ujar Ronny Wabia, yang juga legenda sepakbola Tanah Papua dan tim nasional ini.

Karena itu, Ronny Wabia selain berdiskusi tentang berbagai hal, juga telah membangun pembicaraan pada arah kerjasama yang khusus dan saling menguntungkan. Selanjutnya, dirinya akan meneruskan pembicaraannya bersama Kepala Balitbangda Papua Barat ke tingkat rapat pimpinan Bank Papua Cabang Manokwari.

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Heatubun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas perhatian dan dukungan Bank Papua kepada

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan secara khusus kepada Balitbangda. Dirinya juga berharap Bank Papua akan menjadi Bank yang memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat, khususnya mereka yang berada di pelosok dan kampung-kampung terpencil.

Balitbangda Papua Barat dan Bank Papua, khususnya pimpinan Bank Papua Cabang Manokwari telah melakukan pertemuan secara rutin. Diharapkan pada pertemuan berikut, sudah bisa dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama, untuk mengimplementasikan program kerja yang sudah direncanakan.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)

Bank Papua mengakui dan mengapresiasi kerja-kerja yang dilakukan Balitbangda Provinsi Papua Barat bersama Mitra Pembangunan lainnya yang telah berkontribusi dalam mengangkat nama Papua, khususnya Provinsi Papua Barat ke tingkat dunia. “Ya, Balitbangda ini luar biasa. tidak ada kantor, tapi telah melakukan hal-hal yang hebat,” ujar Ronny Wabia, yang juga legenda sepakbola Tanah Papua dan tim nasional ini.



Prof. Heatubun saat menjelaskan program dan kinerja Balitbangda Provinsi Papua Barat melalui inovasi Dashboard DASI BRIDA kepada Wakil Kepala Cabang Utama Bank Papua Manokwari Ronny Wabia beserta staf Yunus Waimbo. DOK. BALITBANGDA PB

Ilmuwan Muda Papua Tetap Menjadi Program Utama Kerjasama Balitbangda Provinsi Papua Barat dan EcoNusa



Bustar Maitar, CEO Yayasan EcoNusa saat berkunjung ke pendopo kantor II Balitbangda Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat dan Yayasan EcoNusa bersepakat untuk melanjutkan program Ilmuwan Muda Papua (IMP) pada Tahun 2022. Program ini adalah wujud komitmen bersama untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan Tanah Papua yang berdedikasi dan berkompeten di masa depan.

Kesepakatan untuk melanjutkan program

ini dibicarakan dalam pertemuan yang dilakukan di Pondok Pertemuan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Manokwari, Senin(31/1/2022).

Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D.Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS menjelaskan, data penelitian menunjukkan, Pulau Papua memiliki 16 persen keanekaragaman tumbuhan lebih banyak

dari Madagaskar, yang tercatat memiliki 11.488 spesies. Dari data tersebut, para ilmuwan menemukan bahwa 68% (9.301) merupakan jenis tumbuhan endemik di Pulau Papua, artinya lebih dari dua pertiga tumbuhan tersebut tidak ditemukan di tempat lain. Hal ini menjadikan pulau Papua sebagai satu-satunya Kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki spesies endemik lebih banyak dari pada yang non-endemik



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, saat menyerahkan hasil Diseminasi Kelitbang Provinsi Papua Barat kepada CEO EcoNusa, Bustar Maitar. DOK. BALITBANGDA PB

dan tidak tersaingi di Kawasan Asia Tropis.

“Ini adalah potensi alam yang luar biasa. Karena itu, mengkaderkan ilmuwan-ilmuwan muda Papua adalah hal penting yang harus dilakukan sekarang. Tidak hanya mempelajari ilmu tentang botani atau keanekaragaman tumbuhan tetapi juga hewan, budaya dan lain-lain secara keseluruhan tentang biodiversity yang ada di Tanah Papua. Kita yang punya tempat, jadi kita sendiri yang harus pertama mengetahui sebelum orang lain. Warisan pengetahuan ini yang harus kita teruskan dari generasi ke generasi di Tanah Papua ini,” ujar Guru Besar termuda di Universitas Papua ini.

Guru besar bidang Botani ini juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang

tinggi kepada CEO EcoNusa, Bustar Maitar bersama seluruh stafnya, karena telah berkontribusi sangat luar biasa dalam membantu Pemerintah Provinsi Papua Barat mewujudkan visi Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si menjadi nyata di tingkat tapak.

Sementara itu, Bustar Maitar dalam penyampaiannya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Balitbangda Papua Barat dan jajarannya, karena apa yang dilakukan oleh Yayasan EcoNusa di Papua Barat tidak terlepas dari dukungan Gubernur Papua Barat, melalui Kepala Balitbangda selaku Koordinator Mitra Pembangunan. “Kalau pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak dukung, kitong juga tra bisa jalan, iyo to?,” ucap Bustar yang juga lahir besar di Papua ini.

Karena mendapat dukungan yang luar biasa dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat di Papua, itulah alasan yang membuat seluruh staf di Yayasan EcoNusa tetap bersemangat untuk bekerja bagi Tanah Papua.

Selain Ilmuwan Muda Papua, ada sejumlah agenda yang akan dilakukan pada Tahun 2022, khususnya agenda-agenda yang menjadi amanat dan arahan dari ICBE dan Deklarasi Manokwari 2018. Bersama Mitra Pembangunan lainnya, Yayasan EcoNusa berkomitmen untuk memberikan ide, gagasan bahkan pendanaan dalam mewujudkan visi Gubernur Papua Barat dan visi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)

“Ini adalah potensi alam yang luar biasa. Karena itu, mengkaderkan ilmuwan-ilmuwan muda Papua adalah hal penting yang harus dilakukan sekarang. Tidak hanya mempelajari ilmu tentang botani atau keanekaragaman tumbuhan tetapi juga hewan, budaya dan lain-lain secara keseluruhan tentang biodiversity yang ada di Tanah Papua.”



Penyerahan Hasil Diseminasi Kelitbangdan oleh Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat kepada Advisor GIZ Program *Corruption Prevention in the Forestry Sector*, Roto Priyono. DOK. BALITBANGDA PB

Pencegahan Korupsi Menjadi Perhatian Balitbangda Papua Barat dan GIZ

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D.Heatubun,S.Hut,M.Si kembali mendapat kunjungan dari Lembaga Kerjasama Pemerintah Indonesia – Jerman (GIZ), di Kantor Balitbangda, Manokwari pada Kamis 3 Februari 2022.

Pertemuan antara tim GIZ dengan Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat ini adalah dalam rangka berbagi informasi mengenai rencana kerja dan kemungkinan kontribusi GIZ bagi Provinsi Papua Barat. Roto Priyono, Advisor GIZ Program *Corruption Prevention in the Forestry Sector*, sesudah pertemuan

menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Kepala Balitbangda Papua Barat selaku Koordinator Mitra Pembangunan Papua Barat adalah untuk saling berbagi informasi.

“Saya ketahui bahwa Balitbangda sudah melakukan kajian dan studi terkait bagaimana meningkatkan kinerja di Provinsi Papua Barat. Ini akan menjadi masukan bagi kami untuk bagaimana melakukan pendekatan dalam program pencegahan korupsi. Pencegahan ini lebih kepada aspek edukasi, dalam arti bagaimana menanamkan nilai-nilai kebaikan, baik bagi pemerintah daerah, perusahaan maupun kepada masyarakat, terutama masyarakat adat,” ujarnya. Per-

temuan ini, lanjut Roto, adalah untuk melihat sejauh mana GIZ dan Balitbangda Papua Barat dapat bekerjasama ke depan, karena salah satu hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana GIZ dapat membantu pemerintah daerah dalam hal peningkatan kapasitas, pemerintah daerah dalam bidang pencegahan korupsi. Salah satunya adalah melakukan studi. Misalnya bagaimana melakukan studi pencegahan korupsi dari aspek antropologi terhadap nilai-nilai yang dianut.

“Kami akan melakukan edukasi juga kepada tokoh adat dan masyarakat adat. Kami juga tertarik dengan studi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), misalnya dilihat

“Kami akan melakukan edukasi juga kepada tokoh adat dan masyarakat adat. Kami juga tertarik dengan studi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), misalnya dilihat dari perspektif gendernya. Bukan soal jumlah laki dan perempuan, tapi lebih kepada fungsi sosialnya. Bagaimana peran gender dalam melakukan bisnis yang berintegritas.”

dari perspektif gendernya. Bukan soal jumlah laki dan perempuan, tapi lebih kepada fungsi sosialnya. Bagaimana peran gender dalam melakukan bisnis yang berintegritas. Selain itu, GIZ juga melihat pencegahan korupsi di sektor kehutanan sebagai satu kegiatan dalam kolaborasi ini,” jelasnya.

GIZ juga akan melihat program *multi stakeholder* platform dialog antar berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, swasta

dan masyarakat adat untuk duduk bersama membicarakan berbagai hal dan solusinya. Misalnya, jika ada terjadi konflik, maka lewat forum ini bisa menawarkan resolusi konfliknya seperti apa. “Sebenarnya ada banyak sekali potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan. Dari internal GIZ akan melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat diberikan. Kami juga sedang menyusun program kerja tahun 2022, dan ini akan jadi dasar bagi semua pihak. Sebagai mitra pemerintah

sifatnya mendukung, yang menjadi aktor tentu teman-teman di Papua Barat,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Prof. Heatubun memberi apresiasi kunjungan GIZ dan berharap dapat memberikan kontribusi penting bagi Provinsi Papua Barat yang juga sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan.

● Penulis : Alberth Y. (Balitbangda PB)



Pengelolaan Mahkota Permata Tanah Papua Mendapat Dukungan FFI



Profesor Heatubun saat memberikan arahan serta memberikan *update* terakhir terkait capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan di Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

Flora Fauna Internasional (FFI) dibawa pimpinan Frank Momberg kembali melakukan kunjungan kerja bertemu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS di pondok kerja kantor Fanindi pada Kamis (24/02/2022).

Diskusi antara FFI dan Balitbangda kali ini membahas tentang dukungan serta rencana kerja dari FFI terhadap pengelolaan bentang

alam Mahkota Permata Tanah Papua. Hal ini semata-mata adalah untuk mendukung komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Mitra Pembangunan dalam menerapkan 14 butir Deklarasi Manokwari dalam upaya melakukan implementasi pembangunan berkelanjutan.

“Kami berterima kasih atas waktu yang disediakan untuk memberikan *update* rencana kegiatan FFI di masa mendatang dan meminta masukan agar sejalan dengan ren-

cana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat”, ucap Frank. Ia menambahkan bahwa FFI mulai bekerja di Papua Barat sejak tahun 2013 di Raja Ampat yang memfokuskan pada penilaian kekayaan keanekaragaman hayati di Pulau Waigeo.

Kami ingin menyampaikan beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan di Bentang Alam Mahkota Permata Tanah Papua seperti Smart patrol. Kegiatan ini nantinya dilakukan bersama dengan masyarakat, riset



Frank Momberg Pimpinan FFI saat menjelaskan salah satu kegiatan *Smart patrol* di Bentang Alam Mahkota Tanah Papua kepada Kepala Balitbangda Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB

ngunan Berkelanjutan”, tambahnya. Selanjutnya akan diperdakan khusus untuk menjadi kawasan perlindungan dan pemanfaatan berbasis budaya lokal yang akan dikelola melalui konsorsium. *Roadmap* mengenai program konsorsium ini telah dibahas termasuk didalamnya terkait kebijakan dan kelembagaan, perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengelolaan SDA berbasis budaya dan ekosistem, kolaborasi dan *fundraising* serta peningkatan kapasitas, tutup Heatubun.

● Penulis : M. Farid

keanekaragaman hayati dan pemantauannya serta mendukung penyusunan rencana strategis untuk satwa terancam punah dan juga mendukung program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini akan kami fokuskan di Koridor yang menyambungkan antara Cagar Alam Tambrauw Utara dan Selatan, kata Direktur Asia untuk FFI.

Menanggapi paparan singkat dari Frank, Prof. Heatubun mengatakan bahwa, Balitbangda selalu menjaga kebijakan pemerintah agar selalu berlandaskan pada data saintifik dan selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas dalam perencanaan, realisasi, kinerja, tugas-tugas riset dan inovasi serta kerjasama mitra. Ia mengingatkan kembali agar kolaborasi yang dijalankan bersama mitra haruslah dapat mentransfer pengetahuan ke masyarakat di lokasi kerja, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah. “Hal ini penting karena selain meningkatkan *ownership* juga menjaga dan mengelola sumberdaya alam yang ada” tambahnya.

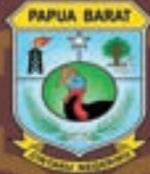
Lebih lanjut Prof. Heatubun menjelaskan bahwa Kawasan Mahkota Permata Tanah Papua memiliki luas 2,3 juta ha yang terletak di empat kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Pegunungan Arfak. “Kawasan ini telah masuk dalam RTRW Provinsi Papua Barat dimana tadi malam telah disetujui oleh DPRD Provinsi sebagai Kawasan Pemba-



Suasana Diskusi antara tim Flora Fauna Internasional (FFI) dan Balitbangda Provinsi Papua Barat. DOK. BALITBANGDA PB



Penyerahan hasil diseminasi kelitbangda Provinsi Papua Barat oleh Profesor Heatubun kepada pimpinan FFI Frank Momberg. DOK. BALITBANGDA PB



Pimpinan dan Staf
BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri

2022 M / 1443 H

Semoga di hari kemenangan ini iman kita diperkuat agar semakin semangat dalam beribadah



@balitbangdamedia_pb



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT



Selamat dan Sukses

Atas dilantiknya

Komjen Pol

Drs. Paulus Waterpauw, M.Si

Sebagai Penjabat

Gubernur Papua Barat

2022-2024

Balitbangda dan EcoNusa Berkolaborasi Dalam Diseminasi Hasil Kajian Pengembangan SDM Pariwisata di Papua Barat



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Papua Barat bersama *Chief Executive Officer* (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar. DOK.BALITBANGDA PB

Tanah Papua memiliki potensi sumber daya alam dan wisata dunia yang menjanjikan. Objek wisata yang sudah terkenal hingga internasional adalah Raja Ampat. Raja Ampat terletak pada Segitiga Terumbu Karang dunia (*coral triangle*) yang tentunya ini memiliki daya tarik bagi wisatawan serta sebagai salah satu ikon pariwisata andalan Provinsi Papua Barat. Presiden Joko Widodo memasukkan Raja Ampat ke dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain di Raja Ampat, Tanah Papua khususnya Provinsi Papua Barat juga memiliki tempat lainnya yang menarik, juga memiliki potensi pariwisata untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata, seperti Namatota dan Teluk Triton di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Keindahan alam tersebut semakin istimewa karena memiliki flora dan fauna yang sangat beragam. Namun, potensi pariwisata ter-

sebut belum dikelola dengan baik dan belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat adat. Salah satunya karena kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Padahal pariwisata berkelanjutan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat adat dengan tetap menjaga alam dan kebudayaan. Ketika sumber daya alam tersedia maka harus ada sumber daya manusia yang dilatih secara khusus untuk mengelola semua yang ada. Kegiatan kajian di wilayah Raja Ampat, Manokwari, Sorong, dan Kai-



Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Papua Barat bersama *Chief Executive Officer* (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar. DOK.BALITBANGDA PB

mana yang telah berjalan sejak Juni-Juli 2021 dengan melibatkan perwakilan pemerintah, asosiasi, industri dan sekolah vokasi pariwisata. Riset ini bertujuan un-

tuk menemukan solusi dan strategi berkelanjutan dalam pengembangan dan peningkatan SDM pariwisata di Papua Barat.

Pada Selasa, 08 Maret 2022 bertempat di salah satu hotel di Manokwari, Yayasan EcoNusa bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat menggelar seminar diseminasi hasil kajian pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Papua Barat yang digelar secara *offline* dan *online* melalui Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie. D. Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Tim Riset EcoNusa atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurutnya hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam mengambil kebijakan. "Pengambilan kebijakan oleh pemerintah harus berdasarkan data dan informasi ilmiah, karena tidak mungkin kita pakai cara lama, misalnya langsung kita ambil keputusan, tanpa ada data ilmiah yang digunakan. Profesor Heatubun menjelaskan bahwa komitmen pemerintah provinsi dan semua para pihak adalah ingin meningkatkan perekonomian dengan cara-cara yang berkelanjutan dan meningkatkan peran serta ma-



Lanny Losung (kanan) sebagai *Programme Development Associate* EcoNusa, saat memaparkan materi hasil diseminasi kajian pengembangan SDM Pariwisata. DOK.BALITBANGDA PB



Beberapa responden aktif saat memberikan pertanyaan, saran dan gagasan dalam diskusi Diseminasi Hasil Penelitian Pengembangan SDM Pariwisata di Papua Barat. DOK.BALITBANGDA PB

Kegiatan kajian di wilayah Raja Ampat, Manokwari, Sorong, dan Kaimana yang telah berjalan sejak Juni-Juli 2021 dengan melibatkan perwakilan pemerintah, asosiasi, industri dan sekolah vokasi pariwisata.

syarakat adat sebagai aktor dalam menjalankan peran penting di daerah masing-masing.

“Perubahan struktural dan pemulihan ekonomi harus dilakukan, terutama sejak dilanda pandemi Covid-19 awal tahun 2020 yang membuat ekonomi kita terpuruk. Perubahan struktural merupakan proses perubahan mendasar di semua lini untuk sebuah perubahan menuju apa yang kita harapkan, maka kita terus berusaha melakukan tugas-tugas pokok dan fungsi secara optimal, dan saat ini kita harus bangkit melakukan perubahan dari semua sisi birokrasi terkait kebijakan dan regulasi serta implementasi di lapangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Papua Barat kita sepakati sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, kaitannya dengan itu, maka ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi jingga (kreativitas dan digital) yang harus dikembangkan” jelasnya.

Terkait ekonomi hijau di Papua Barat Pemerintah mendorong komoditas lokal unggulan daerah non deforestasi, termasuk di dalamnya pariwisata alam menjadi salah satu fokus komoditas yang dikembangkan.

Mengakhiri sambutannya, Kepala Balitbangda menyampaikan beberapa hal penting terkait perubahan struktural dan percepatan pemulihan ekonomi, seperti *refocusing* pada komoditas lokal unggulan daerah, reorientasi pada pasar, peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk, dan juga peningkatan kapasitas SDM serta transformasi digital.

“Dalam seminar ini kita bisa melihat hal-hal kecil yang sangat mempengaruhi kualitas sektor pariwisata kita. Untuk itu perlu segera ekonomi dipulihkan seperti saat ini fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan serta masukan yang kuat bagi pelaku usaha pariwisata” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, *Chief Executive Officer* (CEO) EcoNusa, Bustar Maitar menyampaikan bahwa tujuan kegiatan diseminasi adalah untuk memaparkan dan mendapatkan masukan dari semua pihak dalam pengembangan pariwisata secara umum di Papua dan Papua Barat. Dirinya berharap ada dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan SDM dan pemanfaatan yang lebih baik.

“Berbicara SDM agak gampang susah, karena semua yang kita lihat seperti sudah baik, tetapi kenyataannya banyak SDM belum siap. Perlu adanya peningkatan keterampilan atau skill karena pariwisata punya standar. Sehingga keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dan potensi dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya” jelas Bustar Maitar.

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)

Dukung Penuh Event G20 di Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Barat Bersama Mitra Pembangunan Melakukan *Citizen Science*



Bersama masyarakat lokal dan mahasiswa saat mengikuti pelatihan *citizen science*. DOK. FFI

Group of 20 (G20) merupakan kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa yang merupakan forum ekonomi utama dunia dimana secara kolektif mewakili sekitar 60% penduduk dunia, 75% sektor perdagangan global dan 85% perekonomian dunia. Untuk pertama kalinya sejak G20 dibentuk pada tahun 1999, Indonesia memegang presidency G20 di tahun 2022 dengan mengusung Tema G20 “Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat”.

Salah satu Engagement Group dari G20

adalah Youth 20 (Y20), merupakan platform pemuda pemudi dari semua negara G20 yakni: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Y20 sendiri merupakan wadah perwakilan kaum muda untuk berdialog, bernegosiasi dan mengajukan solusi untuk isu-isu mendesak di dunia.

Sebelum dilaksanakannya KTT Y20, dilakukan empat Pra KTT terlebih dahulu. Salah satu tempat dilaksanakannya Pra KTT adalah Ma-

nokwari, Papua Barat yang merupakan Pra KTT ke-4 dari keseluruhan rangkaian Pra KTT.

Dalam upaya mendukung serta menyukseskan Pra KTT yang ke-4 di Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) bersama dengan Mitra Pembangunan Fauna & Flora International Indonesia Programme (FFI) Raja Ampat mengadakan kegiatan pelatihan bertepatan “Peningkatan Kapasitas Pemuda melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Konservasi”



Tim pelatih ketika menjelaskan cara menggunakan GPS kepada masyarakat. DOK. FFI

yang dilaksanakan selama dua hari pada Jumat – Sabtu (11-12 Maret 2022) di Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

“Kami ajak para pemuda untuk memahami lebih jauh tentang alam Raja Ampat juga dengan memberikan kemampuan dasar kepada mereka dalam melakukan survey secara mandiri dengan kaidah ilmiah yang terstandarisasi,” ucap Yanuar Ishaq ketika ditemui di lokasi kegiatan.

Hal serupa disampaikan oleh Wahyu Hasi-buan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) I Waisai BBKSDA Papua Barat, menurutnya dengan kemampuan dan pemahaman dasar yang diberikan, maka informasi keanekaragaman hayati yang dikumpulkan di lingkungan kampung mereka (pemuda pemudi) dapat menjadi informasi ilmiah yang kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai nilai keunikan dari area kawasan hutan yang mereka miliki.

“Harapannya akan banyak anak muda yang tertarik untuk menggali informasi keanekaragaman hayati di hutan sekitar kampung dan tempat tinggal mereka, bukan hanya menjaga alam sebagai ujung tombak pegiat konservasi, tetapi juga memiliki nilai manfaat bagi mereka,” harap Hasibuan.

Salah satu peserta dalam kegiatan itu,

Sebelum dilaksanakannya KTT Y20, dilakukan empat Pra KTT terlebih dahulu. Salah satu tempat dilaksanakannya Pra KTT adalah Manokwari, Papua Barat yang merupakan Pra KTT ke-4 dari keseluruhan rangkaian Pra KTT.

Kilion Gaman dari Kampung Waifoi, Distrik Tiplol Mayalibit, menjelaskan dirinya sangat senang dilibatkan dan diikutsertakan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yang terbagi dalam materi kelas dan praktek lapangan. Praktek lapangan dilakukan pada *spot* wisata *Camping Ground* dan *Birdwatching* KTH Warkesi. “Saya senang sekali karena disini saya dapat berlatih menggunakan kamera untuk mengabadikan keindahan alam Raja Ampat, baik binatang dan tumbuhan yang ada di *spot* favorit wisata ini” ungkap Gaman.

Sementara itu secara terpisah Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan ini. Profesor Hea-

tubun mengatakan bahwa kegiatan ini sendiri merupakan seluruh rangkaian dari Event G20 nantinya di Bali. Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan tentunya juga harus didukung dengan semua aktifitas atau kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan seperti menyiapkan pemuda yang akan menjadi kader pembangunan untuk masa depan, tambah Wakil Ketua Panitia Pelaksana Pertemuan Y20 dan W20 ini.

Selanjutnya, Kepala Balitbangda ini menegaskan bahwa peran pemuda secara khusus juga harus berkelanjutan dari generasi ke generasi sehingga apa yang telah dilakukan saat ini dapat terus diestafetkan kepada generasi selanjutnya.

“Kegiatan *Citizen Science* sangat penting untuk mengetahui potensi di sekitar kita terutama para pemuda yang hidup berdampingan langsung dengan alam sekitar sehingga mereka berperan langsung dalam mengeksplorasi potensi alam dan lingkungan sekitarnya kemudian mempromosikannya lewat media-media sosial agar dapat diketahui oleh publik terutama hal-hal yang terkait dengan pengembangan potensi pariwisata alam” tutup Profesor Heatubun.

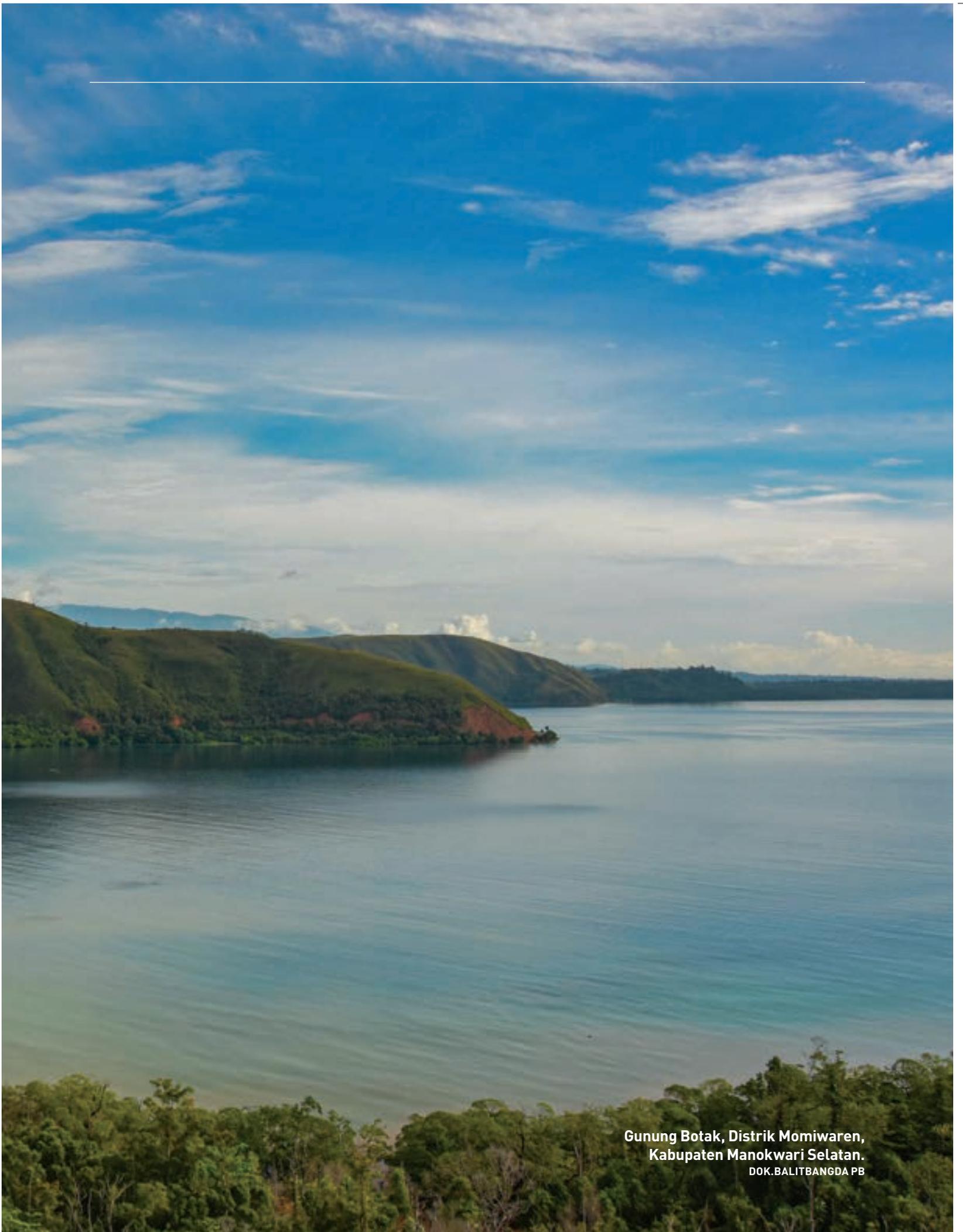
Pra KTT Y20 ke-4 di Manokwari akan membahas dua topik untuk mengatasi persoalan utama tentang keberagaman dan inklusi yakni pendidikan dan ekonomi kreatif. Dengan berfokus terhadap perbaikan Sumber Daya Manusia yang dapat berpengaruh luas pada pencapaian pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Hal ini dapat memperkuat kesejahteraan individu maupun komunitas, sekaligus untuk memampukan seluruh umat manusia mengembangkan potensi terbaiknya dan mendapatkan hak-haknya.

Keberagaman dan inklusi bermanfaat untuk semuanya terutama bagaimana kaum muda dapat berkontribusi pada upaya pemulihan yang inklusif dan mendorong keberagaman di masyarakat serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

● Penulis : Christ M. (Balitbangda PB)

PANORAMA





**Gunung Botak, Distrik Momiwaren,
Kabupaten Manokwari Selatan.**
DOK.BALITBANGDA PB

SANGGAR KLAFUN: WADAH KREATIFITAS PEREMPUAN ASLI PAPUA



❖ Sanggar Klafun merupakan salah wadah yang lahir dari sebuah keprihatinan pribadi dari salah satu Tokoh Perempuan Ibu Frida Kelase, yang adalah Perempuan Asli dari Suku Mooi yang berdomisili di Kota Sorong.

❖ Sanggar Klafun diresmikan pada 21 April 2018, Klafun terdiri dari dua kata Kla: Air, Fun: Tuhan, jadi terjemahan bebasnya adalah Air Kehidupan yang menggambarkan pribadi Tuhan. Sehingga melalui Sanggar Klafun, diharapkan bisa menjadi sumber kehidupan bagi para perempuan Papua.

❖ Dirinya membentuk Sanggar ini karena melihat kondisi perkembangan saat ini, dimana keberadaan Perempuan Asli Papua dan partisipasinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, dan eksistensi Perempuan Papua diruang Publik masih sangat kurang.

❖ Sanggar Klafun mencoba melihat potensi pasar dan memfasilitasi kelompok-kelompok Perempuan Papua yang lebih akrab disebut kelompok Mama-Mama Papua, serta mendorong potensi-potensi yang sudah ada, dimana Perempuan Papua juga selalu identik dengan potensi kerajinan tangan berupa rajutan anyaman noken, piring, topi dan kerajinan lainnya yang menjadi ciri khas disetiap daerah yang ada.





❖ Selain merangkul mama-mama Papua yang berasal dari suku Mooi, Sanggar Klafun juga bekerjasama dengan beberapa kelompok perempuan yang berada dari daerah lain seperti Raja Ampat, Manokwari, Wamena dan Merauke. Dimana setiap mitra ini selalu mengirimkan hasil kerajinan tangan seperti Noken maupun ukiran-ukiran untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Sanggar Klafun.



❖ Selain itu aktivitas lain dari Sanggar Klafun adalah menciptakan olahan kuliner lokal yang dikemas secara modern yang berbasis kearifan lokal. Seperti Keripik Sukun, Keripik Keladi, Keripik Pisang.



❖ Aktivitas lain yang menjadi target utama Sanggar ini adalah Kelompok Menjahit dengan jumlah anggota yang terlibat 8 orang. Kelompok ini sudah mengikuti kursus dasar menjahit, dan harapannya kedepan mereka bisa mendapat perhatian pemerintah melalui kursus lanjutan dengan menghadirkan tenaga ahli yang profesional di bidang modiste. Target dibentuknya kelompok ini adalah bisa membentuk konter penjahit Perempuan Asli Papua, yang juga mampu bersaing dalam dunia modiste.

● Penulis : Arissa M. (Balitbangda PB)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat

Fokus Program Pembangunan Sektor Energi dan Ketenagalistrikan



Yohan Abraham Tulus, SH., MH
KEPALA DINAS ESDM PROVINSI PAPUA BARAT



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat melaksanakan tugas pokok pemerintahan pada sektor energi dan mineral yang menjadi kewenangan daerah pemerintah Provinsi Papua Barat yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua Barat dan selanjutnya dituangkan dalam rencana strategis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dinas ESDM terdiri dari empat bidang: bidang geologi dan air tanah, bidang mineral dan batubara, bidang energi dan bidang ketenagalistrikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral, Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, ditetapkan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.



Pimpinan dan Seluruh Staf ASN dan Honorer Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Papua Barat.
DOK. DINAS ESDM PB

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus, SH., MH menyampaikan bahwa program kegiatan yang telah ada dalam dokumen perencanaan disesuaikan dengan skala-skala prioritas sesuai dengan Visi Misi Gubernur. ESDM memprioritaskan terkait peningkatan



Peresmian Instalasi Jaringan Listrik Rumah Tangga Sederhana (RTS) di Distrik Neney, Kabupaten Manokwari Selatan.
DOK. DINAS ESDM PB

kesejahteraan masyarakat maka lebih mengacu pada rasio elektrifikasi di Papua Barat dimana lebih meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga berlistrik sehingga dalam beberapa tahun terakhir prioritas pembangunan lebih banyak ke sektor energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi program prioritas.

Sektor energi dan kelistrikan:

Program kelistrikan ini ada yang namanya pembangunan listrik rumah tangga sederhana (RTS) yang artinya masyarakat mempunyai rumah yang sederhana dan kemampuan ekonomi terbatas sehingga tidak mampu menyambung listrik PLN maka pemerintah provinsi membantu menyambungkan jaringan listrik PLN, melakukan instalasi dan pemasangan meteran ke rumah masyarakat. Prioritas pembangunan rumah tangga sederhana adalah kepada Orang Asli Papua. Dihitung dari lima tahun terakhir sesuai Renstra dan RPJMD pembangunan dilakukan di Kabupaten Tambrauw Wilayah Mubrani, Manokwari Selatan Wilayah Neney, Kabupaten Manokwari di Kawasan Pantura dan pada tahun 2021 sebanyak 250 rumah di Pulau Sop, Kabupaten Sorong mendapatkan pemasangan RTS.

Dinas ESDM juga membantu memasang jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) pada rumah masyarakat dan juga pemberian bantuan genset buat sekolah dan rumah ibadah, pemasangan lampu-lampu penerangan di titik-titik tertentu. Bantuan dari pemerintah pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Program lain dari pemerintah pusat yaitu alat pengisian aliran listrik (ABDAL).

Kegiatan yang terkait dengan sektor pertambangan adalah melakukan pembinaan kepada pemegang ijin usaha pertambangan yang berupa kewenangan batuan mineral non logam karena mineral logam dan batubara sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya melakukan pembinaan, sosialisasi, dan monitoring kepada mereka yang mengelola batuan seperti PT. Fulica yang membawa untuk kepentingan pembangunan dengan memanfaatkan mineral non logam dan batuan atau biasa disebut galian C. Dinas ESDM menerbitkan rekomendasi penerbitan surat ijin. Ada juga dari sektor pertambangan melakukan pemetaan kawasan bencana alam dan juga kawasan tumigasi dan pemetaan wilayah pertambangan rakyat. Wilayah pemetaan pertambangan rakyat berada di wilayah hutan lindung dan konservasi.



Penyerahan bantuan mesin genset kepada komunitas anak air untuk menunjang operasional di cafe apung di Pantai BLK, Manokwari.
DOK. DINAS ESDM PB

PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Kegiatan Pembangunan Sarana Penyedia Tenaga Listrik pada daerah terpencil dan Jauh dari jangkauan Listrik PLN antara lain :

Sekilas tentang LTSHE :

1. Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) merupakan lampu tenaga surya yang praktis, mudah pemasangannya dan relatif tidak memerlukan perawatan khusus.
2. Sangat cocok untuk rumah pedesaan yang secara geografis sangat terisolir, dan distribusi penduduknya tersebar serta sulit dijangkau jaringan PLN.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Yohan Abraham Tulus, SH., MH menyampaikan bahwa Program kegiatan yang telah ada dalam dokumen perencanaan disesuaikan dengan skala-skala prioritas sesuai dengan Visi Misi Gubernur.

1. Pemasangan Lampu Tenaga Surya

NO	KABUPATEN	DISTRIK	KET
1.	TELUK BINTUNI	BABO	Catatan : Lokus Kampung/Desa ditetapkan setelah penetapan Lokasi/ Koordinasi dengan Kabupaten Kota, atau usulan Musrembang Provinsi
2.	KAIMANA	BOUFUER	
3.	KABUPATEN SORONG	MAKBON	
4.	MAYBRAT	MARE SELATAN	
5.	TAMBRAUW	TINGGOUW	
6.	TELUK WONDAMA	WAMESA	



Penyerahan genset ke SMK Raja Ampat.
DOK. DINAS ESDM PB

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

Tujuannya adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi masyarakat di daerah terpencil, serta memberikan penerangan pada jalan lingkungan bagi masyarakat.

3. Program LTSHE diinisiasi PLN pada tahun 2012, dikenal dengan Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN). Sampai saat ini terdapat 12.303 KK yang bermukim di Papua dan Papua Barat sebagai pelanggan PLN dengan biaya rekening listrik per bulan sebesar 35.000/pelanggan. Umumnya (sekitar 90%) pelanggan menunggak.
4. Satu set lampu SEHEN PLN terdiri dari papan panel surya 14 Wp, satu set baterai lithium dan kabel penghubung, 3 lampu jenis LED @3w (60 lumen/W) dan remote control untuk menyalakan dan mengatur tingkat terang lampu.

NO	URAIAN	KABUPATEN	DISTRIK/KAMPUNG	VOLUME
1	Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)	1. Pegunungan Arfak	Coisi	1 unit
		2. Manokwari Selatan	Sosomorof	1 unit
2	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	1. Manokwari		166 unit
		2. Teluk Wondama		
		3. Maybrat		
		4. Fakfak		
		5. Sorong		
		6. Kota Sorong		

2. SOLAR HOME SYSTEM (PLTS TERSEBAR)

● Penulis : Lince B. (Balitbangda PB)

NO	KABUPATEN	DISTRIK	VOLUME
1	Teluk Bintuni	Kuri	50 Unit
2	Tambrauw	Yembun	-

3. PEMBANGUNAN PLTS KOMUNAL (PLTS TERPUSAT)

NO	KABUPATEN	DISTRIK/KAMPUNG	KAPASITAS
1	Fakfak	Teluk Patipi/Sum	-





“P apua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, buku ini mengulas tentang rangkaian aktivitas pembangunan berkelanjutan dan capaian kinerja di Provinsi Papua Barat dalam periode tahun 2017- 2022 kepemimpinan mantan Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Mohamad Lakotani serta Sekretaris Daerah Nataniel D. Mandacan dalam mengimplementasikan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.

Delapan tema besar yang disajikan dalam Buku Papua Barat Menuju Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari: Tanah Papua Episentrum Kekayaan Alam dan Budaya; Komitmen Pembangunan Berkelanjutan, Kolaborasi dan Mitra Pembangunan; Investasi Hijau Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat; Peran pemuda menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat; Komoditas Unggulan Daerah Non Deforestasi; Langkah Besar Papua Barat menuju Pembangunan Berkelanjutan; dan Gubernur Dominggus Sang Pahlawan Konservasi. Kontributor buku terdiri dari berbagai pihak sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang saling mendukung dan melengkapi sehingga buku ini bisa tersusun.





BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

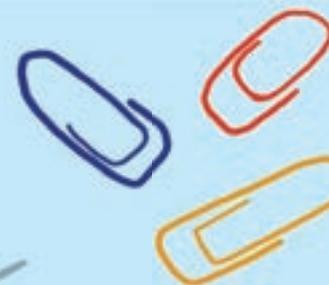


SELAMAT HARI LAHIR
PANCASILA
1 JUNI 2022



@mediabridapapubarat

Pemberitahuan



Bagi Seluruh Pembaca Setia Majalah Kasuari Inovasi

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat serta Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Riset dan Inovasi Daerah, maka sejak Tanggal 22 April 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat telah resmi bertransformasi berubah nomenklatur menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Papua Barat.

Untuk itu kami menyampaikan bahwa pada edisi-edisi MKI selanjutnya Tim Redaksi sudah akan menggunakan nama BRIDA mengikuti perubahan nomenklatur tersebut. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian diucapkan terima kasih.

MAJALAH
KASUARI INOVASI
Tim Redaksi MKI

NEW





PAPUA CUSTOMER CARE

Kemudahan akses informasi melalui
Official Whatsapp Bank Papua

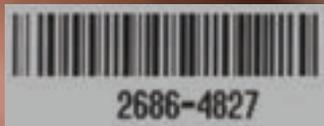

0813 4460 5555



SCAN ME

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan





*"Tukik (Anak Penyu) yang di ambil di Pantai Utara Manokwari dan dilepas di pesisir pantai Pulau Mansinam Kabupaten Manokwari"
-dok.Balitbangda Provinsi Papua Barat-*